



**LAPORAN**  
**EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA**  
**MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI**  
**BANTEN TAHUN 2017-2022**

**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN**  
**TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang atas perkenaanannya Penyusunan Laporan Evaluasi terhadap Hasil RPJMD 2017-2022 dapat diselesaikan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Kepala Bappeda melaksanakan Evaluasi RPJMD untuk digunakan sebagai bahan penyusunan RPJMD atau RPD untuk periode berikutnya.

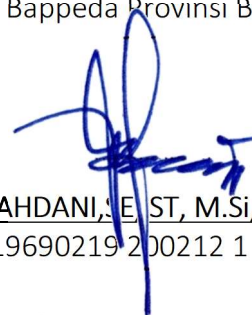
Tujuan evaluasi yaitu untuk mengetahui capaian setiap Indikator RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 khususnya sampai dengan periode tahun keempat atau tahun 2021 sehingga dapat lebih menjamin untuk pencapaian atas target yang telah ditetapkan. Dengan optimalnya pencapaian target RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 diharapkan dapat memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Banten.

Dalam Kesempatan ini, kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada segenap pihak yang membantu dalam penyusunan Laporan Hasil Evaluasi RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022. Akhir kata, semoga Laporan evaluasi ini dapat bermanfaat bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan dan dokumen perencanaan periode selanjutnya.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Serang, Februari 2022

Kepala Bappeda Provinsi Banten



Dr. MAHDANI, E. ST, M.Si, MM  
NIP.19690219 200212 1 001

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I           PENDAHULUAN</b>	
1.1.   LATAR BELAKANG .....	<b>I-1</b>
1.2.   DASAR HUKUM.....	<b>I-2</b>
1.3.   TUJUAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJMD.....	<b>I-5</b>
1.4.   RUANG LINGKUP.....	<b>I-5</b>
1.5.   SISTEMATIKA PENYUSUNAN.....	<b>I-6</b>
<b>BAB II           KEBIJAKAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH                   DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022</b>	
2.1.   KEBIJAKAN RPJMD PROVINSI BANTEN TAHUN 2017- 2022.....	<b>II-1</b>
2.2.   STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RPJMD PROVNSI BANTEN TAHUN 2017-2022.....	<b>II-29</b>
2.3.   PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH.....	<b>II-45</b>
<b>BAB III          EVALUASI IMPLEMENTASI RPJMD PROVINSI BANTEN TAHUN                   2017-2022</b>	
3.1.   EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN RPJMD           DAN           INDIKATOR           KINERJA UTAMA.....	<b>III-1</b>
3.2.   EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN MISI RPJMD 2017- 2022.....	<b>III-11</b>
3.3.   EVALUASI CAPAIAN ATAS PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2021.....	<b>III-25</b>
<b>BAB IV          ANALISIS DAN PERMASALAHAN</b>	
4.1.   ANALISIS PERMASALAHAN.....	<b>IV-1</b>
4.2.   ANALISIS EVALUASI KINERJA .....	<b>IV-2</b>
<b>BAB V           PENUTUP</b>	
5.1.   KESIMPULAN.....	<b>V-1</b>
5.2.   REKOMENDASI.....	<b>V-1</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	
<b>Evaluasi Capaian Program TA 2021.....</b>	

## BABI PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 254 ayat (1) bahwa Kepala BAPPEDA Provinsi melaksanakan evaluasi hasil RPJMD lingkup Daerah Provinsi dan selanjutnya pada ayat (3) Hasil evaluasi RPJMD Provinsi digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJMD Provinsi untuk periode berikutnya.

Selanjutnya dengan memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah yang Berakhir pada tahun 2022, dimana Pemerintah Provinsi Banten sebagai salah satu Provinsi yang harus menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026. Penyusunan RPD Tahun 2023-2026 diantaranya dilakukan dengan pendekatan hasil evaluasi atas capaian RPJMD Tahun 2017-2022 yang meliputi proses pengendalian dan evaluasi terhadap pencapaian Tujuan, Sasaran Daerah, Sasaran Perangkat Daerah dan kinerja Program selama 4 (empat) tahun terakhir yaitu capaian RPJMD pada tahun 2018 sampai dengan 2021.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 merupakan periode keempat masa RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025. RPJMD Provinsi Banten ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten 2017-2022 dan telah dilakukan perubahan RPJMD pada tahun 2020 dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten tahun 2017-2022.

Berkaitan dengan pencapaian target RPJMD tentunya tidak terlepas dari pengaruh adanya dampak pandemi corona virus disease (covid-19) yang tidak hanya melanda Banten saja tetapi secara global. Dalam rangka upaya memutus rantai penularan pandemic covid-19, mengakibatkan banyak terhentinya kegiatan masyarakat yaitu dengan adanya pembatasan-pembatasan aktivitas dan mobilitas masyarakat yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi capaian pembangunan di Provinsi Banten.

## **1.2. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, beserta perubahannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodesifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
  16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26 );
  17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten 2017-2022 (Lembaran Daerah

Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2019).

### **1.3. Tujuan Pengendalian dan Evaluasi RPJMD**

Sebagaimana diatur dalam Pasal 253 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Evaluasi dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD yang digunakan untuk mengetahui realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD provinsi dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD provinsi. Evaluasi juga dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah provinsi dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah provinsi dan pembangunan jangka menengah nasional.

### **1.4. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pengendalian dan evaluasi RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 meliputi :

- a. Capaian indikator kinerja pembangunan sampai dengan Tahun 2021 yang dikomparasikan dengan target indikator kinerja pada RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022.
- b. Identifikasi sasaran dan program yang capaian kinerjanya rendah serta yang capaian kinerjanya tinggi.
- c. Merumuskan rekomendasi kebijakan percepatan implementasi sasaran dan program pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022.

### **1.5. Sistematika Penyusunan**

Sistematika penyusunan Dokumen Pengendalian dan Laporan Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD Provinsi Banten tahun 2017-2022 ini disajikan sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Berisikan uraian tentang Latar Belakang, Dasar Hukum, Tujuan, Ruang Lingkup serta Sistematika Penyusunan.

**BAB II : KEBIJAKAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022**

Berisikan Kebijakan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, Keterkaitan Visi, Misi Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan serta Program Pembangunan.

**BAB III : EVALUASI IMPLEMENTASI RPJMD PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022**

Evaluasi Capaian Indikator Makro Pembangunan, Evaluasi Capaian Indikator Pembangunan

Misi 1, menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), Evaluasi Capaian Indikator Pembangunan

Misi 2, membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur, Evaluasi Capaian Indikator Pembangunan

Misi 3. meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas, Evaluasi Capaian Indikator Pembangunan

Misi 4. meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas, Evaluasi Capaian Indikator Pembangunan

Misi 5. meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

**BAB IV : ANALISIS PERMASALAHAN DAN EVALUASI KINERJA**

Berisikan uraian tentang Analisis Kinerja Berdasarkan Pengendalian dan Evaluasi serta Permasalahan.

**BAB V : PENUTUP**

Berisikan uraian tentang Kesimpulan dan Rekomendasi terhadap Hasil Pengendalian dan Evaluasi.

**BAB II**  
**KEBIJAKAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI BANTEN**  
**TAHUN 2017-2022**

**2.1. Kebijakan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022**

Visi pembangunan Provinsi Banten yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2017-2022), yaitu:

**BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUL KARIMAH.**

Provinsi Banten yang Maju berarti adanya perubahan dan kondisi semula ke arah yang lebih baik. Cara-cara lama dalam mengelola pemerintahan ditinggalkan, selanjutnya cara baru dalam mengelola pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Beberapa indikator pengelolaan pemerintahan yang lebih maju adalah: adanya inovasi dalam tata kelola pemerintahan (lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel disertai perbaikan hubungan kelembagaan dengan Kabupaten/Kota), dan adanya perubahan *mindset* atau perubahan budaya lama yang tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Provinsi Banten yang Mandiri mengacu pada kemampuan keuangan daerah untuk mendukung dan menjalankan pembangunan daerah. Suatu daerah dikatakan mandiri bila pendapatan asli daerahnya dalam APBD cukup dominan, sehingga tidak tergantung oleh bantuan atau subsidi pemerintah pusat. Beberapa indikator Mandiri disini menunjukkan kemampuan fiskal yang cukup untuk merealisasikan berbagai program pemerintah daerah.

Provinsi Banten yang Berdaya Saing berarti kemampuan daerah mengelola dan mengembangkan segenap potensi yang dimiliki serta menghilangkan berbagai hambatan sehingga berhasil menjadi tujuan investasi dibandingkan dengan daerah lainnya. Beberapa parameter berdaya saing ini, berupa kemudahan, fasilitasi dan daya tarik investasi di provinsi Banten seperti infrastruktur yang memadai, keamanan yang terjamin, pelayanan perijinan yang mudah dan berkepastian hukum, sumber daya manusia yang berkualitas, serta ketersediaan energi.

Provinsi Banten yang Sejahtera berarti kemampuan daerah dalam mengelola aspek manusia yang diukur dengan pencapaian angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Beberapa parameter Sejahtera, diukur dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang pencapaiannya melalui kontribusi tiga indikator utama yaitu pencapaian indikator pendidikan, pencapaian indikator kesehatan, dan pencapaian indikator daya beli masyarakat.

Provinsi Banten yang Akhlakul Karimah berarti harapan daerah dalam menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai agama, yaitu nilai-nilai yang sesuai dengan hakikat ketuhanan, keberadaan manusia beserta alam sekitarnya.

Beberapa parameter akhlakul karimah ini, tingkat kerukunan umat beragama pada masyarakat, implemetasi terhadap rumusnya pada perilaku aparaturnya pemerintahan daerah yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik, dan penurunan indeks persepsi korupsi di Provinsi Banten.

## **MISI**

Misi adalah pernyataan tentang upaya yang harus dilakukan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Visi Provinsi Banten 2017-2022 tersebut akan ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
2. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur;
3. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas;
4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas;
5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

## **PRIORITAS UNGGULAN**

- A. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
  1. Penerapan E-Planning, E-monev, dan E-Budgeting;
  2. Reformasi Birokrasi;

3. Penerapan Manajemen Kinerja (Peningkatan Predikat LAKIP dari CC ke BB);
4. Reformasi Tata Kelola Keuangan (Peningkatan predikat dari Disclaimer/WDP ke WTP);
5. Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Publik;
6. Perbaiki Angka Indeks Persepsi Korupsi;
7. Perbaiki Hubungan Kerja Daerah Provinsi dengan Kabupaten/Kota.

B. Membangun dan Meningkatkan kualitas infrastruktur

1. Pembangunan ruas jalan Provinsi yang rusak;
2. Pembangunan Jalan Kolektor Baru untuk membuka jalur isolasi dan membuka interkoneksi antar wilayah;
3. Pembangunan dan perbaikan jembatan pada seluruh jalan Provinsi;
4. Pembangunan Jembatan Penyeberangan untuk mempermudah akses penduduk terhadap pelayanan publik dan kegiatan ekonomi;
5. Normalisasi Sungai dari seluruh sungai yang ada di Banten;
6. Normalisasi Situ untuk pengembalian fungsi Situ;
7. Pembangunan Terminal Tipe B dan Pengembangan Sistem Transportasi Massal Skala Provinsi;
8. Pembangunan Infrastruktur yang menunjang Sistem Transportasi Laut dan Aktivitas Ekonomi Sektor Maritim;
9. Revitalisasi Kawasan Banten Lama dalam rangka Pengembangan Sektor Pariwisata dan Pelestarian Cagar Budaya serta kearifan lokal;
10. Penataan Kawasan Kumuh Kampung Nelayan, Perdesaan/Perkotaan;
11. Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Skala Provinsi untuk mempertahankan daya dukung lingkungan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan;
12. Evaluasi Perencanaan Pemanfaatan Pengendalian Tata Ruang Wilayah Provinsi;
13. Pembangunan dan Revitalisasi Infrastruktur Pertanian (Bendungan dan Irigasi).

- C. Meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas
1. Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Unit Sekolah Baru (USB) untuk jenjang SMA dan SMK untuk meningkatkan APK;
  2. Peningkatan Kompetensi Guru melalui Pendidikan Strata 1 SMA, SMK;
  3. Peningkatan Kompetensi Guru melalui Pendidikan Strata 2 Guru SMA, SMK;
  4. Peningkatan Kesejahteraan Guru melalui pemberian insentif bagi Guru SMA dan SMK;
  5. Peningkatan Prestasi Siswa Berbakat bagi siswa SMA dan Sekolah Berkebutuhan Khusus;
  6. Peningkatan Fungsi Sekolah dalam Menanamkan nilai-nilai Agama serta membentuk karakter yang Berakhlaqul Karimah.
- D. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas
1. Pengembangan Rumah Sakit Umum Provinsi menjadi Rumah Sakit Rujukan Regional;
  2. Penyediaan Dokter pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Khususnya untuk wilayah Terpencil dengan Pemberian Insentif bagi Dokter Umum/Gigi dan Petugas Kesehatan Masyarakat;
  3. Peningkatan Kapasitas Regulasi di bidang Pelayanan Kesehatan;
  4. Peningkatan Penyediaan Air Bersih kepada masyarakat melalui Pembangunan Sumber Air Baku di 8 Kabupaten/Kota.
- E. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi
1. Penciptaan Iklim Investasi melalui Perbaikan Perizinan, Infrastruktur, Regulasi Tenaga Kerja, Fasilitasi Sumber Energi dan Menciptakan Keamanan dan Ketertiban untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah;
  2. Pengendalian Inflasi Daerah;
  3. Pemberdayaan Ekonomi bagi Masyarakat Miskin Khususnya Petani dan Nelayan;
  4. Pengembangan Kawasan Ekonomi yang Berbasis Ekonomi Kreatif dan Pariwisata;

5. Peningkatan Tata Kelola APBD untuk Meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah dalam rangka Mendukung Pembangunan Daerah serta Fungsi APBD dalam Hal Distribusi dan Alokasi;

Dalam menjalankan visi, misi dan program ini, juga melaksanakan amanat undang-undang yang berbasis urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.

#### **2..1.1. TUJUAN DAN SASARAN**

Untuk mewujudkan misi, dijelaskan dengan tujuan yaitu berisi Pernyataan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi selama lima tahun yang didasarkan pada isu-isu analisis strategis, disertakan pula indikator kinerja tujuan, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian tujuan yang akan dicapai selama lima tahun dan secara bertahap dapat diurai pencapaiannya setiap tahun. Berdasarkan lima misi yang telah ditetapkan, maka diurai masing masing misi dengan pernyataan tujuan dan indikator tujuannya.

Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari tujuan yang diformulasikan spesifik, mudah dicapai, rasional memperhatikan isu strategis daerah, disertakan pula indikator kinerja sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan dicapai selama lima tahun dan secara bertahap dapat diurai pencapaiannya setiap tahun.

Berdasarkan pernyataan tujuan dan indikator tujuan yang telah ditetapkan, maka dilakukan cascading down yaitu menurunkan rencana pencapaian indikator tujuan kepada indikator sasaran yang memberikan kontribusi terhadap pencapaian indikator tujuan yang hendak dicapai target kinerjanya, sebagaimana ditampilkan dalam tabel

Tabel 2.1.

## Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Provinsi Banten (Setelah Perubahan)

VISI : BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUAL KARIMAH

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB
						2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1.	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat		Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	2.8	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.5	SEKRETARIS DAERAH
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Pemerintah Provinsi Banten	Nilai	CC	B	BB	BB	A	A	A	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
				Capaian Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	CC	B	BB	BB	A	A	A	
				Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Nilai	CC	B	BB	BB	A	A	A	OPD
			Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik Badan Penghubung	Capaian Pelayanan Publik	%	100	100	100	100	100	100	100	BADAN PENGHUBUNG

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	NDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB
						2017	2018	2019	2020	2021	2022		
			Terwujudnya peran DPRD sesuai dengan fungsinya	Capaian Program-program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen RPJMD maupun Dokumen RKPD	%	100	100	100	100	100	100	100	SEKRETARIAT DPRD
			Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel	Capaian Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Meningkatnya Kualitas SPIP	Capaian Maturitas SPIP	Nilai	2	2	3	3	4	4	4	INSPEKTORAT
				Capaian Kapabilitas APIP	Level	0	0	0	3	3	4	4	
			Meningkatnya Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah yang berkualitas	Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah	%	60,00	65	70	75	80	80	80	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Penilaian Perencanaan, Pengukuran, pelaporan dan capaian kinerja	Nilai	CC	B	BB	BB	A	A	A	
			Meningkatnya Penelitian dan pengembangan yang berkualitas	Cakupan Penelitian dan pengembangan	%	50	100	100	100	100	100	100	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	NDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB
						2017	2018	2019	2020	2021	2022		
			Meningkatnya Ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan secara elektronik	Maturitas SIPD	%	0.00	0.00	0.00	70	75	80	80	
			Terwujudnya Kompetensi Aparatur	Persentase Peningkatan Indeks Kompetensi ASN	%	10	10	15	20	25	30	30	BADAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Terwujudnya Profesionalisme aparatur	Persentase Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN	%	70	75	80	85	90	95	95	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Meningkatnya Pendapatan Daerah yang Optimal	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	%	62.89	59.30	60.62	61.91	63.19	64.44	64.44	BADAN PENDAPATAN DAERAH
			Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum daerah yang aman dan kondusif	Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah	%	70,00	75	75	80	80	85	85	SATPOL PP
			Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Keamanan dan Stabilitas Daerah yang kondusif untuk mendukung NKRI	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Banten	Nilai	68,46	70	74	76	78	80	80	BADAN KESBANGPOL
				Penanganan konflik masyarakat	%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	100	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	NDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB
						2017	2018	2019	2020	2021	2022		
			Meningkatnya Penanggulangan Kebencanaan yang efektif	Indeks Resiko Bencana	Nilai	133	133	125	120	115	110	110	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Meningkatnya Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel	Cakupan Database Kependudukan Tingkat Provinsi	%	0.00	0.00	100	100	100	100	100	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
			Meningkatnya Kerjasama dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan	Persentase Realisasi Kebijakan kerjasama Pemerintahan	%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	100	BIRO PEMERINTAHAN
				Capaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Banten	%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	100	
			Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah	Persentase realisasi produk hukum daerah dan HAM yang terpublikasi	%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	100	BIRO HUKUM
			Meningkatnya Tatalaksana Organisasi Daerah Yang Efektif	Persentase Manajemen Reformasi Birokrasi	%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	100	BIRO ORGANISASI

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	NDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB
						2017	2018	2019	2020	2021	2022		
			Meningkatnya Pelayanan Umum yang Prima	Persentase Peningkatan Pelayanan Umum yang Prima	%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	100	BIRO UMUM
			Meningkatnya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	100	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
			Meningkatnya Pelayanan dan fasilitasi Pimpinan	Persentase Peningkatan Pelayanan Fasilitas Pimpinan	%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	100	BIRO ADMINISTRASI RUMAH TANGGA PIMPINAN
			Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Ekonomi Desa dan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Capaian Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Ekonomi Desa dan Pemerintahan Desa/Kelurahan di 48 desa tertinggal dan berkembang yang diberdayakan	%	0.00	0.00	0.00	41.67	33.33	25	25	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan Yang Berbasis Teknologi dan keterbukan Informasi	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	88,08	88.08	89	89.55	90	90	90	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
				Persentase Sarana dan Prasarana Persandian	%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	100	
			Meningkatnya ketersediaan data dan Statistik Sektoral yang dikelola secara elektronik	Maturitas Database Statistik Sektoral	Nilai	0.00	0.00	0.00	100	100	100	100	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	NDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB
						2017	2018	2019	2020	2021	2022		
			Meningkatnya Administrasi dan Pembangunan Daerah	Persentase Realisasi Layanan dan Pembangunan Administrasi Daerah	%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	100	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH
			Meningkatnya Pengelolaan arsip pemerintah daerah yang berkualitas	Persentase OPD yang Menyelenggarakan kearsipan sesuai Ketentuan Kearsipan	%	70	80	85	90	95	100	100	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
2.	Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur	Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas dalam mendukung kelancaran arus barang, orang dan jasa yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah dan perekonomian daerah		Capaian kinerja infrastruktur daerah	%	50	100	100	100	100	100	100	SEKRETARIS DAERAH
			Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Daerah	Persentase Pembangunan dan Penanganan Infrastruktur	%	50	60	70	80	85	90	90	ASISTEN PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN
			Meningkatnya Infrastruktur jalan dan jembatan yang handal	Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	%	74.45	0.00	0.00	100	100	100	100	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				Persentase Jembatan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	%	83.00	0.00	0.00	93.5	95.9	100	100	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	NDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB
						2017	2018	2019	2020	2021	2022		
			Meningkatnya sarana dan prasarana jaringan sumberdaya air	Persentase Penanganan Pencegahan Banjir dan Abrasi	%	15,51	0.00	0.00	32.65	37.09	42.42	42.42	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				Luasan layanan irigasi	Ha	15.118,5	0.00	0.00	18.110,58	19.387,46	20.888,19	20.888,19	
				Persentase penyediaan prasarana air baku	%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	100	
			Meningkatnya Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	80	0.00	0.00	87.5	90	92.5	92.5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Meningkatnya Perumahan dan Pemukiman yang layak, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi lingkungan, serta Pengelolaan Sampah regional	Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani	Ha	375.29	114.6	203.2	274.6	333.3	375.29	375.29	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
				Persentase Rumah Layak Huni	%	82.86	84.02	85.18	86.34	87.5	88.66	88.66	
				cakupan penyediaan pengelolaan sampah	%	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00	
			Meningkatnya Sarana dan prasarana bangunan pada kawasan Strategis Provinsi yang berkualitas	Persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	%	0.00	0.00	0.00	75	88	100	100	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	NDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB
						2017	2018	2019	2020	2021	2022		
			Meningkatnya keselamatan dan kelancaran lalu lintas	Persentase peningkatan pelayanan perhubungan darat, laut dan udara	%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	100	DINAS PERHUBUNGAN
			Meningkatnya Kinerja pelayanan, pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang lebih baik	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana transportasi	%	0.00	10	20	20	20	20	90	DINAS PERHUBUNGAN
			Meningkatnya Pelayanan kelistrikan dan energi terbarukan yang optimal	Rasio elektrifikasi	%	95.2	97	98	99	100	100	100	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Meningkatnya Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Memadai	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Nilai	0.00	2.6	3	3.6	3.9	4	4	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			Meningkatnya Kebijakan Infrastruktur Daerah	Persentase Rumusan Kebijakan Infrastruktur Daerah (Total 40 Kebijakan)	%	0.00	14.29	28.57	57.14	76.19	100.00	100.00	BIRO BINA INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM
3.	Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas	Terwujudnya Akses, Kualitas Pendidikan dan Sosial Menuju Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlakul Karimah dan Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	%	70.96	71,77	72,20	72,75	73,21	73,68	73,68	SERETARIS DAERAH	
			Index Gini / Menurunnya Ketimpangan Pendapatan	%	0,390	0,390	0,390	0,370	0,365	0,360	0,360		
			Kemiskinan	%	5.42	5,13	5,00	5,12	5,06	5,00	5,00		

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	NDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB
						2017	2018	2019	2020	2021	2022		
				Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8.92	8,45	8,20	8,19	8,03	7,84	7,84	
			Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Menengah dan Khusus	Harapan lama sekolah	Tahun	12.7	13	13.5	14	14.5	15	15	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
				Rata rata lama sekolah	Tahun	8.37	8.47	8.7	8.9	9.1	9.3	9.3	
			Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Daya beli	%	0.00	0.00	100	100	100	100	100	
			Meningkatnya Ketersediaan Lapangan Kerja bagi Masyarakat	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	0.00	0.00	100	100	100	100	100	
			Meningkatnya Kelembagaan PUG (Pengarusutamaan Gender)	Indeks pembangunan gender (IPG)	Nilai	91.39	91.67	91.95	92.23	92.51	92.79	92.79	
			Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan Menengah dan Khusus	Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah	%	71.13	72.9	74.67	76.45	78.22	80	80	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah	%	57.21	58.77	60.33	61.88	63.44	65	65	
				Cakupan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	100	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	NDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB
						2017	2018	2019	2020	2021	2022		
			Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan	Persentase pelestarian dan inovasi nilai budaya daerah	%	0.00	100	100	100	100	100	100	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Terwujudnya pemuda wirausahawan baru dan Olah Raga yang berprestasi	Indeks Pembangunan Kepemudaan	Nilai	0.00	10	20	30	40	45	45	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
				Indeks Pembangunan Olahraga	Nilai	0.00	10	20	30	40	45	45	
			Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	68.74	69.54	70.34	71.14	71.94	72.74	72.74	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
			Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Pemenuhan Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak	%	0.00	0.00	0.00	72.73	77.27	100	100	
			Meningkatnya Budaya Literasi	Indek Minat Baca Masyarakat	Nilai	25.1	0.0	0.0	40	45	50	50	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH DINAS SOSIAL
			Menurunnya PMKS	Persentase Penanganan Jumlah PMKS	%	8.24	4.49	3.89	3.3	2.68	2.08	2.08	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	NDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB
						2017	2018	2019	2020	2021	2022		
			Meningkatnya Tenaga Kerja yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	%	58.06	59.01	60.01	5.69	5.72	5.74	5.74	DINAS KETENAGA KERJAAN DAN TRANSMIGRASI
4.	Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas	Terwujudnya peningkatan kualitas akses dan pemerataan pelayanan kesehatan		Angka Harapan Hidup	%	69.46	69.76	70.06	70.36	70.66	70.96	70.96	SEKRETARIS DAERAH
			Meningkatnya Pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 kelahiran hidup)	Jumlah	308	304	300	290	290	285	285	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
				Angka Kematian Bayi (Per 1000 kelahiran hidup)	Jumlah	32	31	30	29	28	26	26	
			Meningkatnya Pelayanan Kesehatan berkualitas dan Mudah di Akses	Penurunan Jumlah Kematian Ibu	Jumlah	247	247	242	237	232	227	227	DINAS KESEHATAN
				Penurunan Jumlah Kematian Bayi	Jumlah	1,149	1,149	1,144	1,139.	1,134	1,129	1,129	
			Meningkatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Tenaga Kesehatan	Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan	%	75	90	100	100	100	100	100	DINAS KESEHATAN
			Meningkatnya Pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal	BOR (Bed Occupancy Ratio). RSUD Banten	%	0	60	65	70	75	80	80	DINAS KESEHATAN / RSUD

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	NDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB
						2017	2018	2019	2020	2021	2022		
				BOR (Bed Occupancy Ratio).RSUD Malingping	%	0	60	65	65	70	75	75	
			Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Angka Kelahiran Total (TFR)	%	2.4	0.00	0.00	2.21	2.23	2.26	2.26	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA SEKRETARIS DAERAH
5.	Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	Meningkatnya Perekonomian Secara Berkelanjutan Berbasis Potensi Ekonomi Lokal		Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5.26	6	6.2	6.4	6.7	7	7	
				Tingkat Inflasi	%	2.94	3.7	4.2	4	4	4	4	
			Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	%	0.00	0.00	0.00	6	6.2	6.4	6.4	ASISTEN PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN
			Meningkatnya Layanan Keuangan Pada Masyarakat	Indeks Keuangan Inklusif	Nilai	0.00	0.00	0.00	2.8	2.9	3	3	
			Meningkatnya Daya Saing Daerah	Peringkat Daya Saing Provinsi dibandingkan Provinsi Lain di Indonesia	Nilai	0.00	0.00	0.00	7	6	5	5	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	NDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB
						2017	2018	2019	2020	2021	2022		
			Terwujudnya Pembangunan Rendah Karbon	Emisi Rumah Kaca	%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	100	
			Meningkatnya Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Kemudahan Berusaha	Jumlah Realisasi Investasi (PMA + PMDN)	Triliyun	0.00	0.00	0.00	49.00	51.30	53.90	53.90	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
				Indeks Kepuasan Pelayanan Investor	%	82.16	85.09	85.22	85.47	85.72	85.97	85.97	
			Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perindustrian yang optimal	LPE Sektor Perindustrian	%	3.05	3.7	3.95	4.2	4.45	4.7	4.7	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan yang optimal dan Inflasi yang terkendali	LPE Sektor Perdagangan	%	3.82	4.9	5.4	5.9	6.4	6.9	6.9	
				Tingkat Inflasi Bahan Pokok	%	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	
			Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian yang optimal	Pertumbuhan Sektor Pertanian yang optimal	%	7,05	0	0	5,8	6	6,2	6.2	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	NDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB
						2017	2018	2019	2020	2021	2022		
			Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perikanan yang optimal	Laju Pertumbuhan Sektor Perikanan	%	4,48	0.00	0.00	4,72	4,80	4,93	4,93	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah yang terjaga	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	%	82.4	89.2	90.6	83.5	84.5	85.00	85.00	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata yang optimal	Persentase peningkatan nilai PDRB sektor Pariwisata	%	2.84	0.00	0.00	2.99	3.04	3.09	3.09	DINAS PARIWISATA
			Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Peningkatan Kualitas Koperasi	%	NA	0.00	0.00	6	6	6	18	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Meningkatnya Usaha Kecil menjadi usaha menengah	Persentase Peningkatan Omset Usaha Kecil	%	NA	0.00	0.00	1	1	1	3	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Meningkatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	43.67	44.17	44.67	50.87	51.83	52.79	52.79	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			Meningkatnya Pengelolaan dan konservasi hutan yang optimal	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	%	30.6	31.21	31.71	32.21	32.71	33.21	33.21	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
			Meningkatnya Kebijakan Perekonomian Daerah dan Pembinaan Pengendalian Bidang Perekonomian	Capaian Kebijakan Perekonomian Daerah	%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	100	BIRO PEREKONOMIAN

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	NDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB
						2017	2018	2019	2020	2021	2022		
			Meningkatnya Pengendalian, Geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara yang efektif	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB	%	0.79	0.00	0.00	0.65	0.63	0.60	0.60	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	Persentase pekerja Penuh Waktu	%	0.00	0.00	0.00	43.75	45	46.29	46.29	DINAS KETENAGA KERJAAN DAN TRANSMIGRASI



## 2.2. Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Provnsi Banten Tahun 2017-2022

Arah kebijakan merupakan rumusan yang merasionalisasi pilihan strategi agar lebih terarah mencapai tujuan sasaran dalam waktu 5 tahun, memiliki fokus berdasarkan identifikasi permasalahan dan isu strategis, mengarahkan target kinerja yang akan dicapai pada tingkatan strukur yang diperlukan untuk dapat menguatkan penyelesaian masalah sesuai dengan target indikator kinerja outcome.

Sebagaimana tabel 2.2 Uraian Tujuan, Sasaran, dan Strategi dan Arah Kebijakan.

Tabel 2.2.

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Provinsi Banten 2017 – 2022

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<b>Visi : Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera Dan Berakhlaqul Karimah</b>			
<b>Misi 1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)</b>			
1.1 Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlaqul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat	1.1.1 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	1.01 Meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan setiap perangkat daerah yang melayani langsung kepada masyarakat	1.01 Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan
	1.1.2 Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik Badan Penghubung	1.02 Meningkatkan Koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan	1.02 Peningkatan Koordinasi, mediasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan
	1.1.3 Terwujudnya peran DPRD sesuai dengan fungsinya	1.03 Meningkatkan Fasilitasi Tugas dan Fungsi Anggota DPRD	1.03 Perwujudan Pelayanan Prima Untuk Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
	1.1.4 Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel	1.04 Meningkatkan Kualitas Tata kelola Pemerintahan	1.04 Peningkatan Kualitas Penatausahaan Keuangan dan aset daerah sesuai ketentuan peraturan
	1.1.5 Meningkatnya Kualitas SPIP	1.05 Meningkatkan Fungsi Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan	1.05 Peningkatan Peran APIP dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	1.1.6 Meningkatkan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah yang berkualitas	1.06 Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah	1.06 Peningkatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dan teknologi informasi
	1.1.7 Meningkatkan Penelitian dan pengembangan yang berkualitas	1.07 Meningkatkan kualitas Penelitian	1.07 Peningkatan Kualitas Hasil Penelitian Untuk Menjawab Permasalahan Pembangunan
	1.1.8 Terwujudnya Kompetensi Aparatur	1.08 Meningkatkan kompetensi aparatur	1.08 Peningkatan Kualitas Sarana, Prasarana dan Sumber daya manusia serta standarisasi dan sertifikasi kompetensi Aparatur
	1.1.9 Terwujudnya Profesionalisme aparatur	1.09 Meningkatkan Profesionalisme Aparatur	1.09 Peningkatan Pengelolaan Sumber daya Aparatur
			1.10 Peningkatan Disiplin dan Kesejahteraan Aparatur
	1.1.10 Meningkatkan Pendapatan Daerah yang Optimal	1.10 Meningkatkan Pelayanan Pendapatan Daerah	1.11 Peningkatan Tata Kelola Pelayanan pendapatan Daerah dan melalui Pemanfaatan teknologi Informasi
	1.1.11 Meningkatkan Ketentraman dan ketertiban umum daerah yang aman dan kondusif	1.11 Meningkatkan Penegakan Peraturan Daerah Serta ketentraman dan ketertiban umum daerah	1.12 Penegakan Peraturan daerah yang mendukung pelayanan publik dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum daerah untuk pemenuhan cakupan SPM
	1.1.12 Meningkatkan Wawasan Kebangsaan, Keamanan dan Stabilitas Daerah yang	1.12 Meningkatkan Wawasan Kebangsaan	1.13 Peningkatan Wawasan Kebangsaan pada Peran

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	kondusif untuk mendukung NKRI		Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan
		1.13 Meningkatkan keamanan dan stabilitas daerah	1.14 Peningkatan Peran Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan dalam menjaga keamanan dan stabilitas daerah
	1.1.13 Meningkatnya Penanggulangan Kebencanaan yang efektif	1.14 Meningkatkan Mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana	1.15 Peningkatan mitigasi, penanggulangan bencana dan menurunkan titik terdampak bencana melalui sistem informasi kebencanaan
	1.1.14 Meningkatnya Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel	1.15 Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan	1.16 Peningkatan Administrasi Kependudukan melalui Optimalisasi Sistem Informasi Kependudukan
	1.1.15 Meningkatnya Kerjasama dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan	1.16 Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	1.17 Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
	1.1.16 Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah	1.17 Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk hukum daerah	1.18 Peningkatan kualitas dan kuantitas kebijakan peraturan perundangan daerah dan Layanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat
	1.1.17 Meningkatnya Tatalaksana Organisasi Daerah Yang Efektif	1.18 Meningkatkan Kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah	1.19 Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah melalui Akuntabilitas dan Tata Kelola Organisasi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	1.1.18 Meningkatkan Pelayanan Umum yang Prima	1.19 Meningkatkan kualitas pelayanan sekretariat daerah	1.20 Optimalisasi Pelayanan Sekretariat Daerah melalui Perwujudan Pelayanan Prima
	1.1.19 Meningkatkan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	1.20 Meningkatkan kualitas kebijakan kesejahteraan masyarakat	1.21 Peningkatan kualitas kebijakan bidang kesejahteraan rakyat
	1.1.20 Meningkatkan Pelayanan dan fasilitasi Pimpinan	1.21 Meningkatkan kualitas pelayanan pimpinan	1.22 Peningkatan kualitas pelayanan pimpinan
	1.1.21 Meningkatkan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Ekonomi Desa dan Pemerintahan Desa/Kelurahan	1.22 Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan, Ekonomi dan Pemerintahan Desa/Kelurahan	1.23 Penataan serta Pembinaan Kelembagaan dan kerjasama desa/Kelurahan
	1.1.22 Meningkatkan Pelayanan Pemerintahan Yang Berbasis Teknologi dan keterbukan Informasi	1.23 Meningkatkan Aksesibilitas serta kapasitas Telekomunikasi, informasi dan teknologi informatika	1.24 Peningkatan Pelayanan dan keamanan informasi berbasis teknologi
	1.1.23 Meningkatkan Administrasi Pembangunan Daerah	1.24 Meningkatkan kinerja Administrasi Pembangunan	1.25 Peningkatan kualitas kebijakan bidang administrasi pembangunan
	1.1.24 Meningkatkan Pengelolaan arsip pemerintah daerah yang berkualitas	1.25 Meningkatkan pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi, dan handal	1.26 Peningkatan pengelolaan arsip pemerintah daerah secara profesional yang didukung dengan teknologi Informasi
	1.1.25 Meningkatkan Ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan secara elektronik	1.26 Meningkatkan Akurasi data dan Informasi	1.27 meningkatkan data dan informasi perencanaan pembangunan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	1.1.26 Meningkatkan ketersediaan data dan Statistik Sektoral yang dikelola secara elektronik	1.27 Meningkatkan Akurasi Data dan Statistik Sektoral Secara Elektronik	1.28 Peningkatan Validitas Data dan Statistik Sektoral
<b>Misi 2 : Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur</b>			
2.1 Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas dalam mendukung kelancaran arus barang, orang dan jasa yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah dan perekonomian daerah	2.1.1 Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Daerah	2.01 Meningkatkan ketersediaan Infrastruktur Daerah	2.01 Peningkatan ketersediaan Infrastruktur untuk menunjang Perkonomian Daerah
	2.1.2 Meningkatnya Infrastruktur jalan dan jembatan yang handal	2.02 Meningkatkan Kualitas infrastruktur Jalan dan Jembatan	2.02 Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur Jalan dan Jembatan yang mendukung kawasan strategis, potensi Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kawasan Agrobisnis
		2.03 Meningkatkan Profesionalisma Badan Usaha Jasa Konstruksi	2.03 Peningkatan SumberDaya Badan Usaha Jasa Konstruksi
	2.1.3 Meningkatnya sarana dan prasarana jaringan sumberdaya air	2.04 Meningkatkan Sarana dan Prasarana pengendali Banjir	2.04 Peningkatan Sarana dan Prasarana pengendali Banjir
		2.05 Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Tampungan dan Penyediaan Air Baku	2.05 Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Tampungan dan Penyediaan Air Baku

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		2.06 Meningkatkan Sarana dan Prasarana jaringan irigasi	2.06 Pembangunan Bendung, empang dan situ
			2.07 Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan jaringan Irigasi
	2.1.4 Meningkatnya Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	2.07 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Penataan Ruang dan Pemanfaatan Ruang	2.08 Peningkatan kualitas Penataan dan Pemanfaatan Ruang melalui Penguatan Regulasi
	2.1.5 Meningkatnya Perumahan dan Pemukiman yang layak, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi lingkungan, serta Pengelolaan Sampah regional	2.08 Meningkatkan penataan dan penatagunaan kawasan perumahan dan permukiman	2.09 penataan Kawasan Permukiman, Infrastruktur Permukiman kumuh
		2.09 Meningkatkan Sistem Tata Air Terpadu	2.10 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Regional
		2.10 Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan yang sehat	2.11 Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan yang sehat
		2.11 Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana persampahan	2.12 Pembangunan TPST Regional
	2.1.6 Meningkatnya Sarana dan prasarana bangunan pada kawasan Strategis Provinsi yang berkualitas	2.12 Meningkatkan pembangunan dan pengelolaan gedung, sarana dan prasarana Kawasan strategis provinsi	2.13 Pembangunan dan Peningkatan pengelolaan gedung, sarana dan prasarana Kawasan strategis Provinsi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	2.1.7 Meningkatkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas	2.13 meningkatkan manajemen rekayasa lalu lintas	2.14 Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi
		2.14 Meningkatkan sarana dan prasarana kelengkapan jalan	2.15 Pembangunan sarana dan Prasarana kelengkapan Jalan
		2.15 Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi	2.16 Pembangunan Sarana dan prasarana transportasi
	2.1.8 Meningkatkan Kinerja pelayanan, pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang lebih baik	2.16 Meningkatkan Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi	2.17 Peningkatan Kinerja Pelayanan melalui Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana transportasi
	2.1.9 Meningkatkan Pelayanan kelistrikan dan energi terbarukan yang optimal	2.17 Meningkatkan sarana prasarana kelistrikan dan EBT	2.18 Penyediaan peraturan, dokumen teknis, pengawasan dan pengendalian jaringan bidang ketenagalistrikan
	2.1.10 Meningkatkan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Memadai	2.18 Meningkatkan penyelenggaraan dan pelayanan aksesibilitas serta kapasitas Telekomunikasi, informasi dan teknologi informatika	2.19 Peningkatan sarana prasarana teknologi informasi
	2.1.11 Meningkatkan Kebijakan Infrastruktur Daerah	2.19 Meningkatkan kualitas kebijakan Infrastruktur bagi masyarakat	2.20 Peningkatan kualitas kebijakan infrastruktur bagi masyarakat
<b>Misi 3 : Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas</b>			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
3.1 Terwujudnya Akses dan Kualitas Pendidikan dan Sosial Menuju Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlakul Karimah dan Berdaya Saing	3.1.1 Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Menengah dan Khusus	3.01 Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan Menengah dan Khusus	3.01 Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Menengah dan Khusus
	3.1.2 Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	3.02 Mengembangkan jiwa kewirausahaan	3.02 Menciptakan dan mengembangkan wirausaha
	3.1.3 Meningkatnya Ketersediaan Lapangan Kerja bagi Masyarakat	3.03 Meningkatkan Kualitas Angkatan Kerja	3.03 Peningkatan Kompetensi Angkatan Kerja
	3.1.4 Meningkatnya Kelembagaan PUG (Pengarusutamaan Gender)	3.04 Pengarusutamaan gender dalam Setiap Proses Pembangunan	3.04 Peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan
	3.1.5 Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan Menengah dan Khusus	3.05 Meningkatkan Akses dan Kualitas serta Inklusivitas Pendidikan Yang Merata dan Terjangkau	3.05 Peningkatan Kualitas dan Inklusivitas Pendidikan yang Berdaya Saing
			3.06 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah
	3.1.6 Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan	3.07 Meningkatkan perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan kebudayaan	3.07 Revitalisasi museum, dan peningkatan budaya banten
	3.1.7 Terwujudnya pemuda wirausahawan baru dan Olah Raga yang berprestasi	3.08 Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan berbasis komunitas	3.08 Peningkatan kelembagaan karang taruna dan/atau organisasi lain yang berafiliasi dengan kepemudaan
		3.09 Meningkatkan prestasi olahraga di berbagai event	3.09 Peningkatan sarana dan prasarana olahraga

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	3.1.8 Meningkatnya Pengarustamaan Gender	3.10 Meningkatkan pengarusutamaan gender pada semua sektor	3.10 Peningkatan peran perempuan yang dapat meningkatkan partisipasi pendidikan, kualitas kesehatan serta peningkatan perekonomian keluarga
	3.1.9 Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	3.11 Meningkatkan Peran Masyarakat dalam Penurunan Angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	3.11 Penurunan angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
	3.1.10 Meningkatnya Budaya Literasi	3.12 Peningkatan Minat Baca Masyarakat melalui Optimalisasi penerapan teknologi informasi dan Perpustakaan Daerah	3.12 Peningkatan Minat Baca Masyarakat melalui Optimalisasi penerapan teknologi informasi dan Perpustakaan Daerah
	3.1.11 Menurunnya PMKS	3.13 meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan PMKS	3.13 Peningkatan pemberdayaan Sosial, Penanganan Fakir Miskin, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan jaminan sosial, serta Penanganan Kelembagaan perawatan dan pengasuhan
	3.1.12 Meningkatnya Tenaga Kerja yang Berkualitas	3.14 Meningkatkan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	3.14 Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja melalui Pelatihan dan Pemagangan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			3.15 Peningkatan Kualitas Kelembagaan Balai Latihan Kerja
<b>Misi 4 : Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas</b>			
4.1 Terwujudnya peningkatan kualitas akses dan pemerataan pelayanan kesehatan	4.1.1 Meningkatnya Pelayanan kesehatan	4.01 Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan yang berkualitas	4.01 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
	4.1.2 Meningkatnya Pelayanan Kesehatan berkualitas dan Mudah di Akses	4.02 Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat	4.02 Peningkatan Akses dan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat
			4.03 Peningkatan Sarana Prasaran Kesehatan
			4.04 Peningkatan Pencegahan dan pengendalian penyakit
	4.1.3 Meningkatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Tenaga Kesehatan	4.03 Meningkatkan akses dan kualitas Upaya Kesehatan Masyarakat	4.05 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Peningkatan kesehatan masyarakat, Pencegahan dan pengendalian penyakit
	4.1.4 Meningkatnya Pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal	4.04 Meningkatkan akses dan kualitas Upaya Kesehatan Perorangan	4.06 Peningkatkan Kelas Pelayanan Rumah Sakit
	4.1.5 Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	4.05 Meningkatkan Pengendalian Penduduk	4.07 Peningkatan Kerjasama dengan Kabupaten Kota untuk pengendalian pertumbuhan penduduk
<b>Misi 5 : Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi</b>			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
5.1 <b>Meningkatnya Perekonomian Secara Berkelanjutan Berbasis Potensi Ekonomi Lokal</b>	5.1.1 Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	5.01 Mewujudkan Iklim Usaha yang Kondusif bagi Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	5.01 Perwujudan Iklim Usaha yang Kondusif untuk Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Unggulan
	5.1.2 Meningkatkan Layanan Keuangan Pada Masyarakat	5.02 Meningkatkan Aksesibilitas dan Pemanfaatan Layanan Keuangan	5.02 Peningkatan Aksesibilitas dan pemanfaatn Layanan Keuangan kepada Masyarakat
	5.1.3 Meningkatkan Daya Saing Daerah	5.03 Mewujudkan Keunggulan Kompetitif berbasis Potensi Daerah	5.03 Peningkatan Keunggulan Kompetitif melalui Optimalisasi Potensi Daerah
	5.1.4 Terwujudnya Pembangunan Rendah Karbon	5.04 Mewujudkann Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan	5.04 Perwujudan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Ramah Lingkungan
	5.1.5 Meningkatkan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Kemudahan Berusaha	5.05 Meningkatkan iklim investasi, dan Meningkatkan promosi Potensi investasi	5.05 Peningkatan investasi dalam negeri (PMDN), dan PMA dengan mendorong kemitraan PMA dan PMDN, serta kebijakan pemanfaatan bahan baku
		5.06 Meningkatkan pelayanan melalui kemudahan perizinan, serta meningkatkan kepuasan masyarakat	5.06 Peningkatan pelayanan perizinan melalui peningkatan infrastruktur pelayanan perizinan, kepastian prosedur dan jenis layanan, serta kapasitas SDM pelayanan
	5.1.6 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perindustrian yang optimal	5.07 Mengembangkan Sektor Industri	5.07 Pengembangan perwilayahan Industri dan Konektifitas antara

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			industri kecil, menengah dan besar
			5.08 Pengembangan Sumber Daya Industri
			5.09 Pengembangan kualitas produk industri
	5.1.7 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan yang optimal dan Inflasi yang terkendali	5.08 Meningkatkan Stabilitas Harga Komoditas penting dan strategis	5.10 Peningkatkan Efisiensi Sistem dan Distribusi Logistik melalui Pembangunan Pusat Distribusi Provinsi dan sistem informasi komoditas penting dan strategis
			5.11 Peningkatan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan pengawasan barang/jasa yang beredar
		5.09 Memperluas pangsa pasar Ekspor dan luar Daerah	5.12 Pemanfaatan peran Perwakilan perdagangan di luar negeri dan luar daerah dalam meningkatkan akses pasar komoditas unggulan Provinsi Banten
		5.10 Meningkatkan daya saing Produk berbasis keunggulan lokal	5.13 Peningkatan Standarisasi, Mutu Produk, kelembagaan dan Regulasi Pro Konsumen
	5.1.8 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian yang optimal	5.11 Meningkatkan intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi,	5.14 Peningkatan produksi dan produktifitas pertanian, untuk memenuhi kebutuhan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		mekanisasi, dan rehabilitasi bidang pertanian	konsumsi dan bahan baku industri (agroindustri)
	5.1.9 Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perikanan yang optimal	5.12 Meningkatkan produksi, Nilai Tambah daya saing Produk Kelautan dan perikanan	5.15 Peningkatan pembangunan kelautan dan perikanan melalui pengelolaan Sumber Daya Kelautan Perikanan (SDKP) yang bertanggung jawab, berdaya saing dan berkelanjutan
	5.1.10 Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah yang terjaga	5.13 Meningkatkan Ketersediaan, Optimalisasi Sumber Daya Lokal, dan Perlindungan Pangan Daerah	5.16 Peningkatan Ketahanan Pangan untuk Menjamin Ketersediaan dan Keamanan Pangan Daerah
	5.1.11 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata yang optimal	5.14 Meningkatkan Industri dan Jasa Bidang Pariwisata serta Ekonomi Kreatif	5.17 Peningkatan Penataan dan Pengembangan destinasi wisata
			5.18 Peningkatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
			5.19 Peningkatan Pengembangan pangsa pasar, kelembagaan dan kemitraan pariwisata
			5.20 Peningkatan pengembangan bidang usaha dan industri kreatif pariwisata
	5.1.12 Meningkatnya Kualitas Koperasi	5.15 meningkatkan pengawasan, pemberdayaan,	5.21 Peningkatan kelembagaan koperasi melalui pembinaan dan kemudahan perizinan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		kelembagaan dan kemitraan koperasi serta optimalisasi teknologi informasi	
			5.22 Peningkatan Kemudahan Akses Pasar dan Modal Bagi Koperasi
	5.1.13 Meningkatnya Usaha Kecil menjadi usaha menengah	5.16 Meningkatkan Akses permodalan dan layanan kredit, pendampingan dan pengembangan usaha serta mendorong terwujudnya kemudahan kepastian dan perlindungan usaha	5.23 Peningkatan Kemudahan Akses Pasar dan Modal Bagi UMKM
	5.1.14 Meningkatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas	5.17 Meningkatkan pengendalian pengawasan lingkungan hidup	5.24 Peningkatan kualitas air dan udara melalui pengelolaan sampah dan limbah
	5.1.15 Meningkatnya Pengelolaan dan konservasi hutan yang optimal	5.18 Meningkatkan Konservasi Daerah Aliran Sungai	5.25 Peningkatan Konservasi Hutan dan Daerah Aliran Sungai
		5.19 Meningkatkan Fungsi Hutan dan Kawasan Lindung	5.26 Peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung serta kesadaran masyarakat peduli hutan
	5.1.16 Meningkatnya Kebijakan Perekonomian Daerah dan Pembinaan Pengendalian Bidang Perekonomian	5.20 Meningkatkan akses perekonomian masyarakat	5.27 Peningkatan kualitas kebijakan yang berpihak kepada peningkatan perekonomian masyarakat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	5.1.17 Meningkatnya Pengendalian, Geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara yang efektif	5.21 Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara	5.28 Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara
	5.1.18 Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	5.22 meningkatkan Perlindungan dan pengawasan tenaga kerja	5.29 Peningkatan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja, termasuk norma kerja, serta norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, dan menciptakan hubungan industrial yang kondusif
		5.23 meningkatkan jaminan ketenagakerjaan	5.30 memperluas Cakupan BPJS ketenagakerjaan pada Pekerja sektor formal dan informal



### 2.3. Program Pembangunan Daerah

Penganggaran untuk melaksanakan urusan dan kewenangan pemerintah Provinsi Banten diformulasikan melalui belanja langsung dalam bentuk program kegiatan pada Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah provinsi Banten, selanjutnya program unggulan yang menjadi urusan dan kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota, pola penganggarannya diformulasikan melalui bantuan keuangan khusus (specific grand) yang meliputi :

1. Bidang Pendidikan, ditujukan untuk peningkatan akses, mutu dan tata kelola.
2. Bidang Kesehatan, ditujukan untuk peningkatan akses, mutu dan tata kelola.
3. Bidang Infrastruktur, ditujukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan konektivitas antar wilayah

Penetapan program pembangunan dan penanganan urusan pembangunan selanjutnya diselaraskan dengan misi pembangunan daerah dengan rincian sebagai berikut :

1. Menciptakan Tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance)

Program untuk mendukung misi ini adalah :

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	<b>Tujuan : Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat</b>	
1.1	<b>Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien</b>	<b>ASISTEN PEMERINTAHAN DAN SELURUH OPD</b>
	Program Tata Kelola Pemerintahan Seluruh OPD	Seluruh OPD
1.2	<b>Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel</b>	<b>BPKAD</b>
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
	Program Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Daerah	
	Program Penatausahaan Aset Daerah	
1.3	<b>Meningkatnya Kualitas SPIP</b>	<b>INSPEKTORAT</b>
	Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	INSPEKTORAT

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1.4	<b>Meningkatnya Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah yang berkualitas</b>	BAPPEDA
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	
1.5	<b>Meningkatnya Penelitian dan pengembangan yang berkualitas</b>	BAPPEDA
	Program Penelitian dan Pengembangan	
1.6	<b>Meningkatnya Ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan secara elektronik</b>	Bappeda
	Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah	
1.7	<b>Terwujudnya Kompetensi Aparatur</b>	BPSDM
	Program Pengembangan SDM Aparatur Kompetensi Teknis dan Fungsional	
	Program Pengembangan SDM Aparatur Kompetensi Manajerial dan Pemerintahan	
1.8	<b>Terwujudnya Profesionalisme aparatur</b>	BKD
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
1.9	<b>Meningkatnya Pendapatan Daerah yang Optimal</b>	Bapenda
	Proram Peningkatan Pajak Daerah	
	Proram Peningkatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain	
1.10	<b>Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum daerah yang aman dan kondusif</b>	Satpol PP
	Program Ketentraman dan Ketertiban Umum	
1.11	<b>Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Keamanan dan Stabilitas Daerah yang kondusif untuk mendukung NKRI</b>	Badan Kesbangpol
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional	
1.12	<b>Meningkatnya Penanggulangan Kebencanaan yang efektif</b>	BPBD
	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	
1.13	<b>Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan Yang Berbasis Teknologi dan keterbukan Informasi</b>	Diskominfo
	Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik	

## 2. Membangun dan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur

Program untuk mendukung misi ini adalah :

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
2	Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas dalam mendukung kelancaran arus barang, orang dan jasa yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah dan perekonomian daerah	SEKRETARIS DAERAH
2.1	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Daerah	Asisten Ekonomi dan Pembangunan
2.2	Meningkatnya Infrastruktur jalan dan jembatan yang handal	DPUPR
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	
2.3	Meningkatnya sarana dan prasarana jaringan sumberdaya air	DPUPR
	Program Pembangunan Sumberdaya Air	
2.4	Meningkatnya Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	DPUPR
	Program Penataan Ruang	
2.5	Meningkatnya Perumahan dan Pemukiman yang layak, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi lingkungan, serta Pengelolaan Sampah regional	DPRKP
	Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan	
	Program Keciaptakaryaan	
2.6	Meningkatnya Sarana dan prasarana bangunan pada kawasan Strategis Provinsi yang berkualitas	DPRKP
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	
2.7	Meningkatnya Kinerja pelayanan, pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang lebih baik	DINAS PERHUBUNGAN
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan	
2.8	Meningkatnya keselamatan dan kelancaran lalulintas	DINAS PERHUBUNGAN
	Program Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Perhubungan	
2.9	Meningkatnya Pelayanan kelistrikan dan energi terbarukan yang optimal	DINAS ESDM
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan	
2.10	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Memadai	DINAS KOMINFO
	Program Pengembangan, Pendayagunaan, Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	DINAS KOMINFO

3. Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan Berkualitas

Program untuk mendukung misi ini adalah :

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
3	Terwujudnya Akses dan Kualitas Pendidikan dan Sosial Menuju Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlakul Karimah dan Berdaya Saing	SERETARIS DAERAH
3.1	Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Menengah dan Khusus	Asisten Kesejahteraan Rakyat
3.2	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	
3.3	Meningkatnya Ketersediaan Lapangan Kerja bagi Masyarakat	
3.4	Meningkatnya Kelembagaan PUG (Pengarusutamaan Gender)	
3.5	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan Menengah dan Khusus	DINDIKBUD
	Program Pendidikan Menengah Atas	
	Program Pendidikan Menengah Kejuruan	
	Program Pendidikan Khusus	
3.6	Terwujudnya pemuda wirausahawan baru dan Olah Raga yang berprestasi	DISPORA
	Program Peningkatan Pemberdayaan Kepemudaan	
3.7	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	DP3AKB
	Program Pemberdayaan Perempuan	
3.8	Meningkatnya Budaya Literasi	DPAD
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	
3.9	Menurunnya PMKS	DINSOS
	Program Penangan Fakir Miskin	
3.10	Meningkatnya Tenaga Kerja yang Berkualitas	DISNAKERTRANS
	Program Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	

4. Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan Berkualitas

Program untuk mendukung misi ini adalah :

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
4	Terwujudnya peningkatan kualitas akses dan pemerataan pelayanan kesehatan	SEKRETARIS DAERAH
4.1	Meningkatnya Pelayanan kesehatan	Asisten Kesejahteraan Rakyat
4.2	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan berkualitas dan Mudah di Akses	DINKES
	Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat	
4.3	Meningkatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Tenaga Kesehatan	DINKES
	Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	
4.4	Meningkatnya Pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal	DINKES/ RSUD
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD Banten	
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD Malingping	

5. Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi

Program untuk mendukung misi ini adalah :

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
5	Meningkatnya Perekonomian Secara Berkelanjutan Berbasis Potensi Ekonomi Lokal	SEKRETARIS DAERAH
5.1	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Asisten Ekonomi dan Pembangunan
5.2	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	
5.3	Meningkatnya Daya Saing Daerah	
5.4	Terwujudnya Pembangunan Rendah Karbon	
5.5	Meningkatnya Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Kemudahan Berusaha	DINAS PMPTSP
	Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi	

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
5.6	<b>Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perindustrian yang optimal</b>	DINAS PERINDAG
	Program Peningkatan Daya Saing Industri	
5.7	<b>Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan yang optimal dan Inflasi yang terkendali</b>	DINAS PERINDAG
	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	
	Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	
5.8	<b>Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian yang optimal</b>	DINAS PERTANIAN
	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan	
	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan	
	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan	
5.9	<b>Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perikanan yang optimal</b>	DINA KELAUTAN DAN PEIKANAN
	Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	
5.10	<b>Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah yang terjaga</b>	DINAS KETAPANG
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	
5.11	<b>Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata yang optimal</b>	DINAS PARIWISATA
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	
5.12	<b>Meningkatnya Kualitas Koperasi</b>	DISKOP UKM
	Program Pengembangan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	
5.13	<b>Meningkatnya Usaha Kecil menjadi usaha menengah</b>	DISKOP UKM
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil	
5.14	<b>Meningkatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas</b>	DINAS LHK
	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	
5.15	<b>Meningkatnya Pengelolaan dan konservasi hutan yang optimal</b>	DINAS LHK
	Program Pengelolaan dan Konservasi Hutan	
5.16	<b>Meningkatnya Pengendalian, Geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara yang efektif</b>	DINAS ESDM
	Program pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Geologi dan Air Tanah	

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara	
<b>5.17</b>	<b>Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja</b>	<b>DISNAKERTRAN</b>
	Program Peningkatan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	

### BAB III

#### EVALUASI IMPLEMENTASI RPJMD PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022

#### 3.1. Evaluasi Capaian Indikator Makro dan Indikator Kinerja Utama

##### 3.1.1. Evaluasi Capaian Indikator Makro

Indikator Makro dalam RPJMD Provinsi Banten menggambarkan kemajuan pembangunan daerah dalam jangka menengah. Indikator makro pembangunan yang dimaksud meliputi Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Gini dan Inflasi. Indikator tersebut merupakan indikator yang bersifat dampak (Impact) dari pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat lokal, regional dan nasional sehingga diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota serta pelaku pembangunan lainnya.

Tabel.3.1

Capaian dan Target Indikator Makro Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2017-2022

NO	URAIAN INDIKATOR MAKRO	SATUAN	CAPAIAN 2016	TARGET DAN CAPAIAN RPJMD										
				2017		2018		2019		2020		2021		Target akhir 2022
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T
1	LPE	Persen	5.26	5.70	5.71	6.00	5.81	6.20	5.53	5.80	-3.38	5.95	4.44	6.10
2	Inflasi	Persen	2.94	4.00	3.98	3.7	3.42	4.20	3.30	3.70	1.43	3.70	1.91	3.70
3	Pengangguran	Persen	8.92	8.69	9.28	8.45	8.52	8.20	8.11	8.19	10.64	8.03	8.98	7.84
4	Kemiskinan	Persen	5.42	5.25	5.59	5.13	5.25	5.00	9.22	5.12	6.66	5.06	6.50	5.00
5	IPM	Poin	70.96	71.35	71.42	71.77	71.95	72.20	72.44	72.75	72.45	73.21	72.72	73.68
6	Indeks Gini	Poin	0.39	0.400	0.390	0.390	0.367	0.390	0.361	0.370	0.365	0.365	0.363	0.360

Sumber: Rilis BPS

Melihat hasil dari capaian indikator makro tahun 2021 yang tertera pada table 3.1, dari enam indikator 2 tercapai yaitu indeks gini dan inflasi, namun jika kita mengacu pada dokumen RKPD Perubahan 2021 Provinsi Banten dengan mempertimbangkan dampak covid maka target makro dan realisasinya mencapai seluruhnya. Adapun masing-masing indikator makro diuraikan sebagai berikut:

1. Laju pertumbuhan ekonomi Tahun 2021 mencapai 4,44 menunjukkan kenaikan dibanding tahun 2020 sebesar -3,39. Hal ini menunjukan pemulihan ekonomi yang signifikan terkait adanya dampak Covid19. Dari sisi produksi Lapangan usaha yang tumbuh sangat tinggi, antara lain Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 12,76 persen, lapangan usaha Konstruksi sebesar 10,81 persen, dan lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial mencapai 9,95 persen. Kenaikan LPE ini dibandingkan tahun 2020 adalah karena beberapa lapangan usaha yang memiliki kontribusi atau share besar terhadap perekonomian Banten, yang pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan di antaranya lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 4,93 persen, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 1,84 persen, lapangan usaha Real Estat sebesar 3,00 persen, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 5,61 persen, serta lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 0,56 persen.
2. Inflasi di Provinsi Banten dipantau di 3 Kota Besar yaitu Kota Cilegon, Kota Tangerang dan Kota Serang. Berdasarkan Rilis BPS inflasi tahun 2020 sebesar 1.43% dan di 2021 tidak berbeda jauh berada diangka 1.42%, dibandingkan sebelum Pandemi Covid nilai inflasi banten selalu diatas 3%. Jika kita analisa lebih jauh sebenarnya inflasi menunjukkan adanya permintaan konsumen terhadap barang yang diproduksi, sehingga dengan pandemi ini banyak masyarakat menahan uang dan menahan belanja barang dan jasa yang berhubungan dengan aktivitas luar ruangan dilihat dari kelompok yang mengalami deflasi seperti transportasi, rekreasi dan perumahan.
3. Dalam setahun terakhir, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Banten turun menjadi 8.98% persen pada Agustus 2021 dari 10.64% pada tahun sebelumnya. Keadaan ketenagakerjaan Provinsi Banten Agustus 2021 memperlihatkan jumlah angkatan kerja yang meningkat dari 6,21 juta orang pada Agustus 2020 menjadi 6,26 juta orang pada Agustus 2021. Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2021 terdiri dari 5,7 juta orang penduduk yang bekerja dan 562 ribu orang pengangguran. Jumlah penduduk bekerja meningkat dibandingkan periode Agustus 2020. Kondisi pengangguran di Banten terlihat semakin membaik dibanding pada masa-masa awal terjadinya pandemi Covid-19. Tingkat pengangguran mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya menjadi sebesar 8,98 persen, menempati peringkat ketiga tertinggi nasional setelah Kepulauan Riau dan Jawa Barat.
4. Tingkat kemiskinan atau persentase penduduk miskin di Banten pada Maret 2021 mencapai 6,66 persen, mengalami peningkatan dibandingkan periode Maret-September 2020. Bahkan, peningkatannya itu juga membuat angka kemiskinannya menjadi yang tertinggi di Banten sejak Maret 2012. Betapapun juga, angka kemiskinan Banten masih lebih rendah dari rata-rata

Nasional yang mencapai 9,78 persen. Dengan angka sebesar itu, Banten berada di posisi kesembilan sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah se Indonesia.

5. Kualitas hidup manusia di Provinsi Banten terus mengalami kemajuan, hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Banten. Pada Tahun 2021, IPM Provinsi Banten telah mencapai 72,72. Angka ini meningkat 0,27 poin dibandingkan dengan Tahun 2020 yang sebesar 72,45. Saat ini IPM Banten sudah di atas IPM Nasional yang sebesar 71,92. Walau demikian kondisi ini menunjukkan bahwa capaian IPM Tahun 2021 masih belum mencapai target RPJMD. Hal lain menunjukkan bahwa laju pertumbuhan IPM di Banten mengalami pelambatan. Hal ini diperlukan terobosan dan focus agar pertumbuhan IPM lebih baik dari tahun ke tahun.
6. Gambaran ketimpangan pendapatan di Banten diwakili oleh indikator indeks gini. Berdasarkan data 2021, indeks gini Banten mencapai 0,363. Nilai Gini Ratio mengalami penurunan dari sebelumnya 0,365 di tahun 2020. Untuk di tahun 2021 jika kita lihat peningkatan ketimpangan terjadi pada wilayah pedesaan yang sebelumnya 0,280 menjadi 0,278 dan penurunan ketimpangan terjadi di wilayah perkotaan dari 0,369 menjadi 0,365. Hal ini banyak dipengaruhi oleh kondisi Pandemi yang masih membayangi bahwa ekonomi masyarakat masih perlu perhatian serius.

### **3.1.2. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah**

Selain capaian indikator makro pembangunan Provinsi Banten, berikut ini juga disajikan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Banten Tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. IKU Pemerintah Daerah Provinsi Banten memuat indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran RPJMD sebagai tolok ukur penilaian kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten periode 2017-2022. IKU pemerintah daerah dicapai dengan dukungan pencapaian IKU perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU perangkat daerah yang secara langsung mendukung pencapaian IKU daerah memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebut secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan IKU perangkat daerah lainnya dalam pencapaian indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran dari setiap misi pembangunan jangka menengah Provinsi Banten. Terhadap capaian IKU Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2021, dari 23 (dua puluh tiga) IKU sebagai berikut:

1. 8 (delapan) indikator atau 34,7 persen yang mencapai dan/atau melampaui target,
2. 13 (tiga belas) indikator atau 56,5 persen yang belum mencapai target,
3. 1(satu) indikator atau 4,3 persen yang tidak dapat dihitung karena perbedaan antara target
4. 1 (satu) indikator atau 4,3 persen tidak ada rilis dalam 3 tahun terakhir Nilai indeks keuangan inklusif.

Indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang disebut juga dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu IKK tingkat dampak (impact) dan IKK tingkat hasil (outcome). IKK tingkat dampak (impact) memuat IKU pemerintah daerah maupun IKU perangkat daerah. IKK tingkat dampak (impact) merupakan

indikator kinerja tujuan dan sasaran RPJMD yang juga merupakan IKU pemerintah daerah, serta indikator kinerja tujuan dan sasaran seluruh Renstra Perangkat Daerah yang juga merupakan IKU perangkat daerah. Keberhasilan pembangunan Provinsi Banten tidak hanya diindikasikan oleh IKU pemerintah daerah, namun juga sangat ditentukan oleh pencapaian IKU perangkat daerah. IKU perangkat daerah merupakan indikator keberhasilan masing-masing perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya

Berdasarkan Tabel 3.2 misi pembangunan jangka menengah Provinsi Banten tahun 2017-2022 dilengkapi parameter yang menjadi ukuran pencapaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten. Pencapaian indikator pada **Misi pertama** ditunjukkan dengan ketercapaian Nilai IKM, Nilai Reformasi Birokrasi, dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Capaian nilai IKM tercatat sebesar 3,45 pada tahun 2021 angka tersebut menunjukkan bahwa IKM kita pada kategori Sangat Baik. Angka tersebut menunjukkan bahwa Kepuasan masyarakat pada pelayanan Provinsi Banten sudah sangat baik. Pada capaian SAKIP Perangkat Daerah ini masih menunjukkan nilai BB ditahun 2020 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dan upaya Perangkat daerah untuk terus meningkatkan nilai SAKIP yang dievaluasi secara internal oleh inspektorat. Capaian Nilai Reformasi Birokrasi banten sebesar 61 kategori B (baik) pada tahun 2020, menunjukkan tingkat capaian Reformasi Birokrasi yang mengalami kemajuan dibanding awal tahun 2018 yang saat itu masih pada kategori C, kedua komponen indikator ini memang diperlukan kerja keras oleh seluruh ASN karena Pemerintah Provinsi Banten menargetkan A (sangat baik) pada tahun 2022. Adapun rekomendasi dari Kemenpan RB terkait kedua indikator tersebut akan terus dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.

Pencapaian indikator pada **Misi II** ditunjukkan oleh ketercapaian kinerja infrastruktur daerah dan Persentase Pembangunan dan Penanganan Infrastruktur. Capaian kinerja infrastruktur daerah ini merupakan Realisasi kinerja infrastruktur pada tahun 2021 dibandingkan target tahunannya dimana realisasinya mencapai 90%. Kedua, Persentase Pembangunan dan Penanganan Infrastruktur. Capaian kinerja infrastruktur daerah realisasinya mencapai 100%, beberapa kendala ini dikarenakan tidak terealisasinya Sumber Pendanaan dari PT SMI yang rencana awalnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur daerah.

Pencapaian indikator pada **Misi Ketiga** ditunjukkan oleh ketercapaian 9 (sembilan) indikator kinerja daerah yakni indeks Pembangunan Manusia, indeks gini, Kemiskinan, Tingkat pengangguran Terbuka, Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Daya Beli dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. Kesatu capaian IPM tercatat sebesar 72,72 yang menunjukkan trend kenaikan setiap tahunnya. Kedua, Indeks gini yang mencapai 0,363 di tahun 2021 ini lebih baik dibanding tahun sebelumnya yaitu 0,365. Ketiga Angka Kemiskinan tercatat sebesar 6,5 menunjukkan trend kenaikan sebesar 0,6% dibanding tahun sebelumnya, kenaikan ini diakibatkan dari dampak pandemic covid yang sudah terjadi 2 tahun terakhir, sebenarnya angka kemiskinan di Provinsi banten pada tahun 2018 dan 2019 menunjukkan trend menurun, di tahun 2019 angka kemiskinan tercatat 5,09 hingga di tahun 2021 melonjak di

angka 6,5. Keempat, capaian Tingkat Pengangguran Terbuka pada September 2021 sebesar 8,98 menunjukkan perbaikan dari tahun sebelumnya yang mencapai 10,64, kondisi ini dimaknai selain memag TPT di Provinsi Banten menunjukkan masalah daerah yang paling krusial namun dampak covid 19 ikut mempengaruhi signifikan terkait naiknya angka pengangguran. Kelima, harapan lama sekolah (HLS) tercatat mencapai 13,02 tahun dari target yang ditetapkan sebesar 14,05 tahun pada tahun 2021. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa lamanya waktu sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh penduduk pada umur tertentu di masa mendatang terus menunjukkan peningkatan. Keenam, capaian RLS tercatat mencapai 8,93 tahun dari target yang ditetapkan sebesar 9,1 tahun pada tahun 2021. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa jumlah tahun dalam menjalani pendidikan formal terus meningkat dari tahun ke tahun, namun masih belum sesuai dengan target yang ditetapkan di tahun 2021. Ketujuh, capaian IPG tercatat sebesar 91,67 poin pada tahun 2020. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa komitmen untuk melaksanakan strategi pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan melalui Pengarusutamaan Gender (PUG) terus menunjukkan perkembangan yang positif. Kedelapan, daya beli menunjukkan kemampuan daya beli masyarakat masih cukup tinggi sebesar. Kesembilan, capaian TPAK tercatat sebesar 63,79 dimana menunjukkan partisipasi Angkatan kerja dibandingkan dengan Jumlah penduduk pada usia kerja.

Pencapaian indikator pada **Misi Keempat** ditopang oleh 3 (tiga) indikator yaitu berupa Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Ibu (Per 100,000 kelahiran hidup), Angka Kematian Bayi (Per 1000 kelahiran hidup). Kesatu capaian Angka Harapan Hidup tercatat 70,02 menurun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 70,06. Angka harapan hidup menggambarkan usia hidup rata-rata perkiraan banyak tahun yang ditempuh seseorang sejak lahir. Kedua, Angka Kematian Ibu (Per 100,000 kelahiran hidup), tercatat 82,04 menunjukkan kematian perempuan pada saat hamil atau melahirkan dalam kurun waktu 42 hari sejak melahirkan, jika dibandingkan dengan target RPJMD 290 maka sudah sangat melampaui target. Ketiga, Angka Kematian Bayi (Per 1000 kelahiran hidup) mencapai angka 4,8 dibandingkan target sebesar 28. Kondisi ini dimaknai banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama. Dibandingkan realisasi tahun sebelumnya 2,66 menunjukkan trend meningkat yang berarti semakin banyaknya kematian bayi pada tahun 2021.

Pencapaian indikator pada **Misi Kelima** ditunjukkan oleh (6 enam) indikator yaitu LPE, Inflasi, Laju pertumbuhan Ekonomi Sector Unggulan, Indeks Keuangan Inklusif, Peringkat Daya Saing Provinsi, Emisi Rumah Kaca. Kesatu capai Laju Pertumbuhan Ekonomi tercatat sebesar 4,44 di tahun 2021 dibanding target RPJMD sebesar 5,95 capaian ini masih belum melampaui target yang diharapkan. Kedua Laju pertumbuhan ekonomi sector unggulan tercatat 8,06, sector unggulan Provinsi Banten terdiri dari LPE sector Industri pengolahan, Perdagangan, Pertanian dan Pariwisata. Jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya tercatat -3,38 maka telah terjadi perbaikan signifikan dalam pertumbuhan LPE sector unggulan di Provinsi Banten. Ketiga, Indeks keuangan Inklusif tercatat 84,29 pada tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK) dan tidak ada rilis lanjutan setelahnya. Keempat, Peringkat daya saing tercatat berada di peringkat 5 besar,

dengan tahun sebelumnya di peringkat 6 besar, melihat hal tersebut menunjukkan semakin baiknya peringkat daya saing Provinsi Banten dimana tiap tahun telah mencapai target sesuai yang diharapkan. Keenam, emisi rumah kaca merupakan target yang ada setelah RPJMD Perubahan tercatat , Emisi Rumah kaca tahun 2021 tercatat sebesar 81,9.

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama 2018-2021

NO	TUJUAN//SASARAN	NDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	2018			2019			2020			2021			PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
<b>MISI I MENCIPTAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)</b>																
1	Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, Kompetensi serta melayani masyarakat	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	3,1	3,3	106,45	3,2	3,5	109,38	3,3	3,3	100,00	3,40	3,45	101,47	SEKRETARIS DAERAH
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	B	B	100,00	BB	B	90,00	BB	B	90,00	A	B*	76	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
3		Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD		B	B	100,00	BB	B	90,00	BB	B	90,00	A	BB	98,00	
<b>MISI II MEMBANGUN DAN MENINGKATKAN KUALITAS INFRASTRUKTUR</b>																
4	Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas dalam mendukung kelancaran arus barang, orang dan jasa yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah dan perekonomian daerah	Capaian kinerja infrastruktur daerah	%	100	100,00	100,00	100	100,00	100,00	100	100,00	100,00	100,00	98,33	98,33	SEKRETARIS DAERAH
5	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Daerah	Persentase Pembangunan dan Penanganan Infrastruktur	%	60	60,00	100,00	70	70,00	100,00	80	80,00	100,00	85,00	86,80	100,00	ASISTEN PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN

MISI III MENINGKATKAN AKSES DAN PEMERATAAN PELAYANAN PENDIDIKAN BERKUALITAS																
6	Terwujudnya Akses, Kualitas Pendidikan dan Sosial Menuju Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlakul Karimah dan Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	%	71,77	71,95	99,75	72,20	72,44	100,33	72,75	72,45	99,59	73,21	72,75	99,37	SERETARIS DAERAH
7		Indeks Gini / Menurunnya Ketimpangan Pendapatan	%	0,390	0,385	98,72	0,390	0,365	93,59	0,37	0,362	102,21	0,37	0,36	100,55	SERETARIS DAERAH
8		Kemiskinan	%	5,13	5,24	97,90	5,00	5,09	98,23	5,12	5,92	86,49	5,06	6,50	77,85	SERETARIS DAERAH
9		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,45	8,52	99,18	8,2	8,11	101,11	8,19	10,64	76,97	8,03	8,98	89,42	SERETARIS DAERAH
10	Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Menengah dan Khusus	Harapan lama sekolah	Tahun	13	12,85	101,17	13,5	12,88	104,81	14	12,89	92,07	14,05	13,02	92,67	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
11		Rata rata lama sekolah	Tahun	8,47	8,62	98,26	8,7	8,74	99,54	8,9	8,89	99,89	9,10	8,93	98,13	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
12	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Daya beli	%			-	100			100			100,00		Perbedaan target	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
13	Meningkatnya Ketersediaan Lapangan Kerja bagi Masyarakat	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%			-	100	64,52	64,52	100	64,48	64,48	100,00	63,79	63,79	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

14	Meningkatnya Kelembagaan PUG (Pengarusutamaan Gender)	Indeks pembangunan gender (IPG)	Nilai	91,67	91,30	99,60	91,95	91,67	99,70	92,23	91,67	99,39	92,51	91,67	99,09	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
<b>MISI IV MENINGKATKAN AKSES DAN PEMERATAAN PELAYANAN KESEHATAN BERKUALITAS</b>																
15	Terwujudnya peningkatan kualitas akses dan pemerataan pelayanan kesehatan	Angka Harapan Hidup	%	69,76	69,64	99,83	70,06	69,84	99,69	70,36	69,96	99,43	70,66	70,02	99,09	SEKRETARIS DAERAH
16	Meningkatnya Pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu (Per 100,000 kelahiran hidup)	Jumlah	304	247,00	123,08	300	212,00	141,51	290	242,00	119,83	290,00	100,27	289,2	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
17		Angka Kematian Bayi (Per 1000 kelahiran hidup)	Jumlah	31	4,69	660,61	30	5,45	550,47	29	2,66	1.089,5	28,00	4,8	583,33	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
<b>MISI V MENINGKATKAN KUALITAS PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI</b>																
18	Meningkatnya Perekonomian Secara Berkelanjutan Berbasis Potensi Ekonomi Lokal	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6	5,77	96,17	6,2	5,29	85,32	6,4	-3,38	- 52,81	5,95	4,62	128,79	SEKRETARIS DAERAH
19		Tingkat Inflasi	%	3,7	3,42	108,19	4,2	3,30	127,27	4	1,45	275,86	4,00	1,91	209,42	SEKRETARIS DAERAH
20	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	%			-			-	6	-3,38	- 56,33	6,00	8,00	133,33	ASISTEN PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN
21	Meningkatnya Layanan Keuangan Pada Masyarakat	Indeks Keuangan Inklusif	Nilai			-			-	2,8		-	2,90		Belum rilis	ASISTEN PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN

22	Meningkatnya Daya Saing Daerah	Peringkat Daya Saing Provinsi dibandingkan Provinsi Lain di Indonesia	Nilai							-					-	7	5,00	140,00	6,00	5,00	120,00	ASISTEN PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN
23	Terwujudnya Pembangunan Rendah Karbon	Emisi Rumah Kaca	%							-					-	100	89	89	100,00	81,9	81,9	ASISTEN PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN

Sumber:Hasil Olahan data Bappeda

Keterangan\* data 20

### **3.2. Evaluasi Capaian IKU Perangkat Daerah Berdasarkan Misi RPJMD 2017-2022**

IKU perangkat daerah merupakan indikator kinerja tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022, yang menjadi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Hasil/Outcome di Bab VIII RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022. Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh informasi IKU PD yang menggambarkan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan tingkat dampak (*impact*) Tahun 2021 berdasarkan tingkat capaiannya. Dari 83 IKK tingkat impact Tahun 2021, yang memiliki capaian kinerja mencapai target sebanyak 52 indikator dan 29 indikator belum mencapai target dan 2 indikator tidak terdapat data Realisasi yaitu persentase penyediaan air baku dan persentase Rumusan Kebijakan Infrastruktur Daerah.

#### **3.2.1. Evaluasi Capaian Indikator Misi I Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan realisasi kinerja pada table 3.3, capaian kinerja pada Misi 1 indikator sasaran Perangkat Daerah terdiri dari 32 Indikator sasaran dimana 26 indikator sasaran tercapai dan sebanyak 6 indikator sasaran tidak tercapai. Perangkat daerah yang belum mencapai target yaitu Badan Penghubung, Bapenda, Inspektorat, BKD, BPSDM, dan Bappeda. Capaian yang melampaui target RPJMD terbesar adalah Perangkat daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan nilai capaian 134,67 .

#### **3.2.2. Evaluasi Capaian Indikator Misi 2. Membangun Dan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur**

Pada Misi 2 terdapat sasaran perangkat daerah sebanyak 13 indikator, tercatat 2 indicator sasaran tercapai dan 11 indikator sasaran tidak tercapai. Perangkat daerah yang mencapai target Dinas Perhubungan, dan Perangkat daerah yang belum mencapai target Perangkat daerah adalah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, Dinas ESDM Dan Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian.

#### **3.2.3. Evaluasi Capaian Indikator Misi 3. Meningkatkan Akses Dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan Berkualitas**

Pada Misi 3 (Tiga) tercatat Sasaran Perangkat Daerah terdiri dari 10 Indikator sasaran perangkat daerah yang tercapai sebanyak 8 indikator dan yang tidak tercapai sebanyak 2 indikator. Dimana yang belum mencapai target adalah Perangkat Daerah Dinas Pendidikan yaitu indikator angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah dan cakupan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Perangkat daerah yang sudah encpai target di Misi III ini adalah Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas DP3AKKB, Dinas Sosial dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

#### **3.2.4. Evaluasi Capaian Indikator Misi 4. Meningkatkan Akses Dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan Berkualitas**

Evaluasi Capaian Indikator Misi 4 (empat) Meningkatkan Akses Dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan Berkualitas tercatat terdapat 6 indikator sasaran Perangkat daerah dimana 5 mencapai target dan 1 tidak tercapai. Perangkat daerah yang belum mencapai target yaitu Dinas Kesehatan pada indikator jumlah kematian bayi sedangkan indikator angka kematian ibu melahirkan mencapai target. Perangkat daerah lainnya yang telah mencapai target yaitu DP3AKKB, RSUD Banten dan RSUD Malingping.

#### **3.2.5. Evaluasi Capaian Indikator Misi 5. Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan Dan Pemerataan Ekonomi**

Pada Misi 5 (Lima) ketercapaian sasaran perangkat daerah dari 20 Indikator sasaran yang tercapai sebanyak 11 dan yang tidak tercapai sebesar 9 indikator sasaran.

Tercatat Perangkat daerah yang belum mencapai target adalah Dinas Tenaga kerja , Dinas ESDM, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian Dan Dinas Ketahanan Pangan. Perangkat daerah yang mencapai target Dinas DLHK ,Dinas Koperasi.

Tabel 3.3

## Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2018-2021

## Misi 1. Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)

NO	MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET RPJMD					REALISASI TARGET RPJMD				TINGKAT CAPAIAN TARGET RPJMD				KETERANGAN	KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB
					2017	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2022			
1.	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	2.8	3.1	3.2	3.3	3,4	3.3	3.5	3.3	3,45	106.45	100.94	100	101,47	TERCAPAI	3.5	SEKRETARIS DAERAH	
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Provinsi Banten / Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	Nilai	CC	B (70)	BB (75)	BB(80)	A (85)	60 (B)	61 (B)	65 (B)		100	90	88		TIDAK TERCAPAI	A	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
			Capaian Indeks Reformasi Birokrasi	nilai	CC	B	BB	BB	A	C	59/C	61 (B)		100	90	86		TIDAK TERCAPAI	A		
			Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	nilai	CC	B	BB	BB	A	B	B	B	BB	100	92	95	98,7	TIDAK TERCAPAI	A		
		Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik Badan Penghubung	Capaian Pelayanan Publik Badan Penghubung	%	100	100	100	100	100	100	97.31	100	90	100.00	97.31	100	90	TIDAK TERCAPAI	100	BADAN PENGHUBUNG	

NO	MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET RPJMD					REALISASI TARGET RPJMD				TINGKAT CAPAIAN TARGET RPJMD				KETERANGAN	KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB
					2017	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2022			
		Terwujudnya peran DPRD sesuai dengan fungsinya	Capaian Program-kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen RPJMD maupun Dokumen RKPDP	%	100	100	100	100	100	98.33	96.78	98.76	100	98.33	96.78	98.76	100	TERCAPAI	100	SEKRETARIAT DPRD	
		Meningkatnya Pengelolaan dan Aset Daerah yang Akuntabel	Capaian Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100.00	100.00	100	100	TERCAPAI	WTP	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
		Meningkatnya Kualitas SPIP	Capaian Maturitas SPIP	Nilai	2	2	3	3	4	3.02	3.00	3.5	3	151.00	100.00	116.67	75	TIDAK TERCAPAI	4	INSPEKTORAT	
			Capaian Kapabilitas APIP	level	-	-	-	3	3	-	-	3	3	-	-	100	100	TERCAPAI			
		Meningkatnya Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah yang berkualitas	Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah	%	60	65	70	75	80	54.17	58.33	83.33	70,83	83.33	83.33	111.11	88,54	TIDAK TERCAPAI	80	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Penilaian Perencanaan, Pengukuran, pelaporan dan capaian kinerja	nilai	B (55)	BB (60)	BB (70)	BB (75)	A (80)	B	B	B	B	100	90	90	100	TERCAPAI			
		Meningkatnya Penelitian dan pengembangan yang berkualitas	Cakupan Penelitian dan pengembangan	%	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100.00	100	100	TERCAPAI	100		
		Meningkatnya Ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan secara elektronik	Maturitas SIPD	Nilai	-			70	75	-	-	66.67	75	-	-	95.24	100	TERCAPAI			
		Terwujudnya Kompetensi Aparatur	Persentase Peningkatan Indeks Kompetensi ASN	%	10	10	15	20	25	17.3	27.88	11.35	24,69	170.30	185.89	56.76	98,76	TIDAK TERCAPAI	30	BADAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		Terwujudnya Profesionalisme aparatur	Persentase Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN	%		75	80	85	90	9.42	30	66.35	81,52	12.56	37.50	78.06	90,58	TIDAK TERCAPAI	95	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	

NO	MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET RPJMD					REALISASI TARGET RPJMD				TINGKAT CAPAIAN TARGET RPJMD				KETERANGAN	KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB
						2017	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021			
		Meningkatnya Pendapatan Daerah yang Optimal	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	%	62.89	59.30	60.62	61.91	63,19	61.25	62.65	56.67	62,69	103.29	103.35	91.38	99,21	TIDAK TERCAPAI	64.44	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
		Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum daerah yang aman dan kondusif	Rasio Penegakan PeraturanPerundang-undangan daerah	%	70	75	75	80	80	75	75	100	100	100.00	100.00	133	125,00	TERCAPAI	85	SATPOL PP	
		Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Keamanan dan Stabilitas Daerah yang kondusif untuk mendukung NKRI	Indeks Demokrasi Indonesia	Nilai	68,46	70	74	76	78	70	73.78		78	100.00	99.70		100,00	TERCAPAI	80	BADAN KESBANGPOL	
			Angka Kriminalitas	Nilai	5002	4800	4500	-	-	4800	4500	-	-	100.00	100.00	-	100,00	TERCAPAI	4,5		
			Penanganan konflik masyarakat	%				100	100	-	-	100	100				100,00	TERCAPAI			
		Meningkatnya Penanggulangan Kebencanaan yang efektif	Indeks Resiko Bencana	Nilai	133	133	125	120	115	173.81	169.74	154.87	149.08	76.52	73.64	77.48	129	TERCAPAI	110	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		Meningkatnya Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel	Capaian Tertib Administrasi Kependudukan/Cakupan Database Kependudukan Tingkat Provinsi	%	50	100	100	100	100	-	100	100	100	-	100	100	100	TERCAPAI	80	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	
		Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan Yang Berbasis Teknologi dan keterbukaan Informasi	Persentase Pelayanan e-Government Pemerintah Provinsi Banten	%	20	42.10	61.83	-	-	48.61	80.05	-	-	115.46	129.47	-	129	TERCAPAI	61,83	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
			Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	88,08	88.08	89	89.55	90	76	80.05	96.01	91,7	86.29	89.94	107.21	101,89	TERCAPAI	90		
			Persentase Sarana dan Prasarana Persandian	%	-	-	-	100	100	-	-	51.52	100	-	-	51.52	100	TERCAPAI	100		
		Meningkatnya ketersediaan data dan Statistik Sektoral yang	Maturitas Database Statistik Sektoral	%	-	-	-	100	100	-	-	100	100	-	-	100	100	TERCAPAI	100		

NO	MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET RPJMD					REALISASI TARGET RPJMD				TINGKAT CAPAIAN TARGET RPJMD				KETERANGAN	KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB
						2017	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021			
		dikelola secara elektronik																			
		Meningkatnya Pengelolaan arsip pemerintah daerah yang berkualitas	Persentase OPD yang Menyelenggarakan kearsipan sesuai Ketentuan Kearsipan	%	70	80	85	90	95	80	85	90	100	100	100	100	105,26	TERCAPAI	100	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		Meningkatnya Kerjasama dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan	Persentase Realisasi Kebijakan kerjasama Pemerintahan	%	-	-	-	100	100	-	-	95	100	-	-	95	100	TERCAPAI	100	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESRA	
			Capaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Banten (LPPD)	%	-	-	-	100	100	-	-	100	100	-	-	100	100	TERCAPAI	100	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESRA	
		Meningkatnya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	%	-	-	-	100	100	-	-	100	100	-	-	100	100	TERCAPAI	100	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESRA	
		Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah	Persentase realisasi produk hukum daerah dan HAM yang terpublikasi	%	-	-	-	100	100	-	-	100	100	-	-	100	100	TERCAPAI	100	BIRO HUKUM	
		Meningkatnya Tatalaksana Organisasi Daerah Yang Efektif	Persentase Manajemen Reformasi Birokrasi	%	-	-	-	100	100	-	-	100	100	-	-	100	100	TERCAPAI	100	BIRO ORGANISASI DAN RB	
		Meningkatnya Pelayanan Umum yang Prima	Persentase Peningkatan Pelayanan Umum yang Prima	%	-	-	-	100	100	-	-	100	100	-	-	100	100	TERCAPAI	100	BIRO UMUM	
		Meningkatnya Administrasi dan Pembangunan Daerah	Persentase Realisasi Layanan dan Pembangunan Administrasi Daerah	%	-	-	-	100	100	-	-	100	100	-	-	100	100	TERCAPAI	100	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	
		Meningkatnya Kebijakan Perekonomian Daerah dan Pembinaan Pengendalian Bidang Perekonomian	Capaian Kebijakan Bidang Perekonomian Daerah	%	-	-	-	100	100	-	-	100	100	-	-	100	100	TERCAPAI	100	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	
		Meningkatnya Pelayanan dan fasilitasi Pimpinan	Persentase Peningkatan Pelayanan Fasilitas Pimpinan	%	-	-	-	100	100	-	-	100	100	-	-	100	100	TERCAPAI	100	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	

Tabel 3.4

## Capaian Kinerja Sasaran

## Misi 2. Membangun Dan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur

NO	MISI	TUJUANSASARAN	NDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET RPJMD					CAPAIAN TARGET RPJMD				TINGKAT CAPAIAN TARGET RPJMD				KETERANGAN KINERJA	KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB
					2016	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2022			
2	Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur	Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas dalam mendukung kelancaran arus barang, orang dan jasa yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah dan perekonomian daerah	Capaian kinerja infrastruktur daerah	%	50	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	100	100,00	TERCAPAI	100	SEKRETARIS DAERAH	
		Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Daerah	Persentase Pembangunan dan Penanganan Infrastruktur	%	na	60	70	80	85	60	70	80	85	100	100	100	100,00	TERCAPAI		ASISTEN PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN	
		Meningkatnya Infrastruktur jalan dan jembatan yang handal	Tingkat Kemantapan Jalan	%	78,98	87,43	89	-	-	91,4	98,15	-	-	104,54	110,28	-	-	TERCAPAI	89	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
			Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	%	-	-	-	100	100	-	-	94,44	98			94,44	98,00	TIDAK TERCAPAI	100		
			Persentase Jembatan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	%	-	-	-	93,5	100	-	-	79,71	93,6	-	-	85,25	93,60	TIDAK TERCAPAI	100		
		Meningkatnya sarana dan prasarana jaringan sumberdaya air	Persentase pemulihan dan pencegahan banjir	%	15,51	20,89	26,27	-	-	20,84	26,89	-	-	99,76	102,36	-	-	TERCAPAI	26,27	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
			Persentase Penanganan Pencegahan Banjir dan Abrasi	%	-	-	-	32,65	37,09	-	-	27,2	27,28	-	-	83,31	73,55	TIDAK TERCAPAI	42,42		
			Pemenuhan tingkat layanan irigasi	Ha	15.118,50	15332,98	16721,78	-	-	15312,06	15826,06	-	-	99,86	94,64	-	-	TERCAPAI	16.721,78		

NO	MISI	TUJUANSASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET RPJMD				CAPAIAN TARGET RPJMD				TINGKAT CAPAIAN TARGET RPJMD				KETERANGAN KINERJA	KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB
					2016	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021			
			Luasan layanan irigasi	Ha	-	-	-	18110,58	19387,46	-	-	16051,13	16411	-	-	88,63	84,65	TIDAK TERCAPAI	20,888,19	
			Persentase penyediaan prasarana air baku	%	-	-	-	100	100	-	-	100		-	-	100	0,00	TIDAK TERSEDIA DATA	100	
		Meningkatnya Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Penggunaan Ruang sesuai dengan Tata Ruang	%	80	82,5	85	-	-	88,5	88,7	-	-	107,27	104,35	-	-	TERCAPAI	85	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	-	-	-	87,5	90	-	-	96,43	90	-	-	110,21	100,00	TERCAPAI	92,5	
		Meningkatnya Perumahan dan Pemukiman yang layak, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi lingkungan, serta Pengelolaan Sampah regional	Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani	Ha	375,29	114,6	203,2	274,6	333,3	58,22	101,16	71,4	292,04	50,8	49,78	26	87,62	TIDAK TERCAPAI	375,29	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			Persentase Rumah Layak Huni	%	82,86	84,02	85,18	86,34	87,5	97,01	93,13	86,34	70,71	115,46	109,33	100	80,81	TIDAK TERCAPAI	88,66	
			cakupan penyediaan pengelolaan sampah	%	0	0	20	20	20	0	0	5	10	0	0	25	50,00	TIDAK TERCAPAI	80	
		Meningkatnya Sarana dan prasarana bangunan pada kawasan Strategis Provinsi yang berkualitas	Persentase Gedung strategis Provinsi dalam kondisi baik	%	30	40	50	-	-	36,84	39,89	-	-	92,1	79,78	-	-	TERCAPAI	50	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			Persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	%	-	-	-	75	88	-	-	75	88	-	-	100	100,00	TERCAPAI		
		Meningkatnya keselamatan dan kelancaran lalu lintas	Persentase penurunan angka	%	0	10	20	-	-	10	20	-	-	100	100	-	-	TERCAPAI	20	DINAS PERHUBUNGAN

NO	MISI	TUJUANSASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET RPJMD					CAPAIAN TARGET RPJMD				TINGKAT CAPAIAN TARGET RPJMD				KETERANGAN KINERJA	KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB
					2016	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2022			
			kecelakaan lalu lintas																		
			Persentase peningkatan pelayanan perhubungan darat, laut dan udara	%	-	-	-	100	100	-	-	22,54	98,33	-	-	22,54	98,33	TIDAK TERCAPAI			
		Meningkatnya Kinerja pelayanan, pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang lebih baik	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana transportasi	%	0	10	20	20	20	10	20	21,92	19,99	100	100	109,61	99,95	TIDAK TERCAPAI	90		
		Meningkatnya Pelayanan kelistrikan dan energi terbarukan yang optima	Rasio elektrifikasi	%	97	98	99	100	100	98,95	99,20	99,46	97,41	102,01	101,22	100,46	97,41	TIDAK TERCAPAI		Dinas ESDM	
		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Memadai	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	NILAI	2,6	3	3,6	3,7	3,9	2,01	1,83	1,83	3,15	67,00	50,83	49,46	80,77	TIDAK TERCAPAI		Dinas Kominfo	
		Meningkatnya Kebijakan Infrastruktur Daerah	persentase Rumusan Kebijakan Infrastruktur Daerah (Total 40 Kebijakan)	%	-	14,29	28,57	57,14	76,19	14,29	25	60		100	87,5	105,01	0,00	TIDAK TERSEDIA DATA		BISDA	

Tabel 3.5

## Capaian Kinerja Sasaran

## Misi 3. Meningkatkan Akses Dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan Berkualitas

NO	MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET RPJMD					REALISASI TARGET RPJMD				TINGKAT CAPAIAN TARGET RPJMD				KETERANGAN KINERJA	KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB
					2017	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2022			
3	Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas	Terwujudnya Akses, Kualitas Pendidikan dan Sosial Menuju Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlakul Karimah dan Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	poin	70,96	71,77	72,2	72,75	73,21	71,95	72,44	72,45	72,72	100,25	100,33	99,59	99,33	TIDAK TERCAPAI	73,68	SEKRETARIS DAERAH	
			Indeks Gini / Menurunnya Ketimpangan Pendapatan	poin	0,39	0,39	0,39	0,37	0,365	0,385	0,365	0,362	0,365	101,3	106,8	102,2	100,00	TIDAK TERCAPAI		SEKRETARIS DAERAH	
			Kemiskinan	%	5,59	5,13	5	5,12	5,06	5,24	5,09	5,92	6,5	97,9	98,23	5,92	77,84	TIDAK TERCAPAI		SEKRETARIS DAERAH	
			Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,69	8,45	8,2	8,19	8,03	8,52	8,11	10,64	8,98	99,18	101,11	76,97	89,40	TIDAK TERCAPAI		SEKRETARIS DAERAH	
		Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Menengah dan Khusus	Harapan lama sekolah	Tahun	12,7	13	13,5	14	14,5	12,85	12,88	12,89	13,02	98,8	95,4	92,1	93,00	TIDAK TERCAPAI	15	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Rata rata lama sekolah	Tahun	8,37	8,47	8,7	8,9	9,1	8,62	8,7	8,89	8,93	101,8	100	99,9	98,13	TIDAK TERCAPAI	9,3		
		Meningkatnya Kelembagaan PUG (Pengarusutamaan Gender)	Indeks pembangunan gender (IPG)	Nilai	91,39	91,67	91,95	92,23	92,51	86,12	91,67	91,67	91,67	93,95	99,7	99,39	99,09	TIDAK TERCAPAI	92,79		
		Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Daya beli	%	-	-	100	100	100	-	69,03	70,45	76,33	-	69,03	70,45	76,33	TIDAK TERCAPAI	100		
		Meningkatnya Ketersediaan Lapangan Kerja bagi Masyarakat	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	-	-	100	100	100	-	64,52	64,48	63,79	-	64,52	64,48	63,79	TIDAK TERCAPAI	100		
		Meningkatnya Akses dan dan Kulaitas Pelayanan Pendidikan Menengah dan Khusus	Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah	%	71,13	72,9	74,67	76,45	78,22	71,70	72,92	73,35	84,33	98,35	97,66	95,95	107,81	TERCAPAI	80	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah	%	57,21	58,77	60,33	61,88	63,44	58,72	58,8	59,06	62,89	99,91	97,46	95,44	99,13	TIDAK TERCAPAI	65		
			Cakupan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	%	-	-	-	100	100	-	-	40,63	93,4	-	-	40,63	93,40	TIDAK TERCAPAI	100		
		Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan	Persentase pelestarian dan inovasi nilai budaya daerah	%	0	100	100	100	100	72,9	100	100	100	72,9	100	100	100,00	TIDAK TERCAPAI	100	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Terwujudnya pemuda wirausahawan baru dan Olah Raga yang berprestasi	Indeks Pembangunan Kepemudaan	Nilai	0	10	20	30	40	9,73	20,17	30,27	49,17	97,3	100,85	100,9	122,93	TERCAPAI	45	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	

NO	MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET RPJMD					REALISASI TARGET RPJMD				TINGKAT CAPAIAN TARGET RPJMD				KETERANGAN KINERJA	KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB
					2017	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2022			
			Indeks Pembangunan Olahraga	Nilai	0	10	20	30	40	9,38	20,83	30	40	93,8	104,15	100	100,00	TIDAK TERCAPAI	45		
		Meningkatnya Pengarustamaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	68,74	69,54	70,34	71,14	71,94	68,3	71,14	72,75	72,75	98,22	101,14	102,26	101,13	TERCAPAI	72,74	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	
		Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Pemenuhan Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak	%	-	-	-	72,73	77,27	-	-	73,33	100	-	-	94,90	129,42	TERCAPAI	100		
		Meningkatnya Budaya Literasi	Indeks minat baca masyarakat	%	25,1	-	-	40	45	-	-	18,94	58,77	-	-	47,35	130,6	TERCAPAI	35	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	
		Menurunnya PMKS	presentase penanganan jumlah PMKS	%	8,24	4,49	3,89	3,30	2,68	4,8	6,46	6,41	2,68	106,9	166,1	194,2	100	TIDAK TERCAPAI	2,08	DINAS SOSIAL	

Tabel 3.6  
 Capaian Kinerja Sasaran  
 Misi 4. Meningkatkan Akses Dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan Berkualitas

NO	MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET RPJMD					CAPAIAN TARGET RPJMD				TINGKAT CAPAIAN TARGET RPJMD				keterangan kinerja	KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB
						2016	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021			
4.	Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas	Terwujudnya peningkatan kualitas akses dan pemerataan pelayanan kesehatan	Angka Harapan Hidup	%	69.46	69.76	70.06	70.36	70,66	69.64	69,84	69,96	70,02	99,82	99,68	99,43	99,09	TIDAK TERCAPAI	70.96	SEKRETARIS DAERAH	
		Meningkatnya Pelayanan Kesehatan berkualitas dan Mudah di Akses	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 kelahiran hidup)	Jumlah	308	304	300	290	290	247	212	242	242	32.89	28.88	83,45	119,83	TERCAPAI	285	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Angka Kematian Bayi (Per 1000 kelahiran hidup)	Jumlah	32	31	30	29	28	4.6	5.45	2,66	2,66	14.84	16.87	1090,23	1052,63	TERCAPAI	26		
		Meningkatnya Pelayanan Kesehatan berkualitas dan Mudah di Akses	Penurunan Jumlah Kematian Ibu	ORANG	247	247	242	237	232	257	222	242	194	96,11	109,01	97,93	119,59	TERCAPAI	227	DINAS KESEHATAN	
			Penurunan Jumlah Kematian Bayi	ORANG	1149	1149	1144	1139	1134	1158	1299	1670	1157	99,22	88,07	68,20	98,01	TIDAK TERCAPAI	1129		
		Meningkatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Tenaga Kesehatan	Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan	%	75	90	100	100	100	91.5	94.23	79,5	100	101.67	94.23	79,5	100	TERCAPAI	100		
		Meningkatnya Pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal	BOR (Bed Occupancy Ratio).RSUD Banten	%	0	60	65	70	75	73	73,29	70,46	76,4	121,67	112,75	100,66	101,87	TERCAPAI	80	DINAS KESEHATAN / RSUD	
			BOR (Bed Occupancy Ratio).RSUD Malingping	%	-	60	65	65	70	73,29	73,29	70,46	70,88	122,15	112,75	108,40	101,26	TERCAPAI	75	DINAS KESEHATAN / RSUD	
		Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Laju pertumbuhan penduduk	%	2.01	1.96	1.91	-	-	1.91	1.91	-	-	97.45	100.00	-	-	-	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	
		Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Angka Kelahiran Total (TFR)	%	-	-	-	2,21	2,23	-	-	2,37	2,37	-	-	107,24	106,28	TERCAPAI	2,26		

Tabel 3.7  
Capaian Kinerja Sasaran  
Misi 5. Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan Dan Pemerataan Ekonomi

NO	MISI	TUJUAN/SASARAN	NDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET RPJMD					CAPAIAN TARGET RPJMD				TINGKAT CAPAIAN TARGET RPJMD				ketrangan kinerja	KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB
					2016	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2022			
5.	Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	Meningkatnya Perekonomian Secara Berkelanjutan Berbasis Potensi Ekonomi Lokal	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,26	6	6,2	6,4	5,95	5,82	5,53	-3,38	4,44	97,00	89,19	52,81	74,62	TIDAK TERCAPAI		SEKRETARIS DAERAH	
			Tingkat Inflasi			3,7	4,2	4	4	3,42	3,3	1,45	1,91	108,19	12700%	275	47,75	TIDAK TERCAPAI			
		Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	%	-	-	-	6	6,4	-	-	-3,38		-	-	-56,33	0,00	TIDAK TERCAPAI		ASISTEN PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN	
		meningkatnya Layanan Keuangan Pada Masyarakat	Indeks Keuangan Inklusif	nilai	-	-	-	2,8	2,9	-	-	84,29	84,29	-	-		2906,6	TERCAPAI	3		
		Meningkatnya Daya Saing Daerah	Peringkat Daya Saing Provinsi dibandingkan Provinsi Lain di Indonesia	nilai	-	-	-	7	6	-	-	6	5	-	-	140%	83,33	TIDAK TERCAPAI	5		
		Terwujudnya Pembangunan rendah karbon	Emisi Rumah Kaca	%	-	-	-	100	100	-	-	0		-	-	0	0,00	TIDAK TERCAPAI	100		
		Meningkatnya Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Kemudahan Berusaha	Jumlah Nilai Investasi	Triliyun	52,3	54,40	60,80	-	-	56,52	48,73	-	-	103,90	80,15	-	-	TERCAPAI	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			Jumlah Realisasi Investasi (PMA + PMDN)	Triliyun		-	-	49,00	51,3	-	-	62,01	45,6	-	-	126,56	88,89	TIDAK TERCAPAI	53,9		
			Indeks Kepuasan Pelayanan Investor	%	82,16	85,09	85,22	85,47	85,72	83,62	88,45	89,33	89,4	98,27	103,79	104,52	104,29	TERCAPAI	85,97		
		Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perindustrian yang optimal	LPE Sektor Perindustrian	%	3,05	3,7	3,95	4,20	4,45	6,63	6,02	-	4,9	179,19	152,41	-	111,17	110,11	TERCAPAI	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan yang optimal dan Inflasi yang terkendali	LPE Sektor Perdagangan	%	3,82	4,9	5,4	5,90	6,4	10,90	11,27	-	0,89	222,45	208,70	-	48,42	13,91	TIDAK TERCAPAI	6,9	
			Tingkat Inflasi Bahan Pokok dan Bahan Strategis	%	4,19	4,00	4,00	-	-	4,00	2,47	-	-	100,00	61,75	-	-	TERCAPAI			
			Tingkat Inflasi Bahan Pokok	%	-	-	-	5,90	4	-	-	-	2,43	-	-	-	48,42	60,75	TIDAK TERCAPAI	4	
		Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian yang optimal	Pertumbuhan Sektor Pertanian	%	7,05	5,30	5,60	-	-	3,58	2,21	-	-	67,55	39,46	-	-	TERCAPAI	-	DINAS PERTANIAN	
			Pertumbuhan Sektor Pertanian yang optimal	%	-	-	-	5,8	6	-	-	0,00	6	-	-	N/a	100,00	TIDAK TERCAPAI	6,2		
		Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perikanan yang optimal	Laju Pertumbuhan Sektor Perikanan Terhadap PDRB	%	4,48	4,55	4,67	-	-	2,93	2,63	-	-	64,40	56,32	-	-	TERCAPAI			

NO	MISI	TUJUAN/SASARAN	NDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET RPJMD					CAPAIAN TARGET RPJMD				TINGKAT CAPAIAN TARGET RPJMD				keterangan kinerja	KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB
					2016	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2022			
			Laju Pertumbuhan Sektor Perikanan	%	-	-	-	4,72	4,8	-	-	4.13	2,5	-	-	87.5	52,08	TIDAK TERCAPAI	4,9	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah yang terjaga	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	%	82.4	89.2	90.6	83.50	84,5	89.10	83.29	81.93	73,48	99.89	91.93	98.12	86,96	TIDAK TERCAPAI	8,5	DINAS KETAHANAN PANGAN	
		Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata yang optimal	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	%	2.84	2.89	2.94	-	-	2.88	2.89	-	-	99.65	98.30	-	-	TERCAPAI	-	DINAS PARIWISATA	
			Persentase peningkatan nilai PDRB sektor Pariwisata	%	-	-	-	2.99	3,04	-	-	0.69	2,94	-	-	23.15	96,71	TIDAK TERCAPAI	3,09		
		Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Peningkatan Kualitas kelembagaan Omset Koperasi	%	NA	6	6	-	-	5.67	6	-	-	94.50	100.00	-	-	TERCAPAI	-	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
			Persentase Peningkatan Kualitas Koperasi	%	-	-	-	6	6	-	-	6	6	-	-	100.00	100,00	TIDAK TERCAPAI	6		
		Meningkatnya Usaha Kecil menjadi usaha menengah	Persentase Peningkatan Aset dan Omset Usaha Kecil	%	NA	1	1	-	-	1	1	-	-	100.00	100.00	-	-	TERCAPAI			
			Persentase Peningkatan Omset Usaha Kecil	%	-	-	-	1	1	-	-	0.10	1	-	-	10.00	100,00	TIDAK TERCAPAI	1		
		Meningkatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	43.67	44.17	44.67	50.87	51,83	49.02	56.86	62.94	62,73	110.98	127.29	123.73	121,03	TERCAPAI	52,79	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		Meningkatnya Pengelolaan dan konservasi hutan yang optimal	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	%	30.6	31.21	31.71	32.21	32,71	32.41	39.53	45.46	45,99	103.84	124.66	141.13	140,60	TERCAPAI			
		Meningkatnya Pengendalian, Geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara yang efektif	Persentase Pertumbuhan Sektor Sumber Daya Mineral.	%	12	12.5	13	-	-	12.5	18.43	-	-	100.00	141.77	-	-	TERCAPAI	-	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
			Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB	%	-	-	-	0.65	0,63	-	-	0.68	0,63	-	-		100,00	TIDAK TERCAPAI	0,60		
		Meningkatnya Tenaga Kerja yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	%	58.06	59.01	60.01	-	-	60.27	5.28	-	-	102.14	100.63	-	0	TERCAPAI	-	DINAS KETENAGA KERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
			Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	Indeks	-	-	-	5.69	5,72	-	-	6,49	5,28	-	-	172.58	92,38	Tidak TERCAPAI	5,74		
		Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	Persentase pekerja Penuh Waktu	%	-	-	-	43.75	45	-	-	40.43	41,9	-	-	92.41	93,11	TIDAK TERCAPAI	46,26		
		Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Ekonomi Desa dan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Persentase Desa Mandiri	%	14	16.40	18.80	-	-	16.40	16.40	-	-	100.00	87.23	-	0	TERCAPAI	-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
			Capaian Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Ekonomi Desa dan Pemerintahan Desa/Kelurahan di 48 desa tertinggal dan berkembang yang diberdayakan	%	-	-	-	41.67	33,33	-	-	41.67		-	-	100.00	0,00	TIDAK TERCAPAI	25		

### 3.3. Evaluasi Capaian atas Program Tahun Anggaran 2021

Program dan kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Banten merupakan penjabaran dari setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi baik urusan konkuren pemerintahan maupun fungsi penunjang urusan pemerintahan. Urusan konkuren pemerintahan ialah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Urusan konkuren pemerintahan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Banten meliputi Urusan Wajib Pelayanan Dasar maupun Non Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, serta Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan. Selain melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren, pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan. Penyelenggaraan Urusan Wajib Pelayanan Dasar terdiri atas 6 (enam) bidang urusan pemerintahan yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial. Penyelenggaraan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar terdiri atas 17 (tujuh belas) bidang urusan pemerintahan, yakni tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, serta perpustakaan dan kearsipan.

Penyelenggaraan Urusan Pilihan Pemerintahan terdiri atas 7 (tujuh) bidang urusan pemerintahan, yakni kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, dan perindustrian. Adapun penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan terdiri atas 5 (lima) bidang urusan yakni perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta pengelolaan penghubung. Penyelenggaraan unsur pendukung urusan pemerintahan terdiri atas 2 (dua) bidang urusan yakni bidang urusan sekretaris daerah, dan sekretariat daerah. penyelenggaraan unsur pengawasan urusan pemerintahan terdiri atas 1 (satu) bidang urusan yakni inspektorat daerah. Penyelenggaraan unsur pemerintahan umum terdiri atas 1 (satu) bidang urusan yakni kesatuan bangsa dan politik.

1. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Program RPJMD Tahun 2017-2022 mengalami penyesuaian yang cukup dinamis yaitu sehubungan dengan penetapan regulasi baik di Provinsi Banten maupun kebijakan dari Pemerintah Pusat Evaluasi Capaian Program Tahun 2018-2019 menggunakan nomenklatur program berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022;

2. Evaluasi Capaian Program Tahun 2020 menggunakan nomenklatur program berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022;
3. Evaluasi Capaian Program Tahun 2021 menggunakan nomenklatur program berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Hasil Capaian Program Tahun 2021 yang terdiri atas 163 (seratus enam puluh tiga) Program, disajikan pada Lampiran.

## BAB IV

### ANALISIS PERMASALAHAN DAN EVALUASI KINERJA

#### 4.1. Analisis Permasalahan

Permasalahan dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan pengukuran capaian indikiator kinerja utama, terdapat perbedaan batasan pada dokumen RPJMD Tahun 2017-2022 dan Definisi Operasional yang tercantum pada Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Banten dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022, yang dijelaskan sebagai berikut:

RPJMD BAB V TABEL 5.3	RPJMD BAB VIII	PERGUB IKU (PERGUB 36/2019)	ANALISA
Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten (terdapat di sasaran)	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD ada di table 8.6 (IKU Pemprov Banten) Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten (table 8.8 Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan)	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Pemda (Nilai)	dimana terdapat inkonsistensi antar dokumen perencanaan menyebabkan kesulitan penghitungan pada saat evaluasi RPJMD. Selain itu tingkatan cascading perlu diperhatikan bahwa SAKIP Pemprov lebih tinggi tingkatannya dari SAKIP OPD, dan antara SAKIP Pemprov dengan LKIP sesuatu yang berbeda dalam Definisi operasionalnya. Sehingga dalam dokumen RPJMD dan Pergub IKU nomenklaturnya tidak sama.

2. Terdapat permasalahan pada penghitungan target RPJMD 2017-2022, baik Sasaran Daerah maupun Sasaran Perangkat Daerah

IKU	DO PERGUB IKU	TARGET 2021	ANALISA
Indeks Keuangan Inklusif	berdasarkan data makro ekonomi, terutama pada jangkauan layanan sektor perbankan	2.9	Pada kasus indeks keuangan inklusif ini rilis OJK sebesar 84,29%, terjadi perbedaan komponen penilaian, sehingga

			inkonsistensi target dengan rilis capaian dari Lembaga OJK
Daya beli	Daya beli masyarakat adalah kemampuan masyarakat sebagai konsumen untuk membeli barang atau jasa yang dibutuhkan	100%	Terdapat inkonsistensi antara DO dengan pengisian target. Daya beli dihitung dengan pengeluaran per kapita bukan persentase 100%
Total Fertility Rate (TFR)	Rata rata banyaknya anak yang dilahirkan hidup oleh seorang wanita sampai akhir masa reproduksinya ( dengan asumsi, wanita tersebut tetap hidup sampai akhir masa reproduksi dan akan mengikuti pola fertilitas tertentu )	2,23	Target pada TFR trendnya semakin naik, di 2020 tercatat 2,21 dan 2021 2,23. Seharusnya TFR targetnya semakin lama semakin turun

3. Keterbatasan data realisasi, pada penghitungan capaian di tahun 2021 ada beberapa data capaian belum rilis sehingga masih memakai realisasi di tahun 2020, mengingat laporan evaluasi RPJMD ini harus diselesaikan di Februari minggu keempat, sedangkan rilis beberapa indikator di Maret seperti Nilai Reformasi Birokrasi, SAKIP Provinsi, Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan Gender.
4. Tidak terealisasinya pinjaman ke PT SMI dalam menyokong APBD TA 2021 berimplikasi kepada banyaknya target capaian indikator kinerja yang dipastikan sulit untuk direalisasikan terutama yang berkaitan dengan Penanganan ekonomi dan infrastruktur, mengingat pembiayaan difokuskan kepada penanganan Covid-19 pada urusan Kesehatan serta terbatasnya pendanaan akibat tidak tercapainya pendapatan daerah diasumsikan sampai dengan akhir tahun 2021.

#### 4.2. Analisis Evaluasi Kinerja

Perlu mewujudkan sinkronisasi antar dokumen perencanaan, perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan perubahan nilai target indikator kinerja sasaran daerah dan sasaran Perangkat Daerah yang tidak sesuai dengan hasil dari sumber data Lembaga/Kementerian pada dokumen perencanaan berikutnya.
2. Perlu dilakukan langkah-langkah penyesuaian dan percepatan pada pelaksanaan sub kegiatan, kegiatan, program dalam rangka pencapaian target indikator kinerja sasaran daerah dan sasaran perangkat daerah terutama target yang belum tercapai.

3. Perlu adanya pengendalian, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan oleh OPD terkait dengan kondisi riil di lapangan.
4. Perlu adanya evaluasi terhadap belanja yang dianggarkan oleh Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian Program, Sasaran Perangkat Daerah dan Sasaran Daerah.
5. Penguatan pengawasan kinerja dalam rangka pencapaian sasaran kinerja.

## BAB V PENUTUP

### 5.1. KESIMPULAN

Pencapaian Target Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 pada dasarnya merupakan akumulasi Kinerja baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota yang di dalamnya terdapat kolaborasi baik pemerintah sendiri, dunia usaha, maupun masyarakat. Berdasarkan analisis dan identifikasi, atas penetapan target indikator kinerja utama, Capaian Indikator Utama Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2021, sebagai berikut:

1. Terhadap capaian IKU Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2021, dari 23 IKU terdapat 10 indikator (43,4 persen) yang mencapai dan melampaui target, 6 (enam) indikator atau 21,7 persen yang belum mencapai target, 3 (tiga) indikator atau 13,04 persen yang belum terdapat Realisasi 2021 sampai laporan ini disusun, 1(satu) indikator atau 4,3persen yang tidak dapat dihitung pencapaiannya.
2. Terdapat 83 Indikator sasaran Perangkat Daerah Tahun 2021, yang berdasarkan capaiannya disampaikan sebagai berikut: 52 (lima puluh dua) indikator kinerja telah mencapai target, 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja belum mencapai target, dan 2 indikator kinerja tidak terdapat data Realisasi yaitu persentase penyediaan air baku dan persentase rumusan Kebijakan Infrastruktur Daerah.
3. Hasil Capaian Program Tahun 2021 Program yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021 meliputi 163 (seratus enam puluh tiga) Program.
4. Terdapat target pembangunan infrastruktur yang tidak dilaksanakan sehubungan dengan terjadinya pandemi covid-19 maupun adanya pembatalan sumber pendanaan yang berasal dari Skema Pemulihan Ekonomi Nasional berupa Pinjaman dari PT SMI.

### 5.2. REKOMENDASI

1. Perlu dilakukan penyempurnaan *cascading* untuk perencanaan jangka menengah daerah yang saat ini sedang disusun berupa dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026.

2. Perlu dilakukan evaluasi terhadap target kinerja baik sasaran daerah, sasaran perangkat daerah dan program yang realisasinya tidak tercapai sesuai target yang ditetapkan dan selanjutnya dapat dijadikan *baseline* dalam perencanaan strategis periode selanjutnya.
3. Perlu dilakukan evaluasi terhadap target yang capaiannya terlalu tinggi dan terlalu rendah untuk dilakukan penyesuaian pada dokumen RPD 2023-2026.
4. Perlu dilakukan penyesuaian target RPJMD dengan data yang hasil rilisnya bersumber dari BPS ataupun Badan/Lembaga lainnya.

CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar								
1	1.1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan							
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi						
				Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %)	100	100	100,00		
				Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan : %)	100	100	100,00		
				Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %)	100	100	100,00		
				Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan : %)	100	100	100,00		
			Program Pengelolaan Pendidikan						
				Cakupan Layanan Sekolah Khusus dan Layanan Khusus (Satuan : %)	68	62	91,18	Kondisi Pandemi Covid- 19	Penambahan Akses Antara Lain Melalui Pembangunan

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Usb Sekolah Negeri Dan Penambahan Rkb
				Angka Kelulusan SMK (Satuan : %)	99,83	99,83	100,00		
				Persentase SMK yang Menerapkan link and Match (Satuan : %)	68	68	100,00	Jumlah Industri Yang Terbatas Dibanding Dengan Jumlah Sekolah	Satu Industri Untuk Beberapa Sekolah
				Angka Kelulusan SMA (Satuan : %)	99,28	99,28	100,00		
				Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMA IPS di KCD Kabupaten Pandeglang (Satuan : %)	43,86	0	0	Sesuai Dengan Surat Edaran Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Peniadaan Ujian Nasional Dan Ujian Kesetaraan Serta Pelaksanaan Ujian Nasional Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (covid-19) Untuk Ujian Nasional Di Tahun 2021 Ditiadakan.	Mengikuti Dan Menunggu Kebijakan Dan Regulasi Dari Pemerintah Pusat
				Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMK di KCD Kabupaten Pandeglang (Satuan : %)	42,45	0	0	Sesuai Dengan Surat Edaran Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (covid-19) Untuk Ujian Nasional Di Tahun 2020 Tidak Dilaksanakan Dan Pada Tahun 2021 Un Sesuai Dengan Surat Edaran Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Peniadaan Ujian Nasional Dan Ujian Kesetaraan Serta Pelaksanaan Ujian Nasional Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (covid-19) Untuk Ujian Nasional Di Tahun 2021 Ditiadakan.	Mengikuti Dan Menunggu Kebijakan Dan Regulasi Dari Pemerintah Pusat
				Persentase SMK yang Menerapkan link and Match (Satuan : %)	68	68	100,00	Jumlah Industri Yang Terbatas Dibanding Dengan Jumlah Sekolah	Satu Industri Untuk Beberapa Sekolah
				Angka Kelulusan SMA (Satuan : %)	99,28	99,28	100,00		
				Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMA IPS di di wilayah KCD Kabupaten Tangerang (Satuan : %)	47,25	0	0	Sesuai Dengan Surat Edaran Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Peniadaan Ujian Nasional Dan Ujian Kesetaraan Serta Pelaksanaan Ujian Nasional Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (covid-19) Untuk Ujian Nasional Di Tahun 2021 Ditiadakan.	Mengikuti Dan Menunggu Kebijakan Dan Regulasi Dari Pemerintah Pusat
				Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMK di wilayah KCD Kabupaten Tangerang (Satuan : %)	44,25	0	0	Sesuai Dengan Surat Edaran Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Peniadaan Ujian Nasional Dan Ujian Kesetaraan Serta Pelaksanaan Ujian Nasional Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona	Mengikuti Dan Menunggu Kebijakan Dan Regulasi Dari Pemerintah Pusat

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Virus Disease (covid-19) Untuk Ujian Nasional Di Tahun 2021 Ditiadakan.	
				Persentase SMK yang Menerapkan link and Match (Satuan : %)	68	68	100,00	Jumlah Industri Yang Terbatas Dibanding Dengan Jumlah Sekolah	Satu Industri Untuk Beberapa Sekolah
				Angka Kelulusan SMA (Satuan : %)	99,28	99,28	100,00		
				Angka Putus Sekolah SMA (Satuan : %)	0,13	0,13	100,00		
				Persentase SMA di Provinsi Banten terakreditasi minimal B (Satuan : %)	75	75	100,00		
				Presentase Lulusan SMA yang Melanjutkan ke Perguruan Tinggi (Satuan : %)	55	55	100,00		
				Angka Kelulusan SMA (Satuan : %)	99,28	99,28	100,00		
				Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMA IPS di KCD Kabupaten Lebak (Satuan : %)	42,34	0	0	Sesuai Dengan Surat Edaran Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Peniadaan Ujian Nasional Dan Ujian Kesetaraan Serta Pelaksanaan Ujian Nasional Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (covid-19) Untuk Ujian Nasional Di Tahun 2021 Ditiadakan.	Mengikuti Dan Menunggu Kebijakan Dan Regulasi Dari Pemerintah Pusat
				Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMK di KCD Kabupaten Lebak (Satuan : %)	42,45	0	0	Sesuai Dengan Surat Edaran Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Peniadaan Ujian Nasional Dan Ujian Kesetaraan Serta Pelaksanaan Ujian Nasional Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (covid-19) Untuk Ujian Nasional Di Tahun 2021 Ditiadakan.	Mengikuti Dan Menunggu Kebijakan Dan Regulasi Dari Pemerintah Pusat
				Persentase SMK yang Menerapkan link and Match (Satuan : %)	68	68	100,00	Jumlah Industri Yang Terbatas Dibanding Dengan Jumlah Sekolah	Satu Industri Untuk Beberapa Sekolah
				Angka Kelulusan SMA (Satuan : %)	99,28	99,28	100,00		
				Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMA IPA di wilayah KCD Kota Cilegon, Kota Serang dan Kab. Serang (Satuan : %)	52,86	0	0	Sesuai Dengan Surat Edaran Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Peniadaan Ujian Nasional Dan Ujian Kesetaraan Serta Pelaksanaan Ujian Nasional Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (covid-19) Untuk Ujian Nasional Di Tahun 2021 Ditiadakan.	Mengikuti Dan Menunggu Kebijakan Dan Regulasi Dari Pemerintah Pusat
				Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMK di wilayah KCD Kota Cilegon, Kota Serang dan Kab. Serang (Satuan : %)	46,35	0	0	Sesuai Dengan Surat Edaran Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Peniadaan Ujian Nasional Dan Ujian Kesetaraan Serta Pelaksanaan Ujian Nasional Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona	Mengikuti Dan Menunggu Kebijakan Dan Regulasi Dari Pemerintah Pusat

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Virus Disease (covid-19) Untuk Ujian Nasional Di Tahun 2021 Ditiadakan.	
				Persentase SMK yang Menerapkan link and Match (Satuan : %)	68	68	100,00	Jumlah Industri Yang Terbatas Dibanding Dengan Jumlah Sekolah	Satu Industri Untuk Beberapa Sekolah
				Angka Kelulusan SMA (Satuan : %)	99,28	99,28	100,00		
				Cakupan Layanan Pendidikan Khusus di wilayah KCD Kota Tangerang dan Tangerang Selatan (Satuan : %)	100	0	0	Sesuai Dengan Surat Edaran Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Peniadaan Ujian Nasional Dan Ujian Kesetaraan Serta Pelaksanaan Ujian Nasional Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (covid-19) Untuk Ujian Nasional Di Tahun 2021 Ditiadakan.	Mengikuti Dan Menunggu Kebijakan Dan Regulasi Dari Pemerintah Pusat
				Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMA IPS di di wilayah KCD Kota Tangerang dan Tangerang Selatan (Satuan : %)	56,86	0	0	Sesuai Dengan Surat Edaran Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Peniadaan Ujian Nasional Dan Ujian Kesetaraan Serta Pelaksanaan Ujian Nasional Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (covid-19) Untuk Ujian Nasional Di Tahun 2021 Ditiadakan.	Mengikuti Dan Menunggu Kebijakan Dan Regulasi Dari Pemerintah Pusat
				Persentase SMK yang Menerapkan link and Match (Satuan : %)	68	68	100,00	Jumlah Industri Yang Terbatas Dibanding Dengan Jumlah Sekolah	Satu Industri Untuk Beberapa Sekolah
			Program Pengembangan Kurikulum						
				Persentase pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi pendidikan dan Kebudayaan (Satuan : %)	100	100	100,00		
			Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan						
				Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) SMA (Satuan : %)	65,71	64,57	98,27	Uji Kompetensi Guru (ukg) Merupakan Program Dari Pemerintah Pusat (kemendikbud) Yang Di Lakukan Lima (5) Tahun Sekali, Sehingga Dalam Penentuan Target Dan Realisasi Mengalami Kesulitan.	Test Ukg Dilakukan Oleh Kemendikbud Ristek Setiap 5 Tahun Sekali, Sehingga Capaian Di Tahun 2021 Masih Menggunakan Angka Nilai Ukg Tahun 2019 Dan 2020
				Persentase guru SMA yang bersertifikat (Satuan : %)	99,05	55,5	56,03	Data Yang Di Hitung Adalah Guru Yang Bersertifikasi Yang Menggunakan Aplikasi Sim Tunjangan Guru (simtun) Sedangkan Data Guru Yang Bersertifiat Belum Jelas Dalam Definisi Operasional (do)	1. Sertifikat Pendidik Guru Merupakan Program Pemerintah Pusat (kemendikbud) Yang Diberikan Kepada Daerah Yang Menggunakan Kuota Nasional Pertahun Dengan Jumlah Yang Berbeda -â€ Beda Sesuai Dengan Kemampuan Anggaran

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<p>Pemerintah Pusat. Adapun Jumlah Kuota Yang Diberikan Ke Daerah Tiap Tahun Akan Mengikuti Perubahan Sejumlah Kuota Yang Di Anggarakan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sesuai Dengan Jumlah Data Yang Ada Di Daerah Yang Tercatat Di Sistem Dapodik, Sehingga Dalam Penentuan Target Dan Realisasi Mengalami Kesulitan Karena Tidak Ada Kepastian Jumlah Data Yang Sama. 2. Untuk Mendapat Sertifikat Pendidik Bagi Guru Harus Mengikut Program Ppg Dengan Biaya Sekitar 7.500.000 (tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Belum Termasuk Biaya Pribadi (transport, Biaya Hidup Dan Lain-lain) Yang Sampai Saat Ini Masih Di Subsidi Oleh Pemerintah Pusat Dan Di Beban Ke Kepada Peserta Yang Di Harapkan Bantuan Dari Pemerintah Daerah</p>
				Persentase guru SMK yang bersertifikat (Satuan : %)	73,66	36,2	49,14	<p>Data Yang Di Hitung Adalah Guru Yang Bersertifikasi Yang Menggunakan Aplikasi Sim Tunjangan Guru (simtun) Sedangkan Data Guru Yang Bersertifiat Belum Jelas Dalam Definisi Operasional (do)</p>	<p>1. Sertifikat Pendidik Guru Merupakan Program Pemerintah Pusat (kemendikbud) Yang Diberikan Kepada Daerah Yang Menggunakan Kuota Nasional Pertahun Dengan Jumlah Yang Berbeda â€” Beda Sesuai Dengan Kemampuan Anggaran Pemerintah Pusat. Adapun Jumlah Kuota Yang Diberikan Ke Daerah Tiap Tahun Akan Mengikuti Perubahan Sejumlah Kuota Yang Di Anggarakan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sesuai Dengan Jumlah Data Yang Ada Di Daerah Yang Tercatat Di Sistem Dapodik, Sehingga Dalam Penentuan Target Dan Realisasi Mengalami Kesulitan Karena Tidak Ada Kepastian Jumlah Data Yang Sama. 2. Untuk Mendapat Sertifikat</p>

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Pendidik Bagi Guru Harus Mengikuti Program Ppg Dengan Biaya Sekitar 7.500.000 (tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Belum Termasuk Biaya Pribadi (transport, Biaya Hidup Dan Lain-lain) Yang Sampai Saat Ini Masih Di Subsidi Oleh Pemerintah Pusat Dan Di Beban Ke Kepada Peserta Yang Di Harapkan Bantuan Dari Pemerintah Daerah
2	1.2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
		Dinas Kesehatan							
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi						
				Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan : %)	100	100	100,00		
				Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan : %)	100	100	100,00		
				Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %)	100	100	100,00		
				Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %)	100	100	100,00		
				Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (RSUD BANTEN) (Satuan : %)	100	100	100,00		
				Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas	100	100	100,00		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				dan fungsi SKPD (RSUD BANTEN) (Satuan : %)					
				Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (RSUD BANTEN) (Satuan : %)	100	100	100,00		
				Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (RSUD BANTEN) (Satuan : %)	100	100	100,00		
				Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (RSUD MALINGPING) (Satuan : %)	100	100	100,00		
				Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (RSUD MALINGPING) (Satuan : %)	100	100	100,00		
				Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (RSUD MALINGPING) (Satuan : %)	100	100	100,00		
				Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (RSUD MALINGPING) (Satuan : %)	100	100	100,00		
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat						
				Capaian kelengkapan pengisian Rekam Medik 24 Jam setelah selesai pelayanan (Satuan : %)	90	90	100,00		
				Capaian Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (Satuan : %)	90	90	100,00		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Capaian SPM Pelayanan Keperawatan RSUD Malingping (Satuan : %)	100	100	100,00		
				Capaian SPM Pelayanan Medis dan SPM pelayanan keperawatan RSUD Banten (Satuan : %)	93	93	100,00		
				Capaian SPM penunjang RSUD Malingping (Satuan : %)	100	100	100,00		
				Capaian Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (Satuan : %)	90	88,2	98,00	Untuk Rehabilitasi Gedung Rawat Inap Yang Dibiayai Dana Dak Baru Terealisasi 55% Karena Penyedia Tdk Menyelesaikan Pekerjaan Sesuai Waktu Kontrak	-pembayaran Berdasarkan Progres Pekerjaan - Dianggarkan Kembali Pada Dana Blud Pd Tahun 2022
				Capaian kelengkapan pengisian Rekam Medik 24 Jam setelah selesai pelayanan (Satuan : %)	90	90	100,00		
				Capaian SPM Pelayanan Medis RSUD Malingping (Satuan : %)	100	100	100,00		
				Capaian SPM penunjang RSUD Malingping (Satuan : %)	100	100	100,00	Penyerapan Anggaran Sesuai Dengan Hasil Lelang Dan Nilai Kontrak Pekerjaan. Sisa Anggaran Merupakan Efiseinsi Dari Nilai Kontrak	Pada Tahun Yang Akan Datang Akan Dilakukan Evaluasi Harga Diperubahan Anggaran Agar Tidak Terjadi Efisiensi Yang Terlalu Besar
				Persentase Jenis Pemeriksaan Laboratorium kesehatan yang di layani (Satuan : %)	53	100	188,68		
				Inciden Rate DBD (Per 100.000 Penduduk) (Satuan : Kasus)	-49	-49	100		
				keberhasilan Pengobatan TB (success rate) di Kab/Kota (Satuan : %)	90	100	111,11		
				Persentase Kab/Kota yang Mencapai Imunisasi Dasar Lengkap (IDL 95%) (Satuan : %)	87,50	100	114,29		
				Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak dan beresiko pada kondisi kejadian luar biasa provinsi (Satuan : %)	100	100	100,00		
				Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi (Satuan : %)	100	100	100,00		
				Pevalensi Hipertensi (Satuan : %)	19	19	100,00		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Presentase Penduduk yang mendapatkan Jaminan Pelayanan Kesehatan (Satuan : %)	100	100	100,00		
				Prevalensi HIV (Satuan : %)	-0,50	-0,50	100		
				Terlaksananya gerakan bebas pasung di kab/kota (Satuan : Kab/Kota)	8	8	100		
				Presentase Pemenuhan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan (Satuan : %)	100	100	100,00		
				Persentase Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (Satuan : %)	90	100	111,11		
				Prevalensi Stunting (Satuan : %)	23,60	96,33	406,78	Pandemi Covid. Apabila Menggunakan Perhitungan Eppgm Capaian Stunting Hanya 7,28% .	Intervensi Untuk Tahun Depan Harus Lebi Digalakkan Lagi
				Capaian Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (Satuan : %)	90	100	111,11		
				Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi (FKTP, FKRTL, Laboratorium) (Satuan : %)	90	100	111,11		
				Persentase Pembangunan Rumah Sakit Banten Selatan (Satuan : %)	50	100	200,00		
				Persentase Terbangunnya Rumah Sakit Jiwa dan Pusat Rehabilitasi Ketergantungan Obat (Satuan : %)	75	100	133,33		
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan						
				Jumlah Dokter/Dokter Gigi, Tenaga Kesehatan yang diRekrut dan ditingkatkan Kompetensinya (Satuan : Orang)	470	100	21,28		
				Cakupan Terlatihnya SDM Kesehatan dan Masyarakat (Satuan : Orang)	150	100	66,67		
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman						
				Persentase Pembinaan Sarana Kefarmasian (Satuan : %)	80	100	125,00		
			Program Pemberdayaan						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Masyarakat Bidang Kesehatan						
				Cakupan Kabupaten/Kota Sehat (Satuan : Kab/Kota)	8	100	1.250,00		
3	1.3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi						
				Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan : %)	100	100	100,00		
				Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan : %)	100	100	100,00		
				Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %)	100	100	100,00		
				Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %)	100	100	100,00		
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (sda)						
				Luas Layanan Jaringan Irigasi Teknis Provinsi (Satuan : ha)	19.387,46	16.411,00	82,52	Adanya Pengurangan Anggaran Akibat Pandemi Yang Belakangan Terjadi	Pandemi Merupakan Permasalahan Yang Terjadi Diluar Kendali Manusia
				Persentase operasi dan pemeliharaan prasarana sumberdaya air pada WS Cidurian-Cisadane (Satuan : %)	100	100,00	100,00		
				Persentase operasi dan pemeliharaan prasarana	100	100,00	100,00		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				sumberdaya air pada WS Ciujung-Cidanau (Satuan : %)					
				Cakupan Pemulihan Pencegahan banjir (Satuan : %)	37,39	27,28	72,96	Dampak Refocusing Anggaran Akibat Pandemi Covid 19 Dan Perpindahan Sumber Pendanaan Yang Semula Dibiayai Oleh Pt. SMI Beralih Ke Apbdp 2021	Beberapa Pekerjaan Yang Terkena Refocusing Di Tahun 2021 Dilaksanakan Kembali Di Tahun 2022
				Cakupan Pemulihan Pencegahan Abrasi (Satuan : %)	68,06	60,34	88,16	Dampak Refocusing Anggaran Akibat Pandemi Covid-19 Dan Perpindahan Sumber Pendanaan Yang Semula Dibiayai Oleh Pt.smi Beralih Ke Apbdp 2021	Beberapa Pekerjaan Yang Terkena Refocusing Di Tahun 2021 Dilaksanakan Kembali Di Tahun 2022
				Persentase operasi dan pemeliharaan prasarana sumberdaya air pada WS Ciliman-Cisawarna (Satuan : %)	100	100	100,00		
			Program Penyelenggaraan Jalan						
				Persentase pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah Pandeglang (Satuan : %)	100	100	100,00		
				Persentase pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah Tangerang (Satuan : %)	100	100	100,00		
				Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap (Satuan : %)	100	98,004	98,00	Dampak Refocusing Anggaran Akibat Pandemi Covid 19 Dan Perpindahan Sumber Pendanaan Yang Semula Dibiayai Oleh Pt. SMI Beralih Ke Apbdp 2021, Rehabilitasi 5 Ruas Jalan Tidak Jadi Dilaksanakan Dan Dilakukan Optimasi Panjang Penanganan Jalan Disesuaikan Dengan Anggaran Yang Ada.	Menganggarkan Kembali Ruas Jalan Prioritas Untuk Di Rehabilitasi Di Tahun Anggaran 2022
				Persentase pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah Lebak (Satuan : %)	100	100	100,00		
				Persentase pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah Serang Cilegon (Satuan : %)	100	100	100,00		
				Persentase Jalan dan Jembatan Provinsi Yang Memenuhi Standar Teknis (min perkerasan 7 m) (Satuan : %)	67,53	82,08	121,55		
				Persentase Jembatan Provinsi Dalam Kondisi Mantap (Satuan : %)	95,9	93,60	97,60	Dampak Refocusing Anggaran Akibat Pandemi Covid 19 Dan Perpindahan Sumber Pendanaan Yang Semula Dibiayai Oleh Pt. SMI Beralih Ke Apbdp 2021, Pembangunan 3 (tiga)	Enganggarkan Kembali Ruas Jalan Prioritas Untuk Di Rehabilitasi Di Tahun Anggaran 2022

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Dan Penggantian 2 (dua) Jembatan Batal Dilaksanakan.	
				Prosentase Penyelesaian Jalan Baru (15 Km) (Satuan : %)	35	0	0	Lahan Belum Tersedia. Dalam Pengadaan Lahan Mengalami Banyak Kendala Antara Lain: Penolakan Masyarakat, Ketidaksepakatan Harga Dan Proses Pengadaan Sangat Bergantung Pada Bpn. Pada Tahun Anggaran 2021, Anggaran Pengadaan Lahan Dan Pembangunan Jalan Baru Terkena Refocusing. Pembangunan Ruas Jalan Banten Lama " Tonjong, Ruas Boru " Cikeusal Dan Ruas Palima - Baros Tidak Jadi Dilaksanakan.	Pembangunan Jalan Baru Yang Menajdi Prioritas Akan Dilaksanakan Pada Tahun Anggaran 2022
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi						
				Presentase badan usaha jasa konstruksi yang memenuhi standar (Satuan : %)	40	33,87	84,67	Pencapaian Realisasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Yang Memenuhi Standar Di Pengaruhi Oleh Perubahan Lembaga Penerbit Sertifikat Badan Usaha Yang Semula Berada Di Tingkat Provinsi Melalui Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Pada Tahun 2021 Di Alihkan Ke Pada Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Sehingga Pencapaian Belum Dilaksanakan Secara Maksimal	
				Persentase layanan pengujian bahan dan konstruksi bangunan (Satuan : %)	100	100	100,00		
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang						
				Persentase Tersusunnya Perda Rencana Tata Ruang (RTR) pada 8 Kawasan Strategis Provinsi (Satuan : %)	75	20	26,67	Penyusunan 8 Perda Tidak Dapat Direalisasikan Karena Wewenang Pemeintah Daerah Provinsi Dibatalkan Oleh Undang Undang No. 11 Tahun 2010	Rencana Penyusunan Pergub Rencana Kawasan Strategis Provinsi Banten
				Presentase Kesesuaian Pembinaan Pemanfaatan Ruang (Satuan : %)	100	90	90,00	Perijinan Yg Diberikan Oleh Kab.kota Tidak Melalui Rekomendasi Persetujuan Provinsi	Penyusunan Perda Rtrw 2022 S/d 2042
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Minum (Satuan : %)	88,04	93,51	106,21	Melampaui Target, Data Berdasarkan Capaian Dari Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, Maret Tahun 2021	
			Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional						
				cakupan penyediaan prasarana persampahan Regional (Satuan : %)	20	10,00	50,00	Target Tidak Tercapai, Sampai Tahun 2021 Masih Dalam Tahapan Perencanaan : 1. Kajian Industri Pengolahan Sampah Wkp I. Wkp Iii 2.master Plan Industri Pengelolaan Sampah Wkp Ii 3. Studi Pengadaan Lahan Industri Pengolahan Sampah Wkp 1 Dan Wkp Iii 4. Studi Pengadaan Lahan Industri Pengolahan Sampah Wkp Ii Pengadaan Lahan Seluas 18.571 M2 Tidak Direalisasikan Karena Tidak Mencukupi Waktu Dari Tahapan Perencanaan Dan Pelaksanaannya	Tahun 2022 Dilaksanakan Masterplan Industri Pengolahan Sampah Untuk Pembangunan Pengolahan Sampah Tahun 2023
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah						
				Cakupan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota (Satuan : %)	15	10,00	66,67	Target Tidak Tercapai, Sampai Tahun 2021 Pekerjaan Yang Dilaksanakan Pengembangan Ipal Banten Lama Dan Kajian Ipal Regional	Tahun 2022 Akan Dilaksanakan Ded Ipal Kawasan Strategis Kp3b Dan Pembangunan Ipal Kawasan Strategis Kp3b
			Program Penataan Bangunan Gedung						
				persentase pengelolaan gedung strategis Provinsi (Satuan : %)	89	89,00	100,00	Target Telah Tercapai, Pembangunan Stadion Di Kawasan Sport Centre Pada Tahun Anggaran 2021 Progres Fisik 100%, Namun Untuk Progress Fisik S.d Ta 2021 (multi Years) Sebesar 88.745%	Melanjutkan Pembangunan Stadion Di Kawasan Sport Centre
			Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya						
				persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi (Satuan : %)	88	88,00	100,00	Target Telah Tercapai	
		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi						
				Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan : %)	100	100	100,00		
				Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan : %)	100	100	100,00		
				Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %)	100	100	100,00		
				Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %)	100	100	100,00		
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (sda)						
				Luas Layanan Jaringan Irigasi Teknis Provinsi (Satuan : ha)	19.387,46	16.411,00	82,52	Adanya Pengurangan Anggaran Akibat Pandemi Yang Belakangan Terjadi	Pandemi Merupakan Permasalahan Yang Terjadi Diluar Kendali Manusia
				Persentase operasi dan pemeliharaan prasarana sumberdaya air pada WS Cidurian-Cisadane (Satuan : %)	100	100,00	100,00		
				Persentase operasi dan pemeliharaan prasarana sumberdaya air pada WS Ciujung-Cidanau (Satuan : %)	100	100,00	100,00		
				Cakupan Pemulihan Pencegahan banjir (Satuan : %)	37,39	27,28	72,96	Dampak Refocusing Anggaran Akibat Pandemi Covid 19 Dan Perpindahan Sumber Pendanaan Yang Semula Dibiayai Oleh Pt. Smi Beralih Ke Apbdp 2021	Beberapa Pekerjaan Yang Terkena Refocusing Di Tahun 2021 Dilaksanakan Kembali Di Tahun 2022
				Cakupan Pemulihan Pencegahan Abrasi (Satuan : %)	68,06	60,34	88,16	Dampak Refocusing Anggaran Akibat Pandemi Covid-19 Dan Perpindahan Sumber Pendanaan Yang Semula Dibiayai Oleh Pt.smi Beralih Ke Apbdp 2021	Beberapa Pekerjaan Yang Terkena Refocusing Di Tahun 2021 Dilaksanakan Kembali Di Tahun 2022

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Persentase operasi dan pemeliharaan prasarana sumberdaya air pada WS Ciliman-Cisawarna (Satuan : %)	100	100	100,00		
			Program Penyelenggaraan Jalan						
				Persentase pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah Pandeglang (Satuan : %)	100	100	100,00		
				Persentase pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah Tangerang (Satuan : %)	100	100	100,00		
				Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap (Satuan : %)	100	98,004	98,00	Dampak Refocusing Anggaran Akibat Pandemi Covid 19 Dan Perpindahan Sumber Pendanaan Yang Semula Dibiayai Oleh Pt. Smi Beralih Ke Apbdp 2021, Rehabilitasi 5 Ruas Jalan Tidak Jadi Dilaksanakan Dan Dilakukan Optimasi Panjang Penanganan Jalan Disesuaikan Dengan Anggaran Yang Ada.	Menganggarkan Kembali Ruas Jalan Prioritas Untuk Di Rehabilitasi Di Tahun Anggaran 2022
				Persentase pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah Lebak (Satuan : %)	100	100	100,00		
				Persentase pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah Serang Cilegon (Satuan : %)	100	100	100,00		
				Persentase Jalan dan Jembatan Provinsi Yang Memenuhi Standar Teknis (min perkerasan 7 m) (Satuan : %)	67,53	82,08	121,55		
				Persentase Jembatan Provinsi Dalam Kondisi Mantap (Satuan : %)	95,9	93,60	97,60	Dampak Refocusing Anggaran Akibat Pandemi Covid 19 Dan Perpindahan Sumber Pendanaan Yang Semula Dibiayai Oleh Pt. Smi Beralih Ke Apbdp 2021, Pembangunan 3 (tiga) Dan Penggantian 2 (dua) Jembatan Batal Dilaksanakan.	Enganggarkan Kembali Ruas Jalan Prioritas Untuk Di Rehabilitasi Di Tahun Anggaran 2022
				Prosentase Penyelesaian Jalan Baru (15 Km) (Satuan : %)	35	0		Lahan Belum Tersedia. Dalam Pengadaan Lahan Mengalami Banyak Kendala Antara Lain: Penolakan Masyarakat, Ketidaksepatan Harga Dan Proses Pengadaan Sangat Bergantung Pada Bpn. Pada Tahun Anggaran 2021, Anggaran Pengadaan Lahan Dan Pembangunan Jalan Baru Terkena Refocusing. Pembangunan Ruas Jalan Banten	Pembangunan Jalan Baru Yang Menajdi Prioritas Akan Dilaksanakan Pada Tahun Anggaran 2022

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Lama â€” Tonjong, Ruas Boru â€” Cikeusal Dan Ruas Palima - Baros Tidak Jadi Dilaksanakan.	
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi						
				Presentase badan usaha jasa konstruksi yang memenuhi standar (Satuan : %)	40	33,87	84,67	Pencapaian Realisasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Yang Memenuhi Standar Di Pengaruhi Oleh Perubahan Lembaga Penerbit Sertifikat Badan Usaha Yang Semula Berada Di Tingkat Provinsi Melalui Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Pada Tahun 2021 Di Alihkan Ke Pada Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Sehingga Pencapaian Belum Dilaksanakan Secara Maksimal	
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang						
				Persentase Tersusunnya Perda Rencana Tata Ruang (RTR) pada 8 Kawasan Strategis Provinsi (Satuan : %)	75	20	26,67	Penyusunan 8 Perda Tidak Dapat Direalisasikan Karena Wewenang Pemeintah Daerah Provinsi Dibatalkan Oleh Undang Undang No. 11 Tahun 2010	Rencana Penyusunan Pergub Rencana Kawasan Strategis Provinsi Banten
				Presentase Kesesuaian Pembinaan Pemanfaatan Ruang (Satuan : %)	100	90	90,00	Perijinan Yg Diberikan Oleh Kab.kota Tidak Melalui Rekomendasi Persetujuan Provinsi	Penyusunan Perda Rtrw 2022 S/d 2042
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum						
				Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Minum (Satuan : %)	88,04	93,51	106,21	Melampaui Target, Data Berdasarkan Capaian Dari Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, Maret Tahun 2021	
			Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional						
				cakupan penyediaan prasarana persampahan Regional (Satuan : %)	20	10,00	50,00	Target Tidak Tercapai, Sampai Tahun 2021 Masih Dalam Tahapan Perencanaan : 1. Kajian Industri Pengolahan Sampah Wkp I. Wkp Iii 2.master Plan Industri Pengelolaan Sampah Wkp Ii 3. Studi Pengadaan Lahan Industri Pengolahan Sampah	Tahun 2022 Dilaksanakan Masterplan Industri Pengolahan Sampah Untuk Pembangunan Pengolahan Sampah Tahun 2023

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Wkp 1 Dan Wkp Iii 4. Studi Pengadaan Lahan Industri Pengolahan Sampah Wkp Ii Pengadaan Lahan Seluas 18.571 M2 Tidak Direalisasikan Karena Tidak Mencukupi Waktu Dari Tahapan Perencanaan Dan Pelaksanaannya	
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah						
				Cakupan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota (Satuan : %)	15	10,00	66,67	Target Tidak Tercapai, Sampai Tahun 2021 Pekerjaan Yang Dilaksanakan Pengembangan Ipal Banten Lama Dan Kajian Ipal Regional	Tahun 2022 Akan Dilaksanakan Ded Ipal Kawasan Strategis Kp3b Dan Pembangunan Ipal Kawasan Strategis Kp3b
			Program Penataan Bangunan Gedung						
				persentase pengelolaan gedung strategis Provinsi (Satuan : %)	89	89,00	100,00	Target Telah Tercapai, Pembangunan Stadion Di Kawasan Sport Centre Pada Tahun Anggaran 2021 Progres Fisik 100%, Namun Untuk Progress Fisik S.d Ta 2021 (multi Years) Sebesar 88.745%	Melanjutkan Pembangunan Stadion Di Kawasan Sport Centre
			Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya						
				persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi (Satuan : %)	88	88,00	100,00		
4	1.4 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman							
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi						
				Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan : %)	100	100,00	100,00		
				Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi	100	75,00	75,00	Target Tidak Tercapai, Dikarenakan Belanja Modal Yang Tidak Dilaksanakan, Yaitu : 1. Personal	Lebih Cermat Dalam Penyusunan Perencanaan

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				administrasi perangkat daerah (Satuan : %)				Coputer (pc) Sebanyak 12 Unit = Rp. 230.568.000. 2. Pengadaan Laptop/mote Book Sebanyak 5 Unit = Rp. 140.895.000 Belanja Modal Peralatan Mini Computer 3. Mesin Printer Sebanyak 12 Unit = Rp. 149.602.200 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 14 Mesin Printer Sebanyak 5 Unit = Rp. 28.800.000 Barang Tersebut Kenaikan Harganya Sudah Tinggi Sampai Dilakukan Pengadaan, Selain Itu Typenya Sudah Tidak Tersedia Target Kinerja 4 Laporan, Realisasi 3 Laporan. Maka Capaiannya Adalah $3/4 \times 100 = 75.00\%$	
				Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %)	100	83,33	83,33	Pendidikan Dan Pelatihan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Sudah Ada Penawarannya Dari Lembaga Diklat Pengadaan Barang/jasa Sesuai Standar Lkpp Ri, Namun Sudah Injury Time Target Kinerja 6 Dokumen, Realisasi 5 Dokumen, Maka Capaiannya Adalah $5/6 \times 100 = 83.33\%$	Lebih Cermat Dalam Penyusunan Perencanaan
				Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %)	100	100,00	100,00		
			Program Pengembangan Perumahan						
				Cakupan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Relokasi Korban Provinsi (Satuan : %)	100,00	25,78	25,78	1. Pembangunan Pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana (risha) Sudah Terbangun Sebanyak 66 Unit Dari Total Target Tahunan Sebanyak 116 Unit Dan Sebanyak 50 Unit Tidak Dapat Dilaksanakan Dikarenakan Keterbatasan Waktu 2. Pembangunan Pada Sub Kegiatan Pembangunan Rumah (pk-rth) Bagi Korban Bencana Tidak Dapat Dilaksanakan Dikarenakan Keterbatasan Waktu Realisasi Capaian : - Target : $116 + 140 = 256$ Unit - Realisasi: 66 Unit Jadi : $66 / 256 \times 100 = 25.78\%$	Melanjutkan Proses Adminstrasi Dengan Melaksanakan : 1. Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana, Perlu Adanya Peningkatan Sdm Untuk Pemasangan Panel Struktur Risha Melalui Pelatihan Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Perkim Agar Bersertifikat 2. Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana Saat Ini Sedang Dalam Proses Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Pembangunan

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Program Kawasan Permukiman						Bersama Tni Pada Awal Tahun 2022
				Luas Kawasan Kumuh yang ditata (Satuan : Ha)	333,30	292,04	87,70	Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi (diatas 10 S.d Dibawah 10 Ha Tidak Dapat Dilaksanakan Dikarenakan Menggunakan Anggaran Pt.smi. Namun Capain Pengurangan Kumuh Secara Komulatif sampai Dengan Tahun 2021 Dihitung Dari Hasil Kolaborasi Dengan Pemerintah Pusat Melalui Program Kotaku Dan Pemerintah Kabupaten/kota Sebesar 35.63%. Realisasi Capaian Pada Tahun 2020 Sebesar 256.41 Ha, Sehingga Realisasi Pada Tahun 2021 Adalah 256.41+35.63=292.04 Ha.	Melanjutkan Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (sepuluh) Ha Sampai Dengan Di Bawah 15 (lima Belas) Ha Pada Tahun 2022
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (psu)						
				cakupan penyediaan perumahan dan PSU permukiman (Satuan : %)	33,33	32,29	96,88	Target Tidak Tercapai, Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Di Permukiman Untuk Menunjang Fungsi Permukiman 41 Paket Pekerjaan Tidak Dapat Dilaksanakan Dikarenakan Adanya Kesalahan Penginputan Lokasi, Sehingga Lokasi Tidak Ditemukan Dan Juga Overlapping Realisasi Capaian : $1269/1310 \times 33.33\% = 32.29\%$	Lebih Cermat Dan Teliti Dalam Menginput Data Paket Pekerjaan
5	1.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
		Satuan Polisi Pamong Praja							
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi						
				Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen	100	100,00	100,00		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan : %)					
				Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan : %)	100	100,00	100,00		
				Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %)	100	100,00	100,00		
				Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %)	100	100,00	100,00		
			Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum						
				Presentase Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah (Satuan : %)	80	80	100,00		
				cakupan pelayanan ketenteraman ketertiban umum daerah provinsi (Satuan : %)	100	100	100,00		
				Cakupan perlindungan masyarakat (Satuan : %)	100	100	100,00		
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran						
				Cakupan koordinasi penanganan bencana kebakaran (Satuan : %)	100	100	100,00		
			Program Penanggulangan Bencana						
				Indek Ketahanan Daerah (Satuan : %)	0,53	0,54	101,89	1.karena Untuk Dokumen Rpb Belum Dapat Sampai Di Legalkan Pada Tahun 2021 2.untuk Peta Kapasitas Dan Risiko Pada Waktu Penilaian Ikd Belum Selesai 3.masih Banyak Data Dukung Yang Belum Bisa Terpenuhi Untuk Menjawab 7 Prioritas, 71	1.dokumen Rpb Pada Tahun 2022 Akan Di Mutahirkan Dan Di Legalkan 2. Untuk Peta Kapasitas Dan Risiko Sudah Selesai

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Indikator Dan 284 Pertanyaan Dalam Pengukuran Ikd; 4.banyak Opd Provinsi Banten Yang Terlibat Dalam Mendukung Pengukuran Ikd, Namun Belum Menjadi Atensi Penuh Terkait Kebencanaan Ini Oleh Opd Yang Ada.	
				Persentase bantuan logistik dan dukungan peralatan penanggulangan bencana (Satuan : %)	100	100,00	100,00		
				Persentase penanganan darurat bencana (Satuan : %)	100	100	100,00	Dalam Pelaksanaan Kendala Waktu Karena Ada Dianggarkan Perubahan Khususnya Sub Kegiatan Bencana Non Alam	Penanganan Bencana Non Alam Perlu Dilanjutkan Apabila Pandemi Berlanjut
				Persentase penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satuan : %)	100	88,88	88,88	Adanya Ppkm Dan Recofusing Anggaran Untuk Wilayah Bpbd Tangerang Selatan	
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah							
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi						
				Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan : %)	100	100,00	100,00		
				Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan : %)	100	100,00	100,00		
				Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %)	100	100,00	100,00	Sub Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Tidak Diserap Karna Pandemi Covid 19 Sehingga Pengiriman Peserta Diklat Dilakukan Secara Daring/ Zoom	
				Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %)	100	100,00	100,00		
			Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Presentase Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah (Satuan : %)	80	80	100,00		
				cakupan pelayanan ketentrangan ketertiban umum daerah provinsi (Satuan : %)	100	100	100,00		
				Cakupan perlindungan masyarakat (Satuan : %)	100	100	100,00		
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran						
				Cakupan koordinasi penanganan bencana kebakaran (Satuan : %)	100	100	100,00		
			Program Penanggulangan Bencana						
				Indek Ketahanan Daerah (Satuan : %)	0,53	0,54	101,89	1.karena Untuk Dokumen Rpb Belum Dapat Sampai Di Legalkan Pada Tahun 2021 2.untuk Peta Kapasitas Dan Risiko Pada Waktu Penilaian Ikd Belum Selesai 3.masih Banyak Data Dukung Yang Belum Bisa Terpenuhi Untuk Menjawab 7 Prioritas, 71 Indikator Dan 284 Pertanyaan Dalam Pengukuran Ikd; 4.banyak Opd Provinsi Banten Yang Terlibat Dalam Mendukung Pengukuran Ikd, Namun Belum Menjadi Atensi Penuh Terkait Kebencanaan Ini Oleh Opd Yang Ada.	1.dokumen Rpb Pada Tahun 2022 Akan Di Mutakhirkan Dan Di Legalkan 2. Untuk Peta Kapasiatas Dan Risiko Sudah Selesai
				Persentase bantuan logistik dan dukungan peralatan penanggulangan bencana (Satuan : %)	100	100,00	100,00		
				Persentase penanganan darurat bencana (Satuan : %)	100	100	100,00	Dalam Pelaksanaan Kendala Waktu Karena Ada Dianggaran Perubahan Khususnya Sub Kegiatan Bencana Non Alam	Penanganan Bencana Non Alam Perlu Dilanjutkan Apabila Pandemi Berlanjut
				Persentase penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satuan : %)	100	88,88	88,88	Adanya Ppkm Dan Recofusing Anggaran Untuk Wilayah Bpbd Tangerang Selatan	
6	1.6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
		Dinas Sosial							
			Program Penunjang Urusan						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Pemerintahan Daerah Provinsi						
				Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan : %)	100	100,00	100,00		
				Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan : %)	100	100,00	100,00		
				Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %)	100	100,00	100,00		
				Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %)	100	100,00	100,00		
			Program Pemberdayaan Sosial						
				Cakupan PSKS yang meningkat Partisipasi sosialnya (Satuan : Orang)	1,483	1089,00	73.581,08	Terkait Dengan Keterbatasan Anggaran Sehingga Target Renstra Tidak Terpenuhi	Hutang Kinerja Akan Dilaksanakan Di Tahun 2022
			Program Rehabilitasi Sosial						
				Cakupan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial (khususnya gelandang dan pengemis) dan penyandang disabilitas telantar di dalam panti (Satuan : %)	100	100	100,00		
				Cakupan PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial (Satuan : %)	718	685,00	95,40	Adanya Refocusing Anggaran Maka Target Kinerja Tidak Tercapai	Adanya Penambahan Anggaran Untuk Tercapainya Target Kinerja
				Cakupan perlindungan dan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar dan anak telantar di dalam panti (Satuan : %)	100	100	100,00		
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial						
				Cakupan Keluarga miskin yang mendapatkan jaminan sosial (Satuan : KK)	50,000	49.958,00	98,00	Terdapat Sebanyak 42 Penerima Non Eligible Dikarenakan Sudah Mampu Dan Atau Sudah Mendapatkan Bantuan Sejenis (pkh) Dari Apbn.	Sinkronisasi Data Dengan Kementerian Sosial.

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Program Penanganan Bencana						
				Cakupan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi (Satuan : Orang)	1300	1630	125,38		
II	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar								
1	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan							
			Program Pengembangan Kebudayaan						
				Cakupan Pelestarian Nilai-Nilai Sejarah dan Warisan Budaya (Satuan : %)	100	56.88	56.88	Karena Ketercapaian Kegiatan Pelestarian Nilai-nilai Sejarah Dan Warisan Budaya Melibatkan Banyak Orang, Tidak Memungkinkan Dilaksanakan Dimasa Pandemi	Mendorong Stakeholder Di Kabupaten/kota Di Provinsi Banten Dalam Upaya Pelibatan Pelestarian Nilai-nilai Budaya Sejarah Dan Tradisi
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional						
				Persentase Kebijakan di bidang Pembinaan Kesenian dan Bahasa yang diimplementasikan (Satuan : %)	100	50.00	50.00	Karena Kegiatan Melibatkan Banyak Orang Yg Tidak Memungkinkan Dimasa Pandemi	
			Program Pengelolaan Permuseuman						
				Persentase Kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya dan pengelolaan museum yang diimplementasikan (Satuan : %)	100	100	100.00		
2	2.7 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								
		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi						
				Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan : %)	100	100	100.00		
				Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan : %)	100	100	100.00		
				Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %)	100	100	100.00		
				Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %)	100	100	100.00		
			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja						
				Capaian Pelatihan dan kompetensi kerja (Satuan : %)	1.28	1.28	100.00		
				Capaian Pelatihan dan Kompetensi Kerja Berbasis Masyarakat (Satuan : %)	1.13	1.13	100.00		
			Program Penempatan Tenaga Kerja						
				Capaian Kesempatan Kerja (Satuan : %)	16.18	11.40	70.46		
			Program Hubungan Industrial						
				Capaian Hubungan Industrial (Satuan : %)	6.17	2.40	38.90		
				Capaian Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Satuan : %)	9.55	10	104.71		
				Capaian Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja (Satuan : %)	10	10	100.00		
			Program Pengawasan Ketenagakerjaan						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Capaian Perlindungan Kondisi Lingkungan Kerja (Satuan : %)	3.11	0.90	28.94		
3	2.8 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana							
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi						
				Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan : %)	100	100	100.00		
				Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan : %)	100	100	100.00		
				Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %)	100	100	100.00		
				Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %)	100	100	100.00		
			Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan						
				Persentase Keterlibatan Perempuan di Parleman (Satuan : %)	16.47	16.47	100.00		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Persentase Peningkatan Kontribusi Perempuan Di Bidang Ekonomi (Satuan : %)	33.13	33.13	100.00		
			Program Perlindungan Perempuan						
				Persentase Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan (Satuan : %)	100	100	100.00		
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga						
				Persentase Peningkatan Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Perempuan (Satuan : %)	20	20	100.00		
			Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak						
				Persentase Peningkatan Lembaga Pemerintah Tingkat Daerah Provinsi Yang Responsif Gender (Satuan : %)	93.33	93.33	100.00		
			Program Pemenuhan Hak Anak (pha)						
				Persentase Pengembangan Kab/Kota menuju KLA Kategori Nindya (Satuan : %)	37.5	37.5	100.00		
			Program Perlindungan Khusus Anak						
				Persentase Peningkatan Sinergitas Program dan Kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak (Satuan : %)	37.5	37.5	100.00		
4	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		dan Keluarga Berencana							
			Program Pendaftaran Penduduk						
				Prosentase Fasilitas Dalam Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP-el di Kab/Kota (Satuan : %)	87.5	87.5	100.00		
			Program Pencatatan Sipil						
				Prosentase Fasilitas Pencapaian Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 - 18 Tahun (Satuan : %)	100	100	100.00		
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						
				Persentase Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Oleh SKPD Provinsi (Satuan : %)	91.18	91.18	100.00		
			Program Pengelolaan Profil Kependudukan						
				Persentase Pengelolaan Administrasi Kependudukan Berbasis SIAK versi ter-update (Satuan : %)	100	100	100.00		
5	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana							
			Program Pengendalian Penduduk						
				Persentase perangkat daerah Provinsi yang memanfaatkan	100	100	100.00		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Dokumen kebijakan kependudukan (Satuan : %)					
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (kb)						
				Persentase peserta KB Aktif (Satuan : %)	0.03	0.03	100.00		
			Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (ks)						
				Peningkatan Persentase Kelompok Kegiatan Yang Melaksanakan 8 Fungsi Keluarga (Satuan : %)	4.7	4.7	100.00		
6	2.9 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								
		Dinas Ketahanan Pangan							
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi						
				Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan : %)	100	100	100.00		
				Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan : %)	100	100	100.00		
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat						
				Keterjangkauan/ akses pangan (Satuan : %)	85.5	80.21	93.81	Terbatasnya Prasarana Dan Sarana Perhubungan Untuk Menjangkau Seluruh Wilayah	Facilitasi Peningkatan Volume Bahan Pangan Yang Didistribusikan /disalurkan Melalui Pmt/ttic Dan Tmt/tti Dan Lembaga Lembaga Pengelolaan Dan Pengembangan Cadangan Pangan
			Program Penanganan Kerawanan Pangan						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Ketersediaan Pangan (Satuan : %)	94.5	90.45	95.71	Belum Teridentifikasinya Penduduk Rawan Pangan Secara Menyeluruh	Penajamaan Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan (lokasi) Dan Dijadikan Acuan Dalam Perencanaan Penangananganan Kerawanan Pangan
			Program Pengawasan Keamanan Pangan						
				Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang terdaftar atau tersertifikasi (Satuan : %)	10	17.44	174.40	Belum Memadai Dan Mencukupinya Fasilitas Uptd Sertifikasi Mutu Dan Keamanan Pangan	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pendukung (gedung Uptd Dan Labrotarium)
7	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan							
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi						
				Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan : %)	100	100.00	100.00		
				Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (%) (Satuan : %)	100	100.00	100.00		
				Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %)	100	100.00	100.00		
				Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %)	100	100.00	100.00		
			Program Pengendalian Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Persentase peningkatan pelayanan Laboratorium Lingkungan (Satuan : %)	17.6	17.6	100.00	- Terbatasnya Parameter Lingkup Akreditasi (parameter Udara Ambien Dan Parameter Udara Tidak Bergerak/cerobong) - Belum Dilakukannya Pelatihan Samling Kualitas Udara Tidak Bergerak (cerobong) Bagi Petugas Pengambil Sampel. - Keterbatasan Sdm Dalam Peningkatan Pengendalian Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Di Dhk Masih Terbatas	" - Penambahan Ruang Lingkup Parameter Kualitas Udara Ambien Pada Tahun 2022 - Mendorong Pelaksanaan Peningkatan Sdm Dalam Peningkatan Pengendalian Pencemaran Melalui Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (kehati)						
				Indeks Kualitas Udara (Satuan : Nilai)	68,8	74.14	109.03	Masih Tingginya Volume Kendaraan Dan Masih Banyak Nya Industri Yang Menggunakan Batubara,	Optimalisasi Dan Kerjasama Dengan Stkeholder Terkait Dalam Pengaturan Jumlah Kendaraan Serta Mendorong Industri Ramah Lingkungan
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (pplh)						
				Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan hidup (Satuan : %)	98	92.50	94.39	Terjadinya Perubahan Peraturan Terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup (kewenangan Ijin /persetujuan Teknis) Dan Tahun 2021 Merupakan Periode Penyesuaian Aturan Sehingga Industri Masih Banyak Yang Belum Menyesuaikan Terhadap Peraturan Terbaru (uu No 32 Th 2009 Ke Pp No 22 Tahun 2021) - Terbatasnya Pengawas Lingkungan Hidup	Melaksanakan Sosialisasi Terkait Perubahan Pertauran/ketentuan Perundangan Terbaru Dan Implementasinya - Penambahan Sdm Pengawas Lingkungan Hidup
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat						
				Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Satuan : Kelompok)	76	99.00	130.26	Adanya Perubahan Kewenangan, Perubahan Mekanisme Perizinan Dan Perubahan Tata Laksana Penyusunan, Pemeriksaan/penilaian Terkait Penghargaan Dan Penilaian Pengelolaan Lingkungan Hidup	Melaksanakan Sosialisasi Terkait Perubahan Pertauran/ketentuan - Koordinasi Dengan Stakeholder Terkait

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Program Pengelolaan Persampahan						
				Indeks Kualitas Air (Satuan : Nilai)	53	54.47	102.77	Keterbatasan Sarana Prasarana Dan Sdm Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Limbah B3 - Dan Kurangnya Kesadaran Masyarakat	Peningkatan Prasarana Dan Sarana Serta Sdm Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Limbah B3 - Upaya Peningkatan Kesadaran masyarakat
8	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi						
				Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan : %)	100	100	100.00		
				Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan : %)	100	100	100.00		
				Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %)	100	100	100.00		
				Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %)	100	100	100.00		
			Program Penataan Desa						
				Pendampingan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan yang diberdayakan di 48 desa berkembang (Satuan : %)	100.00	100	100.00		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Program Peningkatan Kerjasama Desa						
				Lembaga Ekonomi Masyarakat yang di berdayakan di 48 desa Tertinggal (Satuan : desa)	16	16	100.00		
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat						
				Lembaga Kemasyarakatan desa yang diberdayakan di 48 Desa tertinggal (Satuan : desa)	16	16	100.00		
9	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								
		Dinas Perhubungan							
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi						
				Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan : %)	100	97.62	97.62	Rad-grk Tidak Diselenggarakan Terkait Pandemi Covid-19	Pelaksanaan Kegiatan Mengikuti Kondisi Dan Anggaran Yang Tersedia
				Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan : %)	100	98	98.00	Memperhatikan Urgensi, Pemeliharaan Aset Tidak Terwujud Tidak Diselenggarakan Terkait Pandemi Covid-19	Pelaksanaan Kegiatan Mengikuti Kondisi Dan Anggaran Yang Tersedia
				Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %)	100	100.00	100.00		
				Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %)	100	100.00	100.00		
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Ilaj)						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Persentase Perencanaan Transportasi yang diterapkan (Satuan : %)	50	50	100.00	Perhitungan Target Persentase Perencanaan Transportasi Yang Deiterapkan 50% Sedangkan Capaian Indikator Program 100%	Perhitungan Capaian Tersebut Didapatkan Dari Pergub Iku, Dari Jumlah Perencanaan Transportasi Yang Diterapkan Dibagi Dokumen Perencanaan Yang Tersedia Dikalikan 100%
				Persentase Ketersediaan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jaringan Jalan (Satuan : %)	15	15.00	100.00		
				Persentase Pengendalian, penertiban dan pengawasan penyelenggaraan angkutan (Satuan : %)	100.00	100.00	100.00		
				Persentase Peningkatan Keselamatan Lalulintas (Satuan : %)	20	20.00	100.00		
				Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Sarana Transportasi Darat (Satuan : %)	20	19.97	99.85	Tidak Terlaksana Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Kota Dikarnakan Mengacu Pada Surat Edaran Gubernur Nomor : 800/1387-bkd/2021 Tanggal 21 Juni 2021 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dan Baatasan Berpergian Keluar Daerah Di Lingkungan Pemerintaah Provinsi Banten	Surat Edaran New Normal
				Persentase ketersediaan dan pemeliharaan Prasarana Transportasi (Satuan : %)	30.77	30.77	100.00	Adanya Keterlambatan Pembangunan Dan Pembayaran Untuk Pengadaan Halte	Optimalisasi Perencanaan Pekerjaan Yang Akan Datang
				Prosentase Pemenuhan kebutuhan angkutan massal (Satuan : %)	10	10.00	100.00	Pelaksanaan Kegiatan Berubah Tidak Sesuai Jadwal, Dikarenakan Situasi Pandemi Masih Dalam Level 3,	Diselenggarakan Pada Apbd-p Ta 2021 Dan Menyesuaikan Dengan Kondisi Level Ppkm.
			Program Pengelolaan Pelayaran						
				Persentase Ketersediaan dan Pengawasan Kepelabuhanan (Satuan : %)	100.00	100.00	100.00	Tidak Terlaksana Kegiatan Pembinaan Keselamatan Pelayaran Dikarenakan Mengacu Pada Surat Edaran Gubernur Nomor 800/1387-bkd/2021 Tnggal 21 Juni 2021 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dan Batasan Bepergian Keluar Daerah Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten	
				Persentase Pengelolaan Pelabuhan Pengumpan Regional (Satuan : %)	100.00	100.00	100.00	Tidak Terlaksana Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Kota Dikarenakan Pemberlakuan Ppkm	Menunggu Surat Edaran New Normal
				Persentase Pengendalian, Penertiban dan Pengawasan	100.00	87.77	87.77	Tidak Terlaksana Kegiatan Pembinaan Keselamatan Pelayaran Dikarenakan Mengacu Pada Surat	Tetap Melaksanakan Koordinasi Dengan Pihak - Pihak Terkait

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Keselamatan Pelayaran (Satuan : %)				Edaran Gubernur Nomor 800/1387-bkd/2021 Tnggal 21 Juni 2021 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dan Batasan Bepergian Keluar Daerah Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten	
				Persentase Pengelolaan Pelabuhan Pengumpan Regional (Satuan : %)	100.00	88.53	88.53	Tidak Terlaksana Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Kota Dikrnakan Perberlakuan Ppkm	Menunggu Surat Edaran New Normal
			Program Pengelolaan Perkeretaapian						
				Persentase Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian (Satuan : %)	15	15.00	100.00	Ada Beberapa Belanja Pendukung Tidak Dapat Dibelanjakan (sppd Luar Daerah) Terkait Pandemi Covid 19	Rasionalisasi Kegiatan Dan Anggaran Pada Perencanaan Berikutnya
10	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian							
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi						
				Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan : %)	100	100.00	100.00		
				Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan : %)	100	100.00	100.00		
				Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %)	100	100.00	100.00		
				Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %)	100	100.00	100.00		
			Program Pengelolaan						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Informasi Dan Komunikasi Publik						
				Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (Satuan : %)	80	100.00	125.00		
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika						
				Persentase penyediaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) (Satuan : %)	85.08	100.00	117.54		
				Persentase pengelolaan sarana dan prasarana Aplikasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) (Satuan : %)	85.08	94.74	111.35		
11	2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								
		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian							
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral						
				Ketersediaan Database Sektoral (Satuan : %)	75	100.00	133.33		
12	2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								
		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian							
			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi						
				Cakupan pengelolaan persandian dan keamanan informasi (Satuan : %)	80	80.95	101.19		
13	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>								
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi						
				Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan : %)	100	100	100.00		
				Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan : %)	100	100	100.00		
				Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %)	100	100	100.00		
				Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %)	100	100.00	100.00		
			Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi						
				Capaian Koperasi Aktif (Satuan : %)	6	6	100.00		
			Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi						
				Persentase Koperasi Yang Bankable (Satuan : %)	6	6	100.00		
			Program Pengembangan Umkm						
				Persentase Usaha Kecil yang bermitra secara aktif dengan dunia usaha lain (Satuan : %)	1	1	100.00		
14	<b>2.18 URUSAN PEMERINTAHAN</b>								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>BIDANG PENANAMAN MODAL</b>								
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu							
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi						
				Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan : %)	100	100.00	100.00		
				Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan : %)	100	100.00	100.00		
				Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %)	100	100.00	100.00		
				Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %)	100	100.00	100.00		
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal						
				Jumlah Kerjasama BUMD (Satuan : BUMD)	2	2.00	100.00		
			Program Promosi Penanaman Modal						
				Jumlah calon investor yang mendaftar (Satuan : Investor)	1000	1373	137.30		
			Program Pelayanan Penanaman Modal						
				Persentase Realisasi Perizinan sesuai Standar Pelayanan (Satuan : %)	100	100.00	100.00		
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Cakupan Potensi Investasi yang Terealisasi (Satuan : Cakupan)	17,22	26.136	153.76		
			Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal						
				Rasio Pemanfaatan Informasi Penanaman Modal (Satuan : %)	100	100.00	100.00		
15	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
		Dinas Kepemudaan dan Olahraga							
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi						
				Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan : %)	100	100	100.00		
				Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan : %)	100	100	100.00		
				Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %)	100	100	100.00		
				Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %)	100	100	100.00		
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan						
				Cakupan Kelompok/ Organisasi Kepemudaan dan kewirausahaan pemuda Mandiri (Satuan : %)	90	80	88.89	Belum Terlaksananya Ran Yang Belum Tersusun Oleh Kementerian Sehingga Rad Tidak Dapat Dilaksanakan Dan Masih Kurangnya Pemuda Berprestasi Dan Pemuda	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Yang Mendapatkan Pelatihan Serta Mendapatkan Pelayanan	
			Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan						
				Cakupan Keikutsertaan cabang olahraga pada event wilayah, nasional dan internasional (Satuan : %)	90	85	94.44	Kurangnya Event Kejuaraan Olahraga Multi Event Dan Single Event Di Tingkat Nasional Dan Internasional Dikarnakan Masih Dalam Pandemi Covid 19	
				Cakupan pembinaan olahraga (Satuan : %)	90	90	100.00		
				Cakupan Pelayanan pembinaan olahraga (Satuan : %)	85	85	100.00		
16	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan							
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi						
				Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan : %)	100	100.00	100.00		
				Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan : %)	100	95	95.00	Terdapat 3 Item Pengadaan Barang Yang Tidak Bisa Dilaksanakan	Lebih Cermat Dan Teliti Dalam Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran, Harus Disandingkan Dengan Rkbmd
				Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %)	100	100.00	100.00		
				Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %)	100	100.00	100.00		
			Program Pembinaan Perpustakaan						
				Cakupan Pelayanan Perpustakaan Sesuai Standar	85	83	97.65	Pada Januari S.d September 2021, Dpk Provinsi Banten Belum	Proses Pelayanan Baik Dari Peminjaman Buku,

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Minimal Perpustakaan (Satuan : %)				Membuka Layanan Perpustakaan Untuk Mengantisipasi Penyebaran Virus Covid 19. Dpk Hanya Membuka Layanan I-banten Dan Melayani Penengembalian Buku. Dpk Mulai Membuka Layanan Tertutup Pada Oktober S.d Desember 2021. Hal Ini Mengakibatkan Tingkat Kunjungan Perpustakaan Turun Cukup Signifikan, Yang Berdampak Pada Capaian Standarisasi Pelayanan Perpustakaan	Pengembalian Buku, Pendaftaran / Pembuatan Kartu Anggota Perpustakaan Dilakukan Secara On-line/daring. Meningkatkan Layanan I-banten Dan Melakukan Inovasi Layanan Sesuai Masa Pandemi
				Cakupan pembinaan perpustakaan Umum, perpustakaan khusus dan Perpustakaan Sekolah (Satuan : %)	100	110,42	110.00		
17	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan							
			Program Pengelolaan Arsip						
				Persentase Digitalisasi Arsip Statis Daerah (Satuan : %)	95	100	105.26		
			Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip						
				Persentase Pengelolaan Arsip OPD sesuai Standar (Satuan : %)	100	100	100.00		
III	Urusan Pemerintahan Pilihan								
1	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN								
		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan							
			Program Pengelolaan Hutan						
				Luas Lahan kritis yang terehabilitasi wilayah Lebak dan Tangerang (Satuan : Ha)	2500	2.594.64	103,60	Keterbatasan Anggaran Dan Sdm Yang Menangani Rehabilitasi Hutan Dan Lahan	Berkoordinasi Dengan Stakeholder Terkait Dalam Penanganan Rhl (bpdas Citarum Siliwang, Perum Perhutani Tnghs Dan Swasta)

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Dan Optimalisasi Tenaga Penyuluh Kehutanan Swadaya
				Tersedianya benih unggul yang bersertifikat bagi masyarakat (Satuan : Batang)	180.000	181,889	101,05	Serangan Hama Dan Penyakit Dan Terbatasnya Sapras Persemaian Serta Sdm Perbenihan	Peningkatan Pengendalian Hama Dan Penyakit, Penambahan Anggaran, Sapras Dan Sdm Perbenihan
				Peningkatan Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat (Satuan : %)	10	56,02	560,20	Minimnya Data Pelaku Usaha Pemanfaatan Hutan Dan Hasil Hutan	- Sosialisasi Kewajiban Pelaporan Pemanfaatan Hutan Dan Hasil Hutan Bagi Masyarakat Dan Pemberian Punishment And Reward Pelaku Usaha Hasil Hutan
				Luas Lahan kritis yang terehabilitasi Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon (Satuan : Ha)	2500	2571	102,84	Keterbatasan Informasi /data Penanamana Yang Dilaksanakan Secara Swakelola Oleh Masyarakat/swasta	Upaya Inventarisasi Pelaksanaan Penanaman Yang Dilaksanakan Oleh Masyarakat Diluar Kegiatan - Optimalisasi Tenaga Penyuluh Kehutanan Swadaya (pksm)
			Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya						
				Peningkatan fungsi UPTD TAHURA (Satuan : %)	12,5	12,50	100,00	Sk Perluasan Tahura Belum Terbit Dari Kihk	Tindakanjnt Melalui Surat Gubernur Banten Ke Kihk
				Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon (Satuan : Kelompok)	3	3	100,00	- Keterbatasan Anggaran Dan Pemberlakuakan Ppkm	Usulan Penambahan Anggaran Dan Optimalisasi Menggunakan Fasilitas Daring
				Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang (Satuan : krelompok)	3	3	100,00	- Keterbatasan Anggaran Dan Pemberlakuakan Ppkm	Usulan Penambahan Anggaran Dan Optimalisasi Menggunakan Fasilitas Daring
			Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan						
				Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan, Pengelolaan dan Konservasi Hutan (Satuan : Kelompok)	10	10,00	100,00	Keterbatasan Akses Kelompok Tani Dalam Menggunakan Gadget Dan Lokasi/akses Jalan Yang Sulit Ditempouh /rusak Menuju Lokasi Kelompok Tani Hutan	Optimalisasi Penggunaan Fasilitas Daring (gadget) Dan Sarana Pendukung / Kendaraan Ke Lokasi /jalan Yang Sulit Ditempouh
			Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (das)						
				Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola DAS (Kawasan/DAS) (Satuan : %)	20	25,08	125,40	- Masih Rendahnya Aktivitas Forum Das - Masih Rendahnya Integrasi	_ Optimalisasi Forum Das Sebagai Wadah Pengelolaan Das Berbasis Masyarakat -

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Pengelolaan Das/ Masih Bersifat Parsial	Peningkatan Peran Masyarakat , Swasta (industri) Dalam Peningkatan Fungsi Das
2	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								
		Dinas Kelautan dan Perikanan							
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi						
				Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan : %)	100	100	100,00		
				Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan : %)	100	100	100,00		
				Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %)	100	100	100,00		
				Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %)	100	100	100,00		
			Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil						
				Nilai Tukar Nelayan (NTN) (Satuan : Poin)	119	100,99	84,87	Pendapatan Nelayan Menurun Yang Disebabkan Oleh Turunnya Daya Beli Masyarakat Akibat Pandemi Covid 19	Melakukan Pembinaan Kepada Masyarakat Pesisir Melalui Pelatihan-pelatihan
				Persentase usaha kelautan yang direkomendasikan dari jumlah pelaku usaha yang ada di wilayah selatan Provinsi Banten (Satuan : %)	100,00	100	100,00		
				Persentase usaha kelautan yang direkomendasikan dari jumlah pelaku usaha yang ada	100,00	100	100,00		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				di wilayah utara Provinsi Banten (Satuan : %)					
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap						
				Persentase Produksi Perikanan (Satuan : %)	8,23	1,53	18,59	Maraknya Illegal Fhising Atau Taransaki Jual Beli Di Tengah Laut, Sehingga Pendaratan Ikan Di Pelabuhan Perikanan Tidak Maksimal (unreported)	Meningkatkan Pengawasan, Membuka Gerai Perijinan, Menyediakan Alat Tangkap Ramah Lingkungan Dan Revitalisasi Pelabuhan Perikanan
				Persentase capaian kinerja pelayanan usaha kepelabuhanan (Satuan : %)	100,00	100	100,00		
			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan						
				Luas Laut Yang Terawasi (Satuan : %)	30	35	116,67		
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan						
				Persentase Usaha Perikanan yang bersertifikat SNI (Satuan : %)	100,00	100	100,00		
				Jumlah ruang lingkup pengujian dan mutu hasil perikanan pada ISO 17025 (1 Parameter) (Satuan : Parameter)	1	1	100,00		
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya						
				Produksi Benih Ikan Laut dan Payau (Satuan : Milyar)	1,25	0,74	74,00	Geliat Pelaku Pembudidaya Dibanten Menurun Dan Kurangnya Fasilitas Pokok Dan Pendukung Dibidang Budidaya Dan Pembudidaya Ikan Serta Snggsrsn Ysng Direfocusing Untuk Dialihkan Penanggulangan Covid-19	Mengoptimalkan Sarana Dan Prasarana Budidaya Ikan Di Curug Barang, Cimanuk Serta Merevitalisasi Sarana Dan Prasarana Budidaya Ikan Di Cigorondong, Sumur, Pandeglang
3	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								
		Dinas Pariwisata							
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan : %)	100	100,00	100,00		
				Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan : %)	100	100,00	100,00		
				Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %)	100	100,00	100,00		
				Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %)	100	100,00	100,00		
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata						
				Persentase Pengembangan Destinasi Wisata berbasis Sapta Pesona (Satuan : %)	20	20,00	100,00		
			Program Pemasaran Pariwisata						
				Jumlah Kunjungan Wisatawan (Satuan : Orang)	17.528.110	18.545.096	102,68		
				Rata-Rata Lama Kunjungan (Satuan : Hari)	1,54	1,60	160,00		
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual						
				Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan (Satuan : Rp)	4.327.965	1.682.528,00	23,09	Ketidaktercapaian Rata - Rata Pengeluaran Ini Disebabkan Masih Adanya Varian Baru Dimana Dibeberapa Lokasi Destinasi Wisata Masih Terdapat Pembatasan Mobilitas Orang Serta Pembatasan Sarana Rekreasi Yang Dibuka Sehingga Berdampak Terhadap Jumlah Pengeluaran Wisatawan	Mengoptimalkan Penerapan 5m Serta Penerapan Prokes Yang Ketat Di Obyek Wisata Agar Mampu Menekan Penyebaran Varian Baru Covid-19 Sehingga Pembatasan Mobilitas Orang Serta Pembukaan Sarana Rekreasi Secara Bertahap Dapat Dilonggarkan Sehingga

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Berdampak Kepada Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengeluaran Wisatawan
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif						
				Jumlah tenaga kerja yang terlatih di sektor kepariwisataan dan ekonomi kreatif (Satuan : Orang)	300	300,00	100,00		
4	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								
		Dinas Pertanian							
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi						
				Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan : %)	100	100	100,00		
				Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan : %)	100	100	100,00		
				Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %)	100	100	100,00		
				Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %)	100	100	100,00		
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian						
				Capaian Produksi Tanaman Padi (Satuan : Ton)	2.116.802	2.116.802	100,00		
				Capaian Produktivitas Tanaman Padi (Satuan : Kw/Ha)	51,93	50,95	99,90	Adanya Anomali Iklim Dan Serangan Opt	Optimalkan Peran Popt Dan Penyuluh Di Sentra Tanaman Pangan

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyediaan benih sumber Tanaman Hortikultura (Satuan : Ton)	30	30	100,00		
				Peningkatan Produksi Daging (Satuan : Ton)	147,978	161,431	109,09		
				Capaian Produksi Tanaman Jagung (Satuan : Ton)	24980	55000	220,18		
				Capaian Produksi Tanaman Bawang Merah (Satuan : Ton)	850,85	1044,54	122,89		
				Capaian Produksi Tanaman Cabai (Satuan : Ton)	10692	98623	92,24	Anomali Iklim	
				Pengawasan Benih Perkebunan (Satuan : Komoditi)	3	3	100,00		
				Persentase Peningkatan Jumlah Sertifikasi Benih tanaman Hortikultura (Satuan : %)	10	10	100,00		
				Persentase Peningkatan Jumlah Sertifikasi Benih tanaman pangan (Satuan : %)	10	10	100,00		
				Penyediaan benih sumber Tanaman pangan (Padi, Jagung, Kedelai) (Satuan : Ton)	20	22,50	112,50		
				Penyediaan Benih Sumber tanaman perkebunan (Kakao, Kelapa) (Satuan : Batang)	100	100	100,00		
				Peningkatan Produksi Tanaman Kakao (Satuan : Ton)	3,072	2,044	66,45	Anomali Iklim Dan Kurangnya Minat Petani Kakao	Meningkatkan Kerjasama Dengan Dinas Perdagangan Agar Kakao Banten Bisa Diterima Oleh Industri
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian						
				Persentase Sarana Produksi Pertanian (Satuan : %)	100	100	100,00		
				Capaian Produksi Tanaman Kelapa (Satuan : Ton)	46,670	43,143	92,44	Anomali Iklim Sehingga Menurunkan Jumlah Produksi	Intensifikasi Dan Peremajaan Untuk Tanaman Yang Sudah Tidak Produktif
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner						
				Peningkatan Penjaminan Keamanan Produk Hewan (Satuan : Unit)	25	25	100,00		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Satuan : Kasus)	25	25	100,00		
			Program Perizinan Usaha Pertanian						
				Capaian Produksi Tanaman Aren (Satuan : Ton)	1,834	4094,65	223.751,37		
			Program Penyuluhan Pertanian						
				Capaian Produksi Tanaman Kedelai (Satuan : Ton)	8.266,65	880	10.640,87	Refocusing Anggaran	Akan Dianggarkan Pada Tahun Anggaran Berikutnya
				Pengembangan Kawasan Buah Durian (Satuan : HA)	50	50	100,00		
			Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian						
				Pengamanan Produksi Tanaman pangan dari gangguan serangan OPT dan DPI (Satuan : %)	5	2,8	56,00	Anomali Cuaca Yang Tidak Menentuk Mengakibatkan Bencana Dan Serangan Opt Yang Sulit Dikendalikan	Meningkatkan Jumlah Sdm Popt Dan Penyuluh Yang Ada Di Provinsi Banten
5	3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL								
		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral							
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi						
				Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan : %)	100	100,00	100,00		
				Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan : %)	100	100,00	100,00		
				Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %)	100	100,00	100,00		
				Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program	100	100,00	100,00		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %)					
			Program Pengelolaan Aspek Kegeologian						
				Prosentase pelayanan dan pengendalian geologi dan air tanah (Satuan : %)	76,94	73,55	95,59		
			Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara						
				Prosentase pelayanan dan pengendalian mineral dan batubara (Satuan : %)	86,3	58,45	67,73	Target Indikator Program "prosentase Pelayanan Dan Pengendalian Mineral Dan Batubara" Belum Tercapai Untuk Akumulatif S.d Tahun 2021, Dimana Berdasarkan Hasil Pengukuran Dari Do Indikator Kinerja Tersebut Sesuai Pergub No. 36 Tahun 2019 Tentang Iku Provinsi Banten (terlampir) Akibat Adanya Deviasi Minus 61 Dokumen Dari Target Dokumen Rekomendasi Teknis Perijinan Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Tahun 2020 Dan Tahun 2021 Yang Tidak Dapat Terealisasi Pasca Terbitnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja Yang Menghapus Semua Kewenangan Provinsi Dalam Pengelolaan Minerba	Masih Menunggu Pendelegasian Kewenangan Dari Pusat Ke Daerah
			Program Pengelolaan Ketenagalistrikan						
				Pelaku usaha ketenagalistrikan yang memenuhi standar (Satuan : %)	37,42	65,92	176,16	Target Indikator Program ""cakupan Pelayanan Listrik Perdesaan"", Terealisasi 100% Seiring Dengan Terealisasinya Output Listrik Perdesaan Sebesar 12.240 Rts Yang Menjadi	
				Cakupan Pelayanan Listrik Perdesaan (Satuan : %)	100,00	100,00	100,00	Target Kegiatan Terkait Di Tahun 2021 (detail Pengukuran Sesuai Definisi Operasional Indikator Tersebut Sesuai Pergub No. 36 Tahun 2019 Terlampir), Namun Terdapat	Koordinasi Intensif Dengan Bappeda Terkait Perbaikan Kkl Dokumen Penganggaran Untuk Mengakomodir Capaian Lisdes Yang Belum Tercatat - Melanjutkan Sisa Terhutang

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Beberapa Permasalahan Terkait, Yaitu : - Terdapat 1.765 Rts Yang Merupakan Lisdes Lanjutan Tahun 2020 Yang Tidak Tercatat Capaiannya Dalam Dokumen Penganggaran (dpa) Sehingga Belum Bisa Di- claim Sebagai Tambahan Realisasi Kinerja Dari Indikator Program Tersebut - Secara Akumulasi S.d Tahun 2022 (kondisi Akhir Rpjmd) Yang Mengemban Target 50.000 Rts Menyisakan 11.560 Rts Yang Belum Tercatat Sebagai Realisasi S.d Kondisi Tahun 2021 Dan Hanya Dialokasikan 6.952 Rts Di Dpa 2022 Sehingga Terhutang 4.635 Rts Untuk Mencapai 50.000 Rts Di Tahun 2022 (akhir Rpjmd/renstra)	Target Lisdes Yang Belum Tercapai Di Periode Renstra/rpjmd Berikutnya
6	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan							
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan						
				Jumlah Komoditas yang berpartisipasi pada Pasar Lelang Komoditi Berjangka (Satuan : komoditi)	2	10	500,00		
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting						
				Koefisien Variasi Harga Kebutuhan Pokok Antar Waktu dan Wilayah (Satuan : %)	5	0,07	1,40		
				Neraca ketersediaan barang pokok (Satuan : %)	100,00	100	100,00		
			Program Pengembangan Ekspor						
				Akses informasi dan perluasan jaringan pasar ekspor (Satuan : jumlah)	6	6	100,00		
				Calon eksportir baru (Satuan : eksportir)	5	30	600,00		
			Program Standardisasi Dan						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Perlindungan Konsumen						
				Indeks Keberdayaan Konsumen (Satuan : %)	32	32	100,00		
				Persentase barang beredar diawasi yang sesuai ketentuan (Satuan : %)	1	32,04	3.204,00		
				Persentase Peningkatan Industri yang ber SNI (Satuan : %)	10	14,17	141,70		
				Persentase penyelesaian sengketa konsumen (Satuan : %)	55	55	100,00		
				Cakupan Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (Satuan : %)	35	100	285,71		
			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri						
				Peningkatan Persentase Produk Lokal yang beredar pada Retail Modern (Satuan : %)	10	10	100,00		
7	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan							
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi						
				Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan : %)	100	100	100,00		
				Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan : %)	100	100	100,00		
				Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %)	100	100	100,00		
				Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan	100	100	100,00		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %)					
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri						
				Jumlah Industri yang menyelenggarakan penyiapan SDM secara Link and Match (Satuan : Jumlah)	40,00	32	80,00	Penyesuaian Kebutuhan Industri Dengan Jurusan Smk	Kerjasama Dengan Dinas Pendidikan
				Cakupan Pelayanan Standarisasi dan Sertifikasi Industri Kecil Menengah (Satuan : Jumlah)	50,00	157	314,00		
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional						
				Persentase Pertumbuhan Produk Ekspor Industri yang berbasis sumber daya alam dan atau Lokal (Satuan : %)	3	2,9	96,67		
IV	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan								
1	4.1 SEKRETARIAT DAERAH								
		Sekretariat Daerah							
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi						
				Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN) (Satuan : %)	100	100.00	100.00	Kurangnya Sdm Dalam Menanganai Perencanaan Dilingkup Setda, Kurangnya Sarana Dan Prasarana Kantor, Kurangnya Anggaran Dalam Mendukung Pencapaiak Target	Memaksimal Sdm, Sarana Dan Prasarana Dan Anggaran Yang Ada, Berkoordinasi Dengan Bkd Terkait Kurangnya Sdm, Berkoordinasi Dengan Biro Umum Terkait Sarana Dan Prasarana Kantor, Berkoordinasi Dengan Bappeda Terkait Perencanaan Anggaran
				Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN) (Satuan : %)	100	100.00	100.00	Kurangnya Sarana Prasarana Apk (alat Perlengkapan Kantor) Dan Alat Tulis Kantor (atk) Yang Didroping Dari Biro Umum Karena Biro Administrasi Pimpinan Tidak Bisa Melakukan Pengadaan Sendiri.	Berkoordinasi Dengan Biro Umum Terkait Pengajuan Usulan Rkbmd (rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah) Biro Adpim.

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Capaian % kinerja Pelayanan Keprotokolan (Satuan : %)	90	90.00	100.00	Kurangnya Sarana Prasarana, Terbatasnya Penganggaran	Koordinasi Dengan Biro Umum Terkait Pemenuhan Sarpras, Koordinasi Dengan Bappeda Dan Bpkad Untuk Ketercukupinya Anggaran
				Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Satuan : %)	100	100.00	100.00	1. Kurang Optimalnya Koordinasi Dan Sinergitas Antar Sub Bag Di Internal Biro Barjas 2. Minimnya Sarana Dan Prasarana Perkantoran Untuk Memperlancar Kinerja 3. Kurang Optimalnya Tugas Fungsi Dari Pep Setda Di Biro Adpim	1. Meningkatkan Koordinasi Dan Sinergitas Dengan Biro Administrasi Pimpinan 2. Mengajukan Usulan Permohonan Penambahan Sarana Dan Prasarana Kantor Ke Biro Umum 3. Membuat Nota Dinas Dan Permohonan Dukungan Data Dari Semua Sub Bagian
				Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Satuan : %)	100	95.83	95.83	1. Minimnya Sarana Dan Prasarana Perkantoran Untuk Penyiapan Adminstrasi Umum Perkantoran 2. Belum Dilakukan Rekonsiliasi Inventarisasi Barang (aset Daerah) Yang Ada Di Biro Barjas	Koordinasi Dengan Bpkad Dan Biro Umum
				Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Satuan : %)	100	100.00	100.00		
				Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Biro Organisasi dan RB) (Satuan : %)	100	100.00	100.00		
				Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Biro Perekonomian dan ADPEM) (Satuan : %)	100	100.00	100.00		
				Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Satuan : %)	100	100.00	100.00		
				Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	100	100.00	100.00		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				(Biro Perekonomian dan ADPEM) (Satuan : %)					
				Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Biro Perekonomian dan ADPEM) (Satuan : %)	100	100.00	100.00		
				Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Biro Perekonomian dan ADPEM) (Satuan : %)	100	100.00	100.00		
				Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Biro Organisasi dan RB) (Satuan : %)	100	100	100.00		
				Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Biro Organisasi dan RB) (Satuan : %)	100	100	100.00		
				Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Biro Organisasi dan RB) (Satuan : %)	100	100	100.00		
				Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Biro Organisasi dan RB) (Satuan : %)	100	100	100.00		
				Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Satuan : %)	100	100	100.00		
				Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung	100	100	100.00		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Satuan : %)					
				Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Satuan : %)	100	100	100.00		
				Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Satuan : %)	100	100	100.00		
				Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Biro Hukum) (Satuan : %)	100	100	100.00		
				Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Biro Hukum) (Satuan : %)	100	100	100.00		
				Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Biro Hukum) (Satuan : %)	100	100	100.00		
				Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Biro Hukum) (Satuan : %)	100	100	100.00		
				Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Biro Umum) (Satuan : %)	100	100	100.00		
				Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung	100	100	100.00		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Biro Perekonomian dan ADPEM) (Satuan : %)					
				Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Biro Umum) (Satuan : %)	100	100	100.00		
				Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Satuan : %)	100	100	100.00		
				Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Biro Umum) (Satuan : %)	100	100	100.00		
				Persentase Prasarana dan sarana penunjang kinerja di Lingkungan Setda dalam kondisi baik (Satuan : %)	100	100	100.00		
				Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Biro Umum) (Satuan : %)	100	100.00.00	100.00		
				Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Biro Perekonomian dan ADPEM) (Satuan : %)	100	100.00	100.00		
				Persentase Prasarana dan sarana penunjang kinerja di Lingkungan Setda dalam kondisi baik (Satuan : %)	100	100	100.00		
			<b>Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah</b>						
				presentase realisasi kebijakan administrasi kewilayahan (Satuan : %)	100	100	100		
				presentase realisasi kebijakan kerjasama pemerintahan (Satuan : %)	100	100	100		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				presentase realisasi kebijakan administasi pemerintahan dan otonomi daerah (Satuan : %)	100	100	100		
			Program Kesejahteraan Rakyat						
				Cakupan Keselarasan Rumusan Kebijakan Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Keluarga (Satuan : %)	100.00	100	100.00		
				Cakupan Keselarasan Rumusan Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat (Satuan : %)	100.00	100	100.00		
				Cakupan Keselarasan Rumusan Kebijakan Bidang Sosial dan Keagamaan (Satuan : %)	100	100	100.00		
			Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum						
				Presentase Fasilitasi keselarasan peraturan perundangan daerah atau Kabupaten/ Kota dengan regulasi hukum nasional (Satuan : %)	100	100	100.00		
				Presentasi pelayanan bantuan hukum (Satuan : %)	100	100	100.00		
				Presentase realisasi target propempera (Satuan : %)	100	100	100.00		
			Program Penataan Organisasi						
				persentase ketercapaian kebijakan penataan kelembagaan (Satuan : %)	100	100	100.00		
				Persentase Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemda (Satuan : %)	100	100	100.00		
			Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa						
				Capaian Standar LPSE dalam Penyelenggaraan Sistem Layanan Pengadaan (Satuan : Jumlah)	13	13.00	100.00	1.. Sarana Dan Prasarana Pendukung Jaringan Dan Server Lpse Yang Belum Memadai 2. Pengembangan Sdm Lpse Yang Belum Sesuai/	1.. Penganggaran Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Pendukung Jaringan Dan Server Lpse 2. Penganggaran

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Tertata Dengan Kebutuhan Dan Beban Kerja Lpse 3. Belum Teratur Penyebaran Informasi Pengadaan Barang/jasa Kepada Masyarakat	Peningkatan Kapasitas Sdm Lpse 3. Terdapat Publikasi Iklan Masyarakat Dan Kerjasama Media Informasi (cetak, Radio Dan Televisi)
				Presentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa dan Kebijakan Administrasi Pembangunan (Satuan : %)	90	0.00			
				Presentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa dan Kebijakan Administrasi Pembangunan (Satuan : %)	90	90.00	100.00		
				Persentase Rumusan kebijakan di bidang infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Satuan : %)	76,47	68,42	89.47		
			Program Perekonomian Dan Pembangunan						
				Jumlah Dokumen Kebijakan Industri Jasa dan Ketenagakerjaan (Satuan : Dokumen)	11	11.00	100.00		
				Jumlah Dokumen Kebijakan Produksi Daerah (Satuan : Dokumen)	16	16.00	100.00		
				Jumlah Dokumen Kebijakan Sarana Perekonomian (Satuan : Dokumen)	12	12.00	100.00		
			Program Kebijakan Administrasi Pembangunan						
				Persentase keselarasan kebijakan di bidang Admiistrasi Pembangunan (Satuan : %)	90	90.00	100.00		
				Presentasi Realisasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan (Satuan : %)	90	90.00	100.00		
2	4.2 SEKRETARIAT DPRD								
		Sekretariat DPRD							
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan : %)	100	100.00	100.00		
				Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %)	100	100.00	100.00		
				Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan : %)	100	100.00	100.00		
				Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %)	100	100.00	100.00		
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd						
				Capaian % Pelayanan Keprotokolan, kehumasan dan dukungan pelaksanaan kegiatan Reses DPRD (Satuan : %)	100	100.00	100.00		
				Capaian % Kinerja Fungsi DPRD (Satuan : %)	100	100.00	100.00		
V	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan								
1	5.1 PERENCANAAN								
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah							
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi						
				Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %)	100	100.00	100.00		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (%) (Satuan : %)	100	100.00	100.00		
				Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan : %)	100	100.00	100.00		
				Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %)	100	100.00	100.00		
			Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah						
				Persentase Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA (Satuan : %)	100.00	100.00	100.00		
				Terpenuhinya Kebutuhan Data untuk Perencanaan Pembangunan Sesuai SIPD (Satuan : %)	80	80.00	100.00		
				Tingkat kesesuaian pelaksanaan program Perencanaan terhadap kinerja Pembangunan (Satuan : %)	80	80.00	100.00		
				Tingkat Ketersediaan Pembiayaan Non- APBD (Satuan : Rupiah)	5.000.000.000	5,000,000,000.00	100.00		
			Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah						
				Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Mitra Bidang Sosial dan Pemerintahan (Satuan : %)	80	80	100.00		
				Persentase usulan kegiatan lingkup bidang Sosial dan Pemerintahan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan (Satuan : %)	85	85	100.00		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Persentase keselarasan Perencanaan tata ruang dengan Pemanfaatan ruang (%) (Satuan : %)	80	80	100.00		
				Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Mitra Bidang IPW (Satuan : %)	80	80	100.00		
				Persentase usulan kegiatan lingkup bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang diakomodir dalam dokumen perencanaan (Satuan : %)	85	85	100.00		
				Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian (Satuan : %)	80	80.00	100.00		
				Persentase usulan kegiatan lingkup Bidang Perekonomian yang diakomodir dalam dokumen perencanaan (Satuan : %)	85	85.00	100.00		
2	5.5 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah							
			Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah						
				Meningkatnya hasil penelitian yang dimanfaatkan (Satuan : %)	80	92	115.00	Kajian Pada Sub Kegiatan 5.05.02.1.01.03 Fasilitasi, Pelaksanaan Dan Evaluasi Penelitian Dan Pengembangan Bidang Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Tidak Dapat Dilaksanakan Karena Terdapat Kajian Serupa Oleh Biro Organisasi	Dikategorikan Silpa Karena Informasi Kajian Serupa Baru Diperoleh Setelah Proses Perubahan Selesai Sehingga Tidak Dimungkinkan Untuk Dihilangkan Pada Perubahan Anggaran
				Meningkatnya inovasi yang diadopsi (Satuan : %)	80	100	125.00		
3	5.2 KEUANGAN								
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah							
			Program Penunjang Urusan						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Pemerintahan Daerah Provinsi						
				Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan : %)	100	100.00	100.00		
				Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan : %)	100	100.00	100.00		
				Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %)	100	100.00	100.00		
				Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %)	100	100.00	100.00		
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah						
				Persentase Kepatuhan OPD terhadap Peraturan Perundang-undangan di Bidang Keuangan (Satuan : %)	95	95	100.00		
				Persentase Kesesuaian laporan dengan Standar Akutansi Pemerintah (Satuan : %)	100.00	100	100.00		
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah						
				Capaian tertib Administrasi Aset daerah (Satuan : %)	100.00	100	100.00		
		Badan Pendapatan Daerah							
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi						
				Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan : %)	100	100.00	100.00		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan : %)	100	100.00	100.00		
				Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Bapenda) (Satuan : %)	100	100.00	100.00		
				Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %)	100	100.00	100.00		
				Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain (Satuan : %)	2.96	31.77	1,073.31		
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah						
				Persentase Kepatuhan OPD terhadap Peraturan Perundang-undangan di Bidang Keuangan (Satuan : %)	95	95	100.00		
				Persentase Kesesuaian laporan dengan Standar Akutansi Pemerintah (Satuan : %)	100.00	100	100.00		
				Persentase Kepatuhan OPD terhadap Peraturan Perundang-undangan di Bidang Keuangan (Satuan : %)	95	95	100.00		
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah						
				Capaian tertib Administrasi Aset daerah (Satuan : %)	100.00	100	100.00		
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah						
				Persentase Peningkatan Pajak Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping (Satuan : %)	10.16	7.75	76.28	1.kurang Maksimalnya Penelusuran Kendaraan Bermotor Yang Tidak Melakukan Daftar Ulang (kbbmdu) Secara Rutin Setiap Bulan Dikarenakan Ada Peraturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (ppkm) 2. Pelaksanaan Razia Pajak Kendaraan Bermotor Tidak	Perlu Dilakukan Tindakan Dilapangan Secara Langsung Terhadap Masyarakat Melalui Razia Dengan Instansi Terkait

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Mendapatkan Izin Keramaian Karena Masih Dalam Tahap Transisi Akibat Dari Pencegahan Virus Covid 19	
				Persentase Peningkatan Pajak Daerah UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang (Satuan : %)	10.23	16.45	160.80		
				Persentase Peningkatan Pajak Daerah (Satuan : %)	8	17.86	223.25		
				Capaian Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah (Satuan : Indeks)	3	3.00	100.00		
				Jumlah Inovasi yang Terimplementasikan (inovasi) (Satuan : Inovasi)	3	7.00	233.33		
				Penurunan Gangguan Sistem Informasi Pendapatan Daerah (Satuan : Per)	25	1.00	4.00		
				Persentase Peningkatan Potensi Pajak dan Bukan Pajak (%) (Satuan : %)	1.05	5.61	534.29		
				Persentase Penurunan Temuan SPI antar Tahun Anggaran (%) (Satuan : %)	35	49.00	140.00		
				Persentase Peningkatan Pajak Daerah UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikande (Satuan : %)	10.12	19.11	188.83		
				Persentase Peningkatan Pajak Daerah UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang (Satuan : %)	10.22	10.68	104.50		
				Persentase Peningkatan Pajak Daerah UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung (Satuan : %)	10.23	13.39	130.89		
				Persentase Potensi Tunggakan Pajak Daerah yang dapat diselesaikan (Satuan : %)	18.1	26.58	146.85		
				Persentase Peningkatan Pajak Daerah UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat (Satuan : %)	10.26	16.83	164.04		
				Persentase Peningkatan Pajak Daerah UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong (Satuan : %)	10.21	14.59	142.90		
				Persentase Peningkatan Pajak Daerah (Satuan : %)	8	17.86	223.25		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Persentase Peningkatan Pajak Daerah UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja (Satuan : %)	10.23	14.82	144.87		
				Persentase Peningkatan Pajak Daerah UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol (Satuan : %)	10.23	12.81	125.22		
				Persentase Peningkatan Pajak Daerah UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon (Satuan : %)	10.24	16.67	162.79		
				Persentase Peningkatan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug (Satuan : %)	10.24	18.60	181.64		
4	5.3 KEPEGAWAIAN								
		Badan Kepegawaian Daerah							
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi						
				Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan : %)	100	100.00	100.00		
				Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan : %)	100	100.00	100.00		
				Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %)	100	100.00	100.00		
				Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %)	100	100.00	100.00		
			Program Kepegawaian Daerah						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Prosentase akurasi data kepegawaian (Satuan : %)	100.00	89.85	89.85	Masih Terdapat Pegawai Yang Belum Memahami Pentingnya Dokumen Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Akan Melakukan Pengembangan Sistem Manajemen Informasi Kepegawaian Agar Lebih Optimal
				Prosentase kinerja pegawai dalam kategori baik (Satuan : %)	94	92.75	98.67	Belum Optimalnya Pengawasan Kinerja Pegawai Oleh Masing-masing Atasan Langsung	Tim Penilai Kinerja Akan Memperbaiki Tatacara Pengukuran Kinerja Agar Pengawasan Atas Capaian Kinerja Pegawai Lebih Meningkatkan
				Prosentase pegawai yang tidak melanggar kode etik dan disiplin pegawai (Satuan : %)	100.00	99.81	99.81	'masih Belum Optimalnya Pelaksanaan Pembinaan Pegawai Dimasing-masing Opd	'badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Akan Terus Melaksanakan Sosialisasi Terhadap Unsur Pembina Kepegawaian Dimasing-masing Opd Agar Pemahaman Pegawai Terhadap Kedisiplinan Meningkatkan
				Prosentase Peningkatan Kompetensi Pegawai melalui Pengembangan Kompetensi (Satuan : %)	90	90,34	100.00		
				Prosentase tingkat pencapaian kualifikasi pendidikan (Satuan : %)	90	88,05	97.78	Pegawai Provinsi Banten Saat Ini Masih Dalam Proses Peningkatan Jenjang Pendidikan Sesuai Dengan Masing-masing Jenjang Pendidikan	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Akan Mengevaluasi Capaian Hasil Pendidikan Pegawai Berdasarkan Kebutuhan Formasi
				Prosentase ASN Provinsi Banten sesuai dengan kebutuhan (Satuan : %)	90	85,22	94.44	Provinsi Banten Telah Mengirimkan Formasi Kebutuhan Pegawai Sesuai Dengan Anjab/abk Namun Kebijakan Dari Pemerintah Pusat Pada Saat Ini Belum Bisa Mengakomodir Usulan Dimaksud Sehingga Besar Formasi Yang Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Masih Jauh Dari Angka Yg Dibutuhkan	Provinsi Banten Menjajaki Rencana Kerjasama Dengan Lembaga Pendidikan Ikatan Dinas Agar Bisa Memanfaatkan Lulusan Untuk Dapat Ditempatkan Di Provinsi Banten, Selain Hal Tersebut Kebutuhan Pegawai Diminimalisir Dengan Adanya Kehadiran Pppk Yang Sudah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat
5	5.4 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah							
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan : %)	100	95	95.00		
				Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan : %)	100	95	95.00		
				Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %)	100	95	95.00		
				Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %)	100	95	95.00		
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia						
				Rasio peserta Diklat kepemimpinan dan prajabatan, manajemen dan pemerintahan yang lulus berkategori baik (Satuan : %)	95	99,04	104.21		
				Rasio peserta Diklat Teknis Umum, Substantif, dan Fungsional yang lulus berkategori baik (Satuan : %)	95	99,05	104.21		
				Cakupan Ketersediaan Bahan Penunjang Kediklatan dan Bimtek Aparatur (Satuan : %)	100	100	100.00		
				Capaian kesesuaian mutu penyelenggaraan diklat (Satuan : %)	100	100	100.00		
				Rasio ASN Provinsi Banten yang lulus uji kompetensi/sertifikasi (Satuan : %)	95	9,21	9.47	-sertifikasi Yang Diselenggarakanpada Tahun 2021adalah Ujian Sertifikasibarang Dan Jasa Tingkat Dasar Dengan Target Peserta 80 Orang, Peserta Yang Ikut Sebanyak 76 Orang Sedang Peserta Yang Lulus Hanya Sebanyak 7 Orang ( 9,21%) Rendahnya Tingkat Kelulusan Peserta Dikarenakan Kemampuan	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Dan Pengetahuan Dasar Serta Persiapan Peserta Pada Saat Akan Mengikuti Sertifikasi	
6	5.7 PENGELOLAAN PENGHUBUNG								
		Badan Penghubung Daerah							
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi						
				Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan : %)	100	100	100.00		
				Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan : %)	100	100	100.00		
				Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %)	100	100	100.00		
				Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %)	100	100	100.00		
			Program Pelayanan Penghubung						
				Indeks Kepuasan Pelayanan Pimpinan di Ibu Kota Negara dan di Wilayah Jabodetabek (Satuan : Indeks)	4	4	100.00		
				Indeks Respon Positif Stakeholder Terhadap Informasi Pembangunan di Ibu Kota Negara (Satuan : indeks)	4	4	100.00		
				Persentase Respon Positif Pelayanan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat di Ibu Kota Negara (Satuan : %)	100	90	90.00	Kegiatan Guide Wisata Investasi Yang Rencana Akan Dilaksanakan Diwilayah Tanjung Lesung Pada Tanggal 20-21 November 2021 Dibatalkan Dengan Mempertimbangkan Faktor	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Keselamatan, Keamanan Dan Kondisi Cuaca Yang Tidak Bisa Diprediksi.	
VI	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan								
1	6.1 INSPEKTORAT DAERAH								
		Inspektorat							
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi						
				Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan : %)	100	100,00	100,00		
				Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan : %)	100	100,00	100,00		
				Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %)	100	100,00	100,00		
				Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %)	100	100,00	100,00		
			Program Penyelenggaraan Pengawasan						
				Capaian Pengawasan Internal Bidang Barang-Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah (Satuan : %)	100	100,00	100,00		
				Capaian Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah (Satuan : %)	100	100,00	100,00		
				Capaian Pengawasan Internal Bidang Pendapatan (Satuan : %)	100	100,00	100,00		
				Capaian Pengawasan Internal Bidang Perencanaan Pembangunan dan	100	100,00	100,00		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kepegawaian Daerah (Satuan : %)					
				Persentase Capaian Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Satuan : %)	100	100,00	100,00		
				Persentase Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten (Satuan : %)	100	100,00	100,00		
				Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI (Satuan : %)	100	100,00	100,00		
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi						
				Persentase Capaian Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Satuan : %)	100	100,00	100,00		
VII	Unsur Pemerintahan Umum								
1	8.1 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik							
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi						
				Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan : %)	100	100,00	100,00		
				Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan : %)	100	100,00	100,00		
				Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %)	100	100,00	100,00		
				Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan	100	100,00	100,00		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %)					
			Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan						
				Cakupan pembinaan dan penguatan 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI (Satuan : %)	29	29,00	100,00		
			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik						
				Angka pemilu/pemilukada (Satuan : %)	0	0,00	0		
			Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan						
				Presentase Ormas yang Mendapatkan Pembinaan (Satuan : %)	75	75,00	100,00		
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya						
				Persentase Ormas yang mendapatkan Pembinaan (Satuan : %)	75	75,00	100,00		
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial						
				Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional dalam	100	100,00	100,00		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Mendukung Stabilitas Daerah (Satuan : %)					